



PEMERINTAH KOTA BATAM

LAPORAN KINERJA

2024



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Pemerintah Kota Batam ini dapat diselesaikan dalam waktunya.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Batam ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2024. Berbagai upaya yang telah dilakukan selama tahun 2024, serta hasil yang telah diperoleh, khususnya dalam kaitan untuk mewujudkan Pemerintahan yang efektif-efisien, Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi. Upaya yang dilakukan dan hasil yang diperoleh merupakan pencapaian sasaran dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Pemerintah Kota Batam yaitu "TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA", sesuai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Batam nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Kota Batam Tahun 2024.

Batam, 25 Maret 2025

Wali Kota Batam



Amsakar Achmad

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Batam Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Batam 2024. Pemerintah Kota Batam pada tahun 2024 memiliki sebelas (11) Sasaran Strategis dengan total tiga belas (13) Indikator Kinerja dan tiga belas (13) target kinerja yang harus dicapai berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai kinerja tersebut. Pada Tahun 2024, Pemerintah Kota Batam dengan sasaran strategis yang meliputi keberhasilan peningkatan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang sinergis, mewujudkan birokrasi yang bersih dan berintegritas, serta mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Target kinerja yang telah ditetapkan secara umum dapat terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai. Secara umum keberhasilan program-program sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara dan pengguna layanan. Uraian tingkat ketercapaian/ketidaktercapaian indikator akan lebih detail diuraikan pada Bab Akuntabilitas Kinerja.

Selain pencapaian target tahun 2024, laporan kinerja tahun 2024 ini juga menginformasikan pencapaian target RPJMD 2021 – 2026 Pemerintah Kota Batam sampai dengan tahun 2024 (tahun kedua RPJMD).

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 11 sasaran dengan 13 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Batam, tahun 2024 sebagai berikut :

1. 7 Indikator atau 61,58 % Melampaui target
2. 2 Indikator atau 15,38 % Sesuai target
3. 4 Indikator atau 23,08% Belum mencapai target

1. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor Perindustrian, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berdaya Saing

Pertumbuhan Ekonomi Daerah		
Target	Realisasi	Capaian
6,93%	6,69%	96,54%

2. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Yang Merata Dan Inklusif

Indeks Gini		
Target	Realisasi	Capaian
0,320	0,338	94,67

3. Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Berkualitas Dan Serasi Dengan Tata Ruang Kota Batam Serta Berwawasan Lingkungan

Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan		
Target	Realisasi	Capaian
73,40	73,68	100,38

4. Mewujudkan Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Bertakwa Menuju Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera

Indeks Pembangunan Manusia		
Target	Realisasi	Capaian
82,75	83,32	100,69

Persentase Penduduk Miskin		
Target	Realisasi	Capaian
4,68%	4,85	96,49

5. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Memperluas Akses Hinterland

Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland		
Target	Realisasi	Capaian
68,00	68,83	101,22

6. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Professional, Akuntabel, Transparan Dan Mengayomi

Indeks Reformasi Birokrasi		
Target	Realisasi	Capaian
74,0 (BB)	83,48	112,81

7. Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam

Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah		
Target	Realisasi	Capaian
11,61%	51,44	443,07

8. Meningkatnya Peran Gender Dan Pemuda Dalam Pembangunan

Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
Target	Realisasi	Capaian
94,75	94,95	100,21

9. Menurunnya Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka		
Target	Realisasi	Capaian
8,14%	7,68	105,99

10. Terwujudnya Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Yang Efektif, Efisien Dan Berkualitas.

Opini BPK

Target	Realisasi	Capaian
WTP	WTP	100

Nilai LPPD		
Target	Realisasi	Capaian
Sangat Tinggi	Tinggi (3.4344)	80

11. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi

Indeks SPBE		
Target	Realisasi	Capaian
3,77	3,77	100,00



Kinerja keuangan Pemerintah Kota Batam tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 1.992.990.245.923,- atau 92,87% dari total pagu anggaran sebesar Rp.2.146.026.951.049,- Capaian kinerja Pemerintah Kota Batam diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Kewenangan dan Tugas Pokok	2
a. Kewenangan	2
b. Tugas Pokok	2
C. Struktur Organisasi dan Aparatur Pemerintah	3
a. Struktur Organisasi	3
b. Aparatur Pemerintah	4
D. Isu Strategis	7
Bab II Perencanaan Kinerja	11
A. Rencana Strategis	11
B. Perjanjian Kinerja 2024	16
C. Dukungan Anggaran	18
Bab III Akuntabilitas Kinerja	20
A. Akuntabilitas Kinerja Sasaran	22
1. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor Perindustrian, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berdaya Saing ...	29
2. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Yang Merata Dan Inklusif	42
3. Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Berkualitas Dan Serasi Dengan Tata Ruang Kota Batam Serta Berwawasan Lingkungan	63
4. Mewujudkan Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Bertaqwa Menuju Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera	107
5. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Memperluas Akses Hinterland	150
6. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Professional, Akuntabel,	

Transparan Dan Mengayomi	167
7. Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam	212
8. Meningkatnya Peran Gender Dan Pemuda Dalam Pembangunan ..	218
9. Menurunnya Angka Pengangguran	222
10. Terwujudnya Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Yang Efektif, Efisien Dan Berkualitas	230
11. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	237
B. Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran	248
Bab IV Penutup	251
Daftar Lampiran.....	252
Daftar Penghargaan Kota Batam Tahun 2024.....	254

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya tata Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem akuntabilitas kinerja dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan integritas yang memiliki budaya melayani untuk mewujudkan program-program pembangunan strategis yang berdampak. Sebagai perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka setiap instansi pemerintah perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara sistematis dan periodik setiap akhir tahun anggaran berjalan berdasarkan teknis penyusunan yang mengacu pada PermenPANRB RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas mandat yang diberikan berupa sasaran kinerja dan sumber daya yang telah dikelola untuk mencapai sasaran kinerja, Pemerintah Kota Batam telah menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Kota Batam Tahun 2024, Laporan Kinerja yang telah disusun memberikan gambaran tingkat ketercapaian kinerja, analisis ketercapaian kinerja tersebut yang meliputi faktor keberhasilan atau kegagalan, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilakukan, penggunaan anggaran, dan upaya ke depan yang akan dilaksanakan. Informasi yang tersaji dalam LKjIP Kota Batam Tahun 2024 ini juga menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) Wali Kota kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri yang disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

B. KEWENANGAN DAN TUGAS POKOK

- a. Kewenangan Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014, urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana disebutkan diatas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

- b. Tugas Pokok

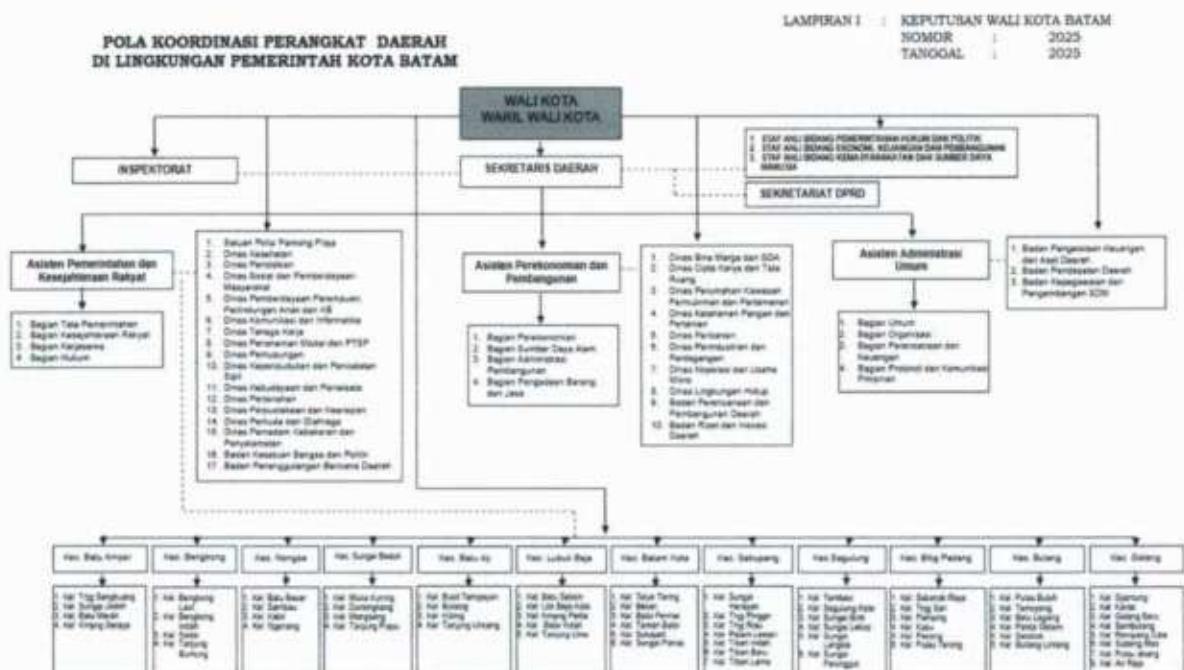
Pemerintah Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Kota Batam yang Bermartabat dan Batam yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis.

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN APARATUR PEMERINTAH

a. Struktur Organisasi

Batam sebagai salah satu daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau, secara yuridis formil didasarkan pada Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan peraturan perundang-undangan maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam pada gambar berikut dibawah ini :

Gambar 1.2
Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Batam

b. Aparatur Pemerintah

Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Batam untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada Tahun 2024 sejumlah 9.369 orang yang terdiri dari 5.491 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3.878 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun rincian PNS di lingkungan Pemerintah Kota Batam menurut:

Golongan	:	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Golongan I	:	14 orang		14 orang
Golongan II	:	311 orang	253 orang	564 orang
Golongan III	:	1.588 orang	2.479 orang	4.067 orang
Golongan IV	:	303 orang	543 orang	846 orang
Jumlah	:	2.216 orang	3.275 orang	5.491 orang

- Jabatan Struktural, sebanyak 782 orang yang terdiri dari :

		Laki-laki	Perempuan
JPT	:	36 orang	30 orang
Administrator	:	181 orang	127 orang
Pengawas	:	565 orang	340 orang
Jumlah	:	782 orang	497 orang

Jabatan fungsional PNS sebanyak 3.331 orang, terdiri atas :

		Laki-laki	Perempuan
Tenaga Pendidikan	:	1.952 orang	533 orang
Tenaga kesehatan	:	842 orang	104 orang
JFT lainnya	:	926 orang	339 orang
Jumlah	:	3.331 orang	976 orang

Jabatan fungsional PPPK sebanyak 3.878 orang, terdiri atas :

			Laki-laki	Perempuan
Tenaga Pendidikan	:	2.593 orang	790 orang	1.803 orang
Tenaga kesehatan	:	596 orang	99 orang	497 orang
JFT lainnya	:	689 orang	399 orang	290 orang
Jumlah	:	3.378 orang	1.288 orang	2.590 orang

- Tingkat Pendidikan PNS sebanyak :

			Laki-laki	Perempuan
SD	:	14 orang	13 orang	1 orang
SMP	:	14 orang	12 orang	2 orang
SLTA	:	522 orang	397 orang	125 orang
D1	:	4 orang	2 orang	2 orang
D2	:	42 orang	19 orang	23 orang
D3	:	657 orang	117 orang	540 orang
D4	:	178 orang	77 orang	101 orang
S1	:	3.577 orang	1.327 orang	2.250 orang
S2	:	479 orang	249 orang	230 orang
S3	:	4 orang	3 orang	1 orang

- Tingkat Pendidikan PPPK sebanyak :

			Laki-laki	Perempuan
SD	:	-	-	-
SMP	:	-	-	-
SLTA	:	73 orang	67 orang	6 orang
D1	:	-	-	-
D2	:	-	-	-
D3	:	512 orang	104 orang	408 orang

D4	:	60 orang	18 orang	42 orang
S1	:	3.147 orang	1.072 orang	2.075 orang
S2	:	86 orang	27 orang	59 orang
S3	:	-	-	-

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Aparat Pemerintah Kota Batam telah melakukan berbagai program melalui pemberian penghargaan, pendidikan pelatihan teknis umum dan fungsional serta pemberian hukuman dan pembinaan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam juga telah mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat peningkatan kompetensi manajerial. Adapun Jumlah pegawai yang mengikuti diklat ini sebanyak 764 orang masing-masing :

- Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II sebanyak 4 orang
- Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebanyak 80 orang
- Diklat Peningkatan kompetensi teknis sebanyak 667 orang
- Diklat fungsional sebanyak 2orang
- Tugas belajar sebanyak 5 orang

Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel. Jumlah pegawai yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Teknis dengan mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi sebanyak 1.417 orang. Dan peningkatan pelayanan melalui tugas belajar:

1. Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang melepaskan jabatan menggunakan dana APBD sebanyak 5 orang.
2. Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang melepaskan jabatan menggunakan dana APBN/Kemenkes/Biaya Mandiri sebanyak 15 orang.
3. Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar Program S1 yang tidak melepaskan jabatan menggunakan biaya mandiri sebanyak 118 orang.
4. Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar Program S2 yang tidak melepaskan jabatan menggunakan biaya mandiri sebanyak 65 orang

Penanganan terhadap Pelanggaran Disiplin PNS dan penanganan kasus

pelanggaran disiplin sedang dan berat pada tahun 2024 sebanyak 6 orang.

D. ISU STRATEGIS

Berdasarkan RKPD 2024, Pemerintah Kota Batam telah menetapkan beberapa fokus utama dalam pelaksanaan pemerintahannya. Fokus-fokus ini dirancang untuk mencapai visi dan misi Kota Batam, serta menjawab tantangan dan peluang yang ada.

Beberapa fokus utama yang dapat kita identifikasi antara lain:

1. Pembangunan Infrastruktur, utilitas perkotaan dan sarana transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan
 - Pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sistem drainase.
 - Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata dan investasi.
 - Peningkatan konektivitas antar wilayah.
2. Peningkatan Kualitas dan fasilitas investasi berbasis maritime dan keunggulan wilayah :
 - a. Peningkatan Infrastruktur Pelabuhan
 - Modernisasi Pelabuhan: Pembaruan peralatan dan teknologi di pelabuhan untuk meningkatkan efisiensi bongkar muat dan kapasitas.
 - Pengerukan Alur Pelayaran: Memperdalam dan memperlebar alur pelayaran untuk mengakomodasi kapal-kapal berukuran besar.
 - Pengembangan Terminal Khusus: Pembangunan terminal khusus untuk jenis kargo tertentu, seperti peti kemas, curah cair, dan kendaraan.
 - b. Pengembangan Kawasan Industri Maritim

- Kawasan Industri Terpadu: Pengembangan kawasan industri terpadu yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti gudang, perkantoran, dan perumahan.
 - Fasilitas Pendukung Logistik: Penyediaan fasilitas pendukung logistik seperti gudang penyimpanan, transportasi, dan distribusi.
- c. Peningkatan Konektivitas
- Pengembangan Transportasi Laut: Peningkatan frekuensi pelayaran dan rute-rute baru untuk menghubungkan Batam dengan daerah lain dan negara-negara tetangga.
 - Pengembangan Transportasi Udara: Peningkatan kapasitas Bandara Hang Nadim untuk menunjang mobilitas penumpang dan kargo.
- d. Peningkatan Kualitas Layanan Publik
- Percepatan Pelayanan Perizinan: Penyederhanaan prosedur dan pengurusan perizinan investasi untuk menarik lebih banyak investor.
 - Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang maritim.
 - Penguatan Penegakan Hukum: Penegakan hukum yang tegas dan konsisten untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan nyaman.
 - Mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik.
 - Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.
 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN)
- e. Pengembangan Pariwisata Bahari
- Pengembangan Destinasi Wisata Bahari: Pengembangan berbagai destinasi wisata bahari seperti pantai, pulau-pulau kecil, dan marina.
 - Fasilitas Pendukung Pariwisata: Penyediaan fasilitas pendukung pariwisata seperti hotel, restoran, dan pusat perbelanjaan.

Keunggulan Wilayah dan Layanan Publik Kota Batam

Kota Batam memiliki beberapa keunggulan yang menjadi daya tarik bagi investor, antara lain:

- **Letak Strategis:** Terletak di jalur perdagangan internasional dan dekat dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara.
- **Ketersediaan Lahan Industri:** Tersedia lahan industri yang luas dan siap dibangun.
- **Fasilitas Infrastruktur yang Memadai:** Memiliki infrastruktur yang cukup lengkap, termasuk pelabuhan, bandara, jalan, dan jaringan listrik.
- **Keamanan dan Stabilitas Politik:** Menikmati keamanan dan stabilitas politik yang baik.
- **Dukungan Pemerintah:** Pemerintah daerah dan pusat memberikan dukungan yang kuat bagi pengembangan investasi.

Fokus Layanan Publik di Kota Batam 2024

Selain fokus pada investasi maritim, Kota Batam juga memberikan perhatian pada peningkatan kualitas layanan publik, antara lain:

- **Pelayanan Satu Pintu:** Penyediaan layanan satu pintu untuk mempermudah pengurusan perizinan dan non-perizinan.
- **E-Government:** Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
- **Partisipasi Masyarakat:** Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Kota Batam diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi maritim yang semakin kuat di Indonesia.

3. Percepatan pemulihan dan pemerataan pembangunan Ekonomi :

- Mendorong pertumbuhan sektor industri dan jasa.
- Meningkatkan daya saing produk lokal.

- Memperkuat sektor pariwisata.
4. Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan bermatabat untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat:
- Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan.
 - Mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.
 - Melindungi masyarakat dari bencana alam.
5. Penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat:
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
 - Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
 - Mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021 – 2026 untuk periode lima tahun. Segala hal terkait seperti penjabaran visi, isi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Pedoman RPJMD mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Tak hanya itu, RPJPN dan RPJMN Nasional juga turut menjadi bahan pertimbangan. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kota Batam Tahun 2020, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Batam Tahun 2020.

VISI Pemerintah Kota Batam sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam 2021-2026 yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai yaitu:

**“TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA
MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA”**

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut:

Bandar Dunia

Kota Batam diarahkan menjadi kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih

kapal yang kompetitif dan dinamis di Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis yang berpotensi menjadi *"center of excellence"*;

Madani

Kota Batam diarahkan untuk mewujudkan masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi, berbanding lurus dengan konsep civil society yang religius;

Sejahtera

Mengandung makna kondisi masyarakat yang utuh lahir dan batin meliputi kondisi yang baik di tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan, rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensi ada;

Modern

Sebagai sikap, cara berfikir, dan cara bertindak yang produktif, berdaya saing, mandiri, terampil dan inovatif dengan mengedepankan tatanan sosial yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan.

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan sebelumnya. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Pemerintah Kota Batam menetapkan Misi:

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi yang pertama dan keempat, Kota Batam sebagai "Bandar Dunia" yang "Modern". Sesuai potensi ekonomi lokal yang ada, maka aktivitas perekonomian Kota Batam bertumpu

pada pengembangan sektor unggulan daerah, yaitu industri, perdagangan, dan pariwisata dengan tetap menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, lokasi Kota Batam yang strategis merupakan keunggulan wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat alih kapal yang kompetitif dan dinamis serta atraktif bagi pelaku bisnis sehingga menjadi "*center of excellence*" di Asia Tenggara. Dengan demikian, Kota Batam diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi yang mantap namun tetap memperhatikan pemerataan pendapatan atau pun produktifitas ekonomi antar kelompok masyarakat maupun wilayah.

2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang

Misi ini juga menjadi bagian upaya pencapaian pokok visi Kota Batam sebagai "Bandar Dunia" yang "Modern". Untuk menciptakan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan dan pariwisata, serta centre of excellence di Asia Tenggara, maka pengembangan dukungan infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju menjadi keharusan. Selain itu, penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaku bisnis melalui kota yang ramah, aman dan nyaman juga menjadi keharusan. Kota Batam diharapkan menjadi kota yang layak huni.

3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia Berkeadilan

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi "Sejahtera" dan "Modern", yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera berbasis potensi sumber daya lokal, baik di bidang sosial, ekonomi maupun budaya. Kesejahteraan sosial terjadi saat kualitas hidup masyarakat meningkat, yang tercermin dari meningkatnya indeks pembangunan manusia serta menurunnya masyarakat miskin. Kesejahteraan ekonomi tercapai saat masyarakatnya produktif dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang mantap yang bersumber dari peningkatan produktifitas sektor-sektor

ekonomi potensial (lokal). Kesejahteraan di bidang budaya tercermin dari berkembangnya potensi budaya daerah/lokal, masyarakat yang memiliki rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensinya, khususnya saat berperan serta dalam pembangunan.

4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi "Sejahtera" sekaligus "Bandar Dunia" yang "Modern". Dibalik lokasi wilayah yang strategis, Kota Batam yang merupakan wilayah kepulauan memiliki tantangan pembangunan tersendiri untuk menjamin pembangunan segala bidang yang merata di seluruh wilayah. Masyarakat Kota Batam yang "sejahtera" akan terwujud secara merata jika pembangunan daerah *hinterland*, khususnya infrastruktur dasar dan daerah, sebagai wilayah penopang Kota Batam dipercepat sehingga tidak terlalu jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan daerah *mainland*/kota.

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi "Madani" yang "modern", yaitu masyarakatnya yang berkarakter, ber peradaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi dan berbanding lurus dengan konsep civil society yang tetap mengedepankan sikap religius. Permasalahan-permasalahan pembangunan yang terjadi di Kota Batam salah satunya dikarenakan oleh keterbatasan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung pelayanan, pengelolaan keuangan daerah hingga sistem/kelembagaan pemerintahan. Penyelenggaraan birokrasi yang profesional dan berintegritas merupakan upaya peningkatan kualitas reformasi birokrasi sehingga terjadi

peningkatan kualitas pemerintah dalam memberikan pelayanan maupun menyelenggarakan urusan pemerintahan lainnya yang mampu menjadi modal atau penggerak pembangunan Kota Batam.

Berdasarkan visi dan misi di atas, Pemerintah Kota Batam merumuskan Tujuan serta Sasaran Strategis Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor perindustrian, perdagangan, jasa, dan pariwisata yang berdaya saing
 1. 1. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan;
 1. 2. Tumbuhnya sektor Pariwisata Unggulan di Kota Batam;
 1. 3. Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam;
2. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan Inklusif.
 2. 1. Meningkatnya produktifitas industri kecil menengah dalam perekonomian daerah
 2. 2. Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian daerah
 2. 3. Meningkatnya kesejahteraan nelayan kecil dan budidaya
 2. 4. Meningkatnya Ekonomi Kreatif Daerah
3. Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan
 3. 1. Terwujudnya perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten
 3. 2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Batam yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
 3. 3. Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni
4. Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertaqwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera
 4. 1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan literasi

masyarakat

4. 2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata
 4. 3. Meningkatnya daya beli masyarakat
 4. 4. Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan
 4. 5. Meningkatnya kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat
 4. 6. Meningkatnya sektor ketahanan pangan daerah
 4. 7. Menurunnya angka pengangguran
 4. 8. Meningkatnya pelayanan sosial masyarakat
-
5. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Memperluas Akses Hinterland
 5. 1. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman di wilayah hinterland
 5. 2. Meningkatnya konektivitas antar pulau di wilayah hinterland
 5. 3. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland
-
6. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi
 6. 1. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas
 6. 2. Meningkatnya kemampuan kemandirian keuangan daerah
 6. 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi

B. PERJANJIAN KINERJA 2024

Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Batam sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, telah menuangkan sasaran strategis yang ditetapkan beserta indikator ketercapaian dan targetnya ke dalam Perjanjian Kinerja (PK). Berikut merupakan PK Pemerintah Kota Batam Tahun 2024.

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1.	Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor Perindustrian, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berdaya Saing	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persen	6,93%
2.	Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Yang Merata Dan Inklusif	Indeks Gini	Indeks	0,320
3.	Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Berkualitas Dan Serasi Dengan Tata Ruang Kota Batam Serta Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan	Indeks	73,40
4.	Mewujudkan Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Bertaqwa Menuju Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	82,75
		Persentase Penduduk Miskin	Persen	4,68%
5.	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Memperluas Akses Hinterland	Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland	Indeks	68,00
6.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Professional, Akuntabel, Transparan Dan Mengayomi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	74
7.	Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	Persen	11,61
8.	Meningkatnya Peran Gender Dan Pemuda Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,75
9.	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat pengangguran	Persen	8,14

		terbuka		
10.	Terwujudnya Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Yang Efektif, Efisien Dan Berkualitas	Opini BPK	Opini	WTP
		Nilai LPPD	Kategori	Sangat Tinggi
11.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Indeks SPBE	Indeks	3,77

C. DUKUNGAN ANGGARAN

Pada Tahun 2024, Pemerintah Kota Batam mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.258.369.598.625,- dengan perincian dukungan anggaran tiap sasaran kinerja sebagai berikut:

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Anggaran
1.	Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor Perindustrian, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berdaya Saing	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	6,93%	Rp. 4.753.534.990,-
2.	Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Yang Merata Dan Inklusif	Indeks Gini	0,320	Rp. 22.641.666.763,-
3.	Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Berkualitas Dan Serasi Dengan Tata Ruang Kota Batam Serta Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan	73,40	Rp. 564.203.552.057,-

4.	Mewujudkan Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Bertaqwa Menuju Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia	82,75	Rp. 703.004.883.555,-
		Persentase Penduduk Miskin	4,68%	
5.	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Memperluas Akses Hinterland	Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland	68,00	Rp 147.046.416.122,-
6.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Professional, Akuntabel, Transparan Dan Mengayomi	Indeks Reformasi Birokrasi	74 (BB)	Rp.496.294.186.385,-
7.	Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	11,61	Rp. 1.361.756.316,-
8.	Meningkatnya Peran Gender Dan Pemuda Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,75	Rp. 15.705.799.399,-
9.	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	8,14	Rp. 28.977.091.181,-
10.	Terwujudnya Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Yang Efektif, Efisien Dan Berkualitas	Opini BPK	WTP	Rp. 154.562.953.724,-
		Nilai LPPD	Sangat Tinggi	
11.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Indeks SPBE	3,77	Rp. 7.475.110.557,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja menggambarkan kemampuan instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakan. Pelaksanaan akuntabilitas kinerja memastikan bahwa pelaksanaan anggaran yang ditetapkan merupakan cara untuk mencapai sasaran strategis dan membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan sasaran strategis yang langsung dirasakan masyarakat (pengguna layanan), menetapkan ukuran keberhasilan atas pencapaian sasaran strategis (berupa indikator kinerja dan target), serta memilih program dan kegiatan yang paling efektif- efisien selaras untuk mencapai tujuan.

Isi laporan menggambarkan penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis, yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, RKPD Tahun 2024, dan PK Tahun 2024. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Isi laporan menggambarkan penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis, yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel
Predikat Nilai Capaian Kinerja
Dalam Skala Pengukuran Ordinal

Persentase	Predikat
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai / Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:



Tabel
Kategori Pencapaian Kinerja Sasaran
Pemerintah Kota Batam Tahun 2024

No.	Kategori	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	75.00 – 89.99
3	Cukup	65.00 – 74.99
4	Kurang	50.00 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

Kategori Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Batam Tahun 2024



Setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuannya, demi mengukur peningkatan kinerja, serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah.

Hal pertama yang perlu dilakukan instansi pemerintah, adalah menentukan kinerja utama dari instansi pemerintah bersangkutan. Kinerja harus utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU jadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kota Batam telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Tingkat Kota Batam melalui Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.108/HK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Batam Tahun 2022-2026.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Kota Batam melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Pemerintah Kota Batam tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel
Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Batam
Tahun 2024

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persen	6,93	6,69	96,54
2	Indeks Gini	Indeks	0,320	0,338	94,67
3	Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan	Indeks	73,40	73,68	100,38
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	82,75	83,32	100,69
5	Persentase Penduduk Miskin	Persen	4,68	4,85	96,49
6	Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland	Indeks	68,00	68,83	101,22
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	74,00	83,48	112,81
8	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	Persen	11,61	51,44	443,07
9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,75	94,95	100,21
10	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	8,14	7,68	105,99
11	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100.00
12	Nilai LPPD	Kategori	Sangat Tinggi	Tinggi 3.4344	80,00

13	Indeks SPBE	Indeks	3,77	3,77	100,00
----	-------------	--------	------	------	--------

Sumber: Bappeda Kota Batam

Secara umum, Pemerintah Kota Batam telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Batam
Tahun 2024

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2024		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor Perindustrian, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berdaya Saing	1	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persen	6.93	6.69	96.54
2	Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Yang Merata Dan Inklusif	2	Indeks Gini	Indeks	0,320	0,338	94.67
3	Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Berkualitas Dan Serasi Dengan Tata Ruang Kota Batam	3	Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan	Indeks	73,40	73,68	100.38

	Serta Berwawasan Lingkungan						
4	Mewujudkan Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Bertaqwa Menuju Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera	4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	82,75	83,32	100,69
		5	Persentase Penduduk Miskin	Persen	4,68	4,85	96,49
5	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Memperluas Akses Hinterland	6	Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland	Indeks	68,00	68,83	101,22
6	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Professional, Akuntabel, Transparan Dan Mengayomi	7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	74,00	83,48	112,81
7	Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam	8	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	Persen	11,61	51,44	443,07
8	Meningkatnya Peran Gender Dan Pemuda Dalam Pembangunan	9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,75	94,95	100,21
9	Menurunnya Angka Pengangguran	10	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	8,14	7,68	105,99

10	Terwujudnya Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Yang Efektif, Efisien Dan Berkualitas	11	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100.00
		12	Nilai LPPD	Kategori	Sangat Tinggi	Tinggi (3,4344)	80,00
11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	13	Indeks SPBE	Indeks	3,77	3,77	100,00

Sumber: Bappeda Kota Batam

Tabel

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran
Pemerintah Kota Batam Tahun 2024

NO.	PREDIKAT	RATA-RATA % CAPAIAN	JUMLAH INDIKATOR
1	Sangat Baik	>90	12
2	Baik	75.00 – 89.99	1
3	Cukup	65.00 – 74.99	-
4	Kurang	50.00 – 64.99	-
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	-
6	n/a	-	-
		Jumlah	13



Tabel
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Pemerintah Kota Batam Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	0-49.9	50.00 – 64.99	65.00 – 74.99	75.00 – 89.99	>90
				Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
A. Misi 1								
1	Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor Perindustrian, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berdaya Saing	1	101,59	-	-	-	-	Sangat Baik
2	Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Yang Merata Dan Inklusif	1	94,67	-	-	-	-	Sangat Baik

3	Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam	1	443,07	-	-	-	-	Sangat Baik
B. Misi 2								
4	Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Berkualitas Dan Serasi Dengan Tata Ruang Kota Batam Serta Berwawasan Lingkungan	1	100,38	-	-	-	-	Sangat Baik
C. Misi 3								
5	Mewujudkan Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Bertaqwa Menuju Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera	2	100,35	-	-	-	-	Sangat Baik
6	Meningkatnya Peran Gender Dan Pemuda Dalam Pembangunan	1	100,21	-	-	-	-	Sangat Baik
7	Menurunnya Angka Pengangguran	1	105,99	-	-	-	-	Sangat Baik
D. Misi 4								
8	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Memperluas Akses Hinterland	1	101,22	-	-	-	-	Sangat Baik
E. Misi 5								

9	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Professional, Akuntabel, Transparan Dan Mengayomi	1	112,81 Nilai RB	-	-	-	-	Sangat Baik
10	Terwujudnya Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Yang Efektif, Efisien Dan Berkualitas	2	90,00	-	-	-	-	Sangat Baik
11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	1	100.00	-	-	-	-	Sangat Baik

Sumber: Pengolahan Data

A. AKUNTABILITAS KINERJA SASARAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan, pencapaian kinerja Pemerintah Kota Batam dan analisisnya adalah sebagai berikut.

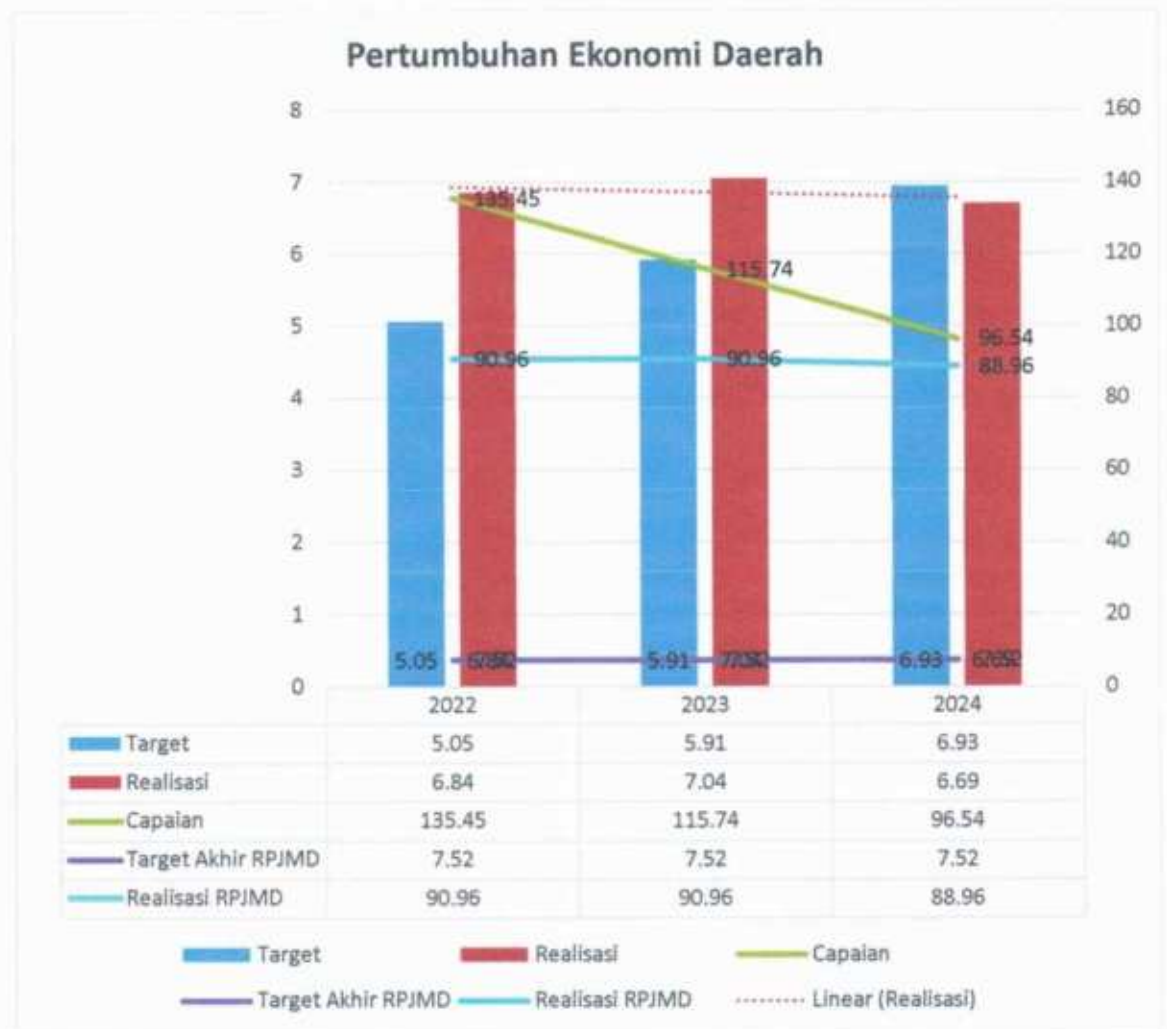
1. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor Perindustrian, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berdaya Saing

Indikator Kinerja : Pertumbuhan Ekonomi Daerah

TAHUN	KINERJA			TARGET RPJMD (2026)	CAPAIAN REALISASI THD TARGET RPJMD (2026)
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		

2022	5,05	6,84	135,45	7,52	90,96
2023	5,91	7,04	115,74		90,96
2024	6,93	6,69	96,54		88,96

Sumber: Bappeda Kota Batam

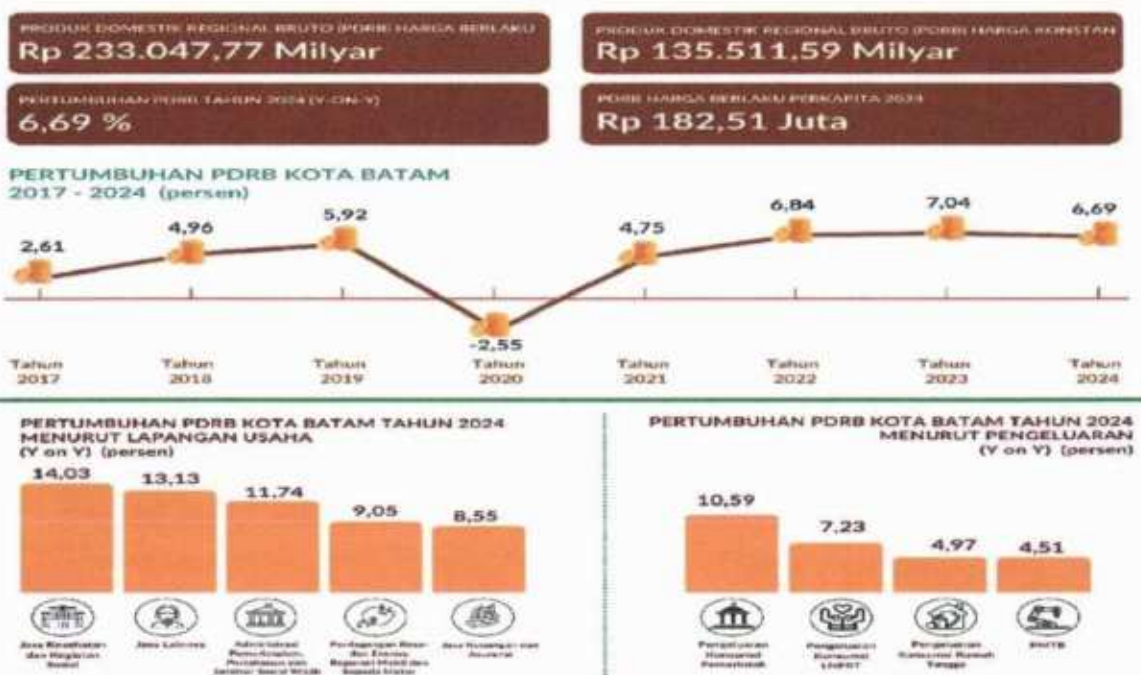


Capaian atas sasaran ini dengan indikator "Pertumbuhan Ekonomi Daerah". Dengan realisasinya sebesar 6,69 % dari target sebesar 6,93% yang dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 96,54 %, capaian ini belum memenuhi target yang diperjanjikan, namun apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Batam sebesar 7,52% maka capaian kinerjanya pada tahun 2024 sudah mencapai 88,96%.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam, Prov.Kepri dan Indonesia Tahun 2020 - 2024 (y-on-y), persen



Pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2024 sebesar 6.69 jika dibandingkan dengan Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau di tahun yang sama sebesar 5.02 terdapat selisih sebesar 1.67 % dan apabila disandingkan dengan Pertumbuhan ekonomi Nasional/Indonesia sebesar 5.03 terdapat selisih sebesar 1.68 %.



- Ekonomi Kota Batam Tahun 2024 terhadap Tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 6,69 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 14,03 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,59 persen.
- Dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Batam menurut Lapangan Usaha, distribusi terbesar masih didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan distribusi mencapai 56,83 persen dari total PDRB Kota Batam.
- Dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Batam menurut Pengeluaran, distribusi terbesar didominasi oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan distribusi mencapai 45,59 persen dari total PDRB Kota Batam.

Capaian ini didorong dengan implementasi sektor perekonomian yang tidak hanya bertumpu pada industri besar yang ada di kawasan industri saja, namun memperhatikan juga pengembangan sektor ekonomi lain sehingga capaian lebih optimal. Selain itu adanya peningkatan sektor-sektor unggulan seperti pariwisata dan perdagangan di Kota Batam yang menyebabkan

perekonomian bergerak ke arah positif melebihi target yang ditetapkan. Hal ini juga dikarenakan dilakukan upaya percepatan pemulihan dan pemerataan pembangunan ekonomi dengan rencana tindak lanjut berikut:

1. Memfasilitasi akses bagi usaha mikro ke pusat perdagangan;
2. Mendorong berkembangnya pusat kegiatan ekonomi di bidang pariwisata;
3. Pemasaran dan promosi yang optimal;
4. Penurunan sukudana bergulir menjadi 4% (sesuai ketentuan berlaku);
5. Fasilitasi ruang usaha mikro yang akan dibangun pemerintah;
6. Meningkatkan pendapatan nelayan dan petani melalui pasar yang menjual produk lokal;
7. Operasi pasar dan bantuan sembako untuk mengontrol harga dan menekan laju inflasi.

Hal ini dapat dilihat dan diukur dengan pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran (bukan mobil dan sepeda motor) dan pertumbuhan sektor pendukung pariwisata (sektor akomodasi dan makan minum). Untuk melihat perbandingan capaian kinerja antara tahun 2023 dan tahun 2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor Perindustrian, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berdaya Saing Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024			Target RPJMD (2026)	Capaian Realisasi 2024 Thd Target RPJMD (2026)
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran (bukan mobil dan sepeda motor)	4,53%	3,59%	79.25%	6,5%	6,63%	102,00 %	7,12%	93,12%

2	pertumbuhan sektor pendukung pariwisata (sektor akomodasi dan makan minum)	3,7	48,78	1318,38 %	4,7%	30,95%	658,51 %	7,41%	417,68%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		698,82%			380,26%			-	-

Sumber: Bappedda Kota Batam

1. Pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran (bukan mobil dan sepeda motor)

Capaian kinerja pada pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran (bukan mobil dan sepeda motor) sesuai tabel di atas pada tahun 2024 realisasi adalah sebesar 6,63 % dari target sebesar 6,5% yang direncanakan sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 102,00 %, capaian ini telah mencapai target yang ditetapkan. Dengan perbandingan tahun 2023 target sebesar 4.53% dan capaian kinerja sebesar 3,59% dengan persentase 79.25 % maka bila dilihat terdapat kenaikan sebesar 22.75 % dari tahun 2023, serta jika dibandingkan dengan target akhir rpjmd 2026 sebesar 7.12% maka capaian realisasi sebesar 93.12 %.

Pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran (bukan mobil dan sepeda motor) di Kota Batam adalah meningkatnya nilai PDRB lapangan usaha sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Bukan mobil dan sepeda motor) tahun n dibanding tahun n-1, sehingga dapat diketahui keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja maupun peningkatan/penurunan kinerja. Namun, hal tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor/penyebab. Adapun faktor pendukung dalam pencapaian kinerja indikator ini dikarenakan adanya akselerasi pembangunan yang dilakukan oleh Pemko Batam dan BP Batam sehingga mendorong pertumbuhan investasi yang signifikan;

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Masih ada keterbatasan kewenangan oleh pemerintah daerah terkait kebijakan perdagangan;
2. Masih kurangnya sarana pendukung distribusi perdagangan.

Adapun upaya dan solusi untuk mendorong pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Mengupayakan adanya perbaikan regulasi dalam hal kebijakan perdagangan terkait kewenangan pemerintah daerah;
2. Memperbaiki pengelolaan pasar rakyat serta pusat distribusi dalam rangka memperlancar arus distribusi perdagangan.

Agar pencapaian sasaran dapat terwujud, diperlukan perbaikan kinerja sebagai rekomendasi untuk tahun yang akan datang seperti melaksanakan kegiatan yang mendukung program pengembangan ekspor untuk mencapai sasaran peningkatan pertumbuhan sub sektor perdagangan.

**Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran
Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor
Perindustrian, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang
Berdaya Saing Tahun 2023 dan Tahun 2024**



2. Pertumbuhan sektor pendukung pariwisata (sektor akomodasi dan makan minum)

Indikator ini merupakan salah satu dari indikator sasaran strategis Wali Kota Batam terkait dengan Misi ke-1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.

Capaian indikator kinerja nyata pada "pertumbuhan sektor pendukung pariwisata (sektor akomodasi dan makan minum)" tahun 2024 yang mendukung pencapaian sasaran dengan realisasi sebesar 30,95 % dari target sebesar 4,7% yang direncanakan sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 658,51%, capaian melebihi target. Dengan ini, bila

dibandingkan dengan target Tahun 2023 sebesar 48.78%, mengalami penurunan yang dapat dilihat juga bahwa hal ini sangat berpengaruh dengan peningkatan ekonomi Kota Batam, dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Batam maka capaian kinerjanya sudah mencapai 417,68%. Perlu tinjauan ulang terhadap target ini, mengingat capaian yang sudah sangat tinggi.

Konsumsi merupakan salah satu faktor penggerak pertumbuhan ekonomi. Tingkat konsumsi masyarakat akan turut menentukan kecepatan akselerasi pertumbuhan ekonomi Kota Batam. Hal yang harus diperhatikan adalah pertumbuhan ekonomi harus berimbang dengan terciptanya pemerataan pendapatan. Artinya pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja baru, pengurangan pengangguran dan pengurangan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2024 didorong oleh beberapa faktor utama yang mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, dan sektor pariwisata. Berikut adalah analisis mendalam mengenai faktor-faktor pendorong tersebut:

1. Pembangunan Infrastruktur (Pembangunan infrastruktur yang masif di Batam, termasuk jalan, pelabuhan, dan bandara, menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang baik tidak hanya meningkatkan konektivitas tetapi juga menarik investasi dari luar daerah. Proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan dan direncanakan akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi lokal)
2. Investasi dan Aktivitas Ekonomi (Peningkatan investasi, baik domestik maupun asing, menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Batam. Pemerintah daerah aktif dalam menarik investasi melalui berbagai kebijakan yang mendukung iklim usaha yang kondusif. Proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2024 berada di kisaran 6,7% hingga 7,5%, menunjukkan optimisme terhadap kinerja ekonomi ke depan)
3. Sektor Pariwisata (Sektor pariwisata di Batam menunjukkan

pertumbuhan yang signifikan, terutama dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Pada tahun 2023, jumlah kunjungan wisatawan meningkat sebesar 110,79% dibandingkan tahun sebelumnya. Kegiatan promosi pariwisata serta penyelenggaraan berbagai event kuliner dan budaya juga berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor ini)

4. Sektor Industri (Industri pengolahan di Batam juga mengalami peningkatan, terutama dalam subsektor alat angkutan dan teknologi informasi. Kenaikan produksi di sektor ini berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Batam)

5. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (Batam memiliki beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. KEK seperti Nongs Digital Park dan KEK Batam MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) menawarkan insentif bagi investor dan mendorong pengembangan industri baru. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan lapangan kerja dan memperkuat basis industri di Batam)

6. Kebijakan Pemerintah (Kebijakan pemerintah daerah yang fokus pada pemantapan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan berkelanjutan juga merupakan faktor pendorong penting. Dengan alokasi anggaran yang tepat pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan) =

Secara keseluruhan, kombinasi dari pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, kebijakan pro-investasi, pengembangan sektor pariwisata, serta dukungan dari kawasan industri akan menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2024.

Faktor penghambat pertumbuhan ekonomi daerah Kota Batam pada tahun 2024 dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek yang mempengaruhi dinamika ekonomi lokal. Meskipun Batam mengalami pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2023, terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk menjaga momentum tersebut.

1. Masalah Infrastruktur (Keterbatasan Infrastruktur: Meskipun ada peningkatan infrastruktur, seperti jalan dan pelabuhan, kebutuhan akan pengembangan lebih lanjut masih ada. Keterbatasan dalam infrastruktur transportasi dan utilitas dapat menghambat investasi dan mobilitas barang serta jasa - Pemeliharaan Infrastruktur: Banyak infrastruktur yang sudah ada memerlukan pemeliharaan dan perbaikan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Jika tidak ditangani, hal ini dapat menyebabkan penurunan efisiensi operasional)
2. Ketergantungan pada Sektor Tertentu (Diversifikasi Ekonomi: Batam masih sangat bergantung pada sektor industri tertentu, seperti galangan kapal dan produksi elektronik. Ketidakberagaman ini membuat ekonomi daerah rentan terhadap fluktuasi pasar global - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK): Meskipun KEK memberikan dorongan, ketergantungan pada sektor-sektor ini dapat menjadi risiko jika tidak diimbangi dengan pengembangan sektor lainnya, seperti pariwisata dan jasa)
3. Kebijakan Ekonomi dan Investasi (Koordinasi dengan Pemerintah Pusat: Pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam hal pendanaan dan dukungan kebijakan juga menjadi faktor penting. Keterlambatan atau ketidakpastian dalam dukungan ini dapat menghambat proyek-proyek pembangunan yang vital)
4. Lingkungan Bisnis (Kondisi Pasar Global: Fluktuasi ekonomi global, termasuk perubahan dalam permintaan ekspor, dapat berdampak langsung pada perekonomian Batam yang terintegrasi dengan pasar internasional) = Secara keseluruhan, meskipun Batam menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi yang positif, tantangan-tantangan ini perlu diatasi melalui strategi pembangunan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Rencana tindak lanjut dengan memfasilitasi akses bagi usaha mikro ke pusat perdagangan; Dukungan Infrastruktur dan Investasi = (Iklim Investasi: Pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif

untuk menarik lebih banyak investor, terutama dalam konteks meningkatnya minat terhadap Indonesia sebagai tujuan investasi - Infrastruktur Transportasi: Pembangunan jalan utama yang sedang berlangsung di Batam diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mendorong pertumbuhan sektor transportasi serta pariwisata - Koordinasi Investasi: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengarahkan perlunya koordinasi antar kementerian untuk mempercepat realisasi investasi dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan) =

1. Melakukan mitigasi bencana (baik alam maupun non alam) yang terintegrasi dalam kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kota Batam.
2. Meningkatkan media promosi kepariwisataan baik di dalam negeri maupun luar negeri
3. Kerjasama dengan pihak swasta sebagai pemanfaatan media promosi
4. Pembinaan terhadap pelaku usaha sektor kepariwisataan terutama sektor akomodasi dan makan minum

Dalam hal peningkatan yang perlu diperhatikan oleh Kota Batam, dapat disampaikan rekomendasi perbaikan tahun yg akan datang sebagai berikut:

1. Memperbaiki sinergi antara sektor pariwisata dengan sektor-sektor pendukung lainnya secara terintegrasi, seperti sektor olahraga, sektor seni budaya, sektor usaha mikro dan kecil, sektor industri kreatif dan sektor lainnya yang dapat menjadi pengungkit sektor pariwisata Kota Batam;
2. Menyusun desain, strategi dan rencana aksi pada pengembangan ekosistem bisnis pariwisata dan ekraf dalam konsepsi kota cerdas.
3. Memprioritaskan pencapaian target sesuai dengan RPJMD untuk program yang belum terealisasi 100%.
4. Meningkatkan kerjasama kepariwisataan baik dalam maupun luar negeri.

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor Perindustrian, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berdaya Saing ini adalah :

1. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Perizinan dan Pendaftaran perusahaan	13.396.500,00	11.384.500,00-	84,98
2.	Peningkatan sarana dan distribusi perdagangan	499.953.040,00	414.767.465,00	82,96
2.	Pengembangan Ekspor	31.610.000,00	30.100.000,00	95,22
Total		544.959.540,00	456.251.956,00	83,72

Sumber: Bappeda Kota Batam

2. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.297.470.000,-	1.249.548.131,-	96,31
2.	Pemasaran Pariwisata	2.911.105.450,-	2.849.360.850,-	97,88
Total		4.208.575.450,-	4.098.908.981,-	97,39

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Batam

2. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Yang Merata Dan Inklusif

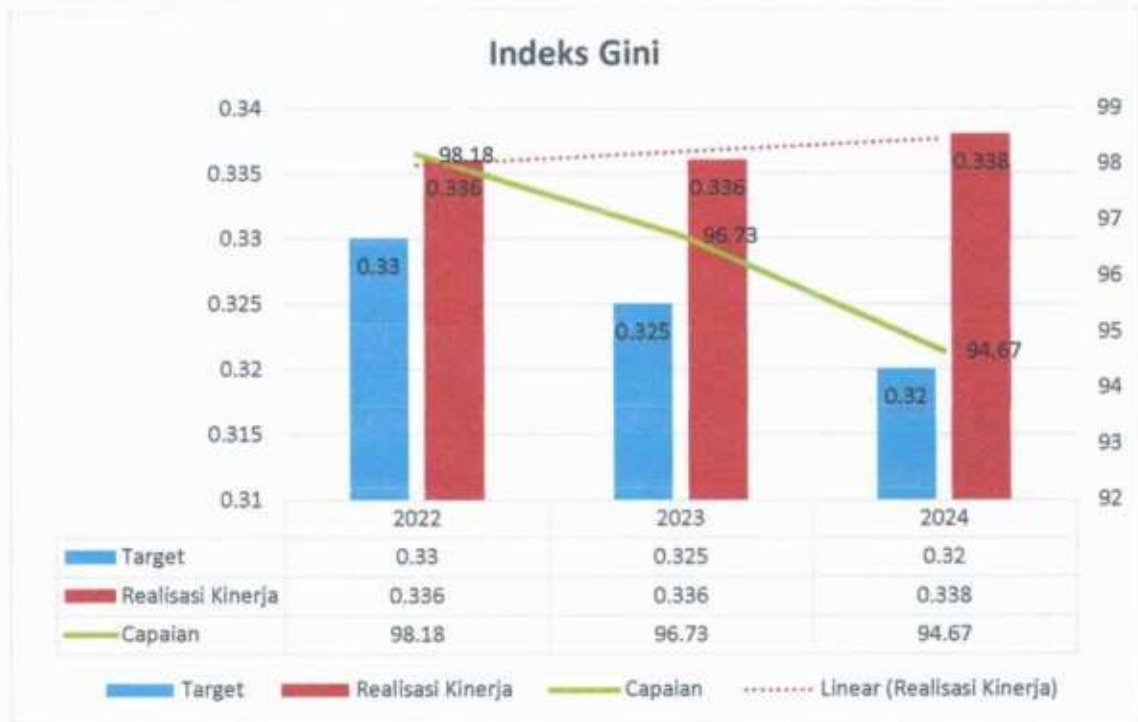
Indeks Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan jika terhadap suatu distribusi pendapatan, dan nilai Koefisien Gini mendekati nol (0) maka makin merata. Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Koefisien Gininya makin mendekati satu. Patokan tersebut dapat diperhatikan pada tabel sebagai berikut:

Nilai Koefisien Gini	Distribusi Pendapatan
<0,4	Tingkat Ketimpangan Rendah
0,4 – 0,5	Tingkat Ketimpangan Sedang
>0,5	Tingkat Ketimpangan Tinggi

Indikator Kinerja : Indeks Gini

TAHUN	KINERJA			TARGET RPJMD (2026)	CAPAIAN REALISASI THD TARGET RPJMD (2026)
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
2022	0,330	0,336	98,18	0,300	88,00
2023	0,325	0,336	96,73		89,29
2024	0,320	0,338	94,67		88,76

Sumber: Bappeda Kota Batam



Tahun 2024 adalah pelaksanaan tahun keempat RPJMD pada indikator Indeks Gini, realisasi kinerja indikator tahun ini adalah sebesar 0,338 jika dibandingkan target sebesar 0,320 maka capaian sebesar 94,67%, dan dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 0,336 dari target sebesar 0,325 maka capaian sebesar 96,73% maka terjadi penurunan sebesar 2,06 poin. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Batam sebesar dengan target 0,300 maka capaian kinerjanya pada tahun 2024 sudah mencapai 88,76%.

Meningkatkan perekonomian Kota Batam yang merata dan inklusif dalam upaya mewujudkan RPJMD 2021-2026. Diukur dengan Pertumbuhan Omzet Industri Kecil Menengah, Pertumbuhan Omzet Koperasi dan Usaha Mikro, Nilai Tukar Nelayan dan Pertumbuhan Kawasan/Klaster Kreatif. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2023 dan tahun 2024, dapat dilihat pada indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatkan
Perekonomian Kota Batam Yang Merata Dan Inklusif

No	Indikator Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024			Target RPJMD (2026)	Capaian Realisasi 2024 Thd Target RPJMD (2026)
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Pertumbuhan Omzet Industri Kecil Menengah	6,77	6,79	100,30	7,76	7,78	100,26	12,16%	63,98
2	Pertumbuhan Omzet Koperasi dan Usaha Mikro	25,51	25,71	100,78	28,21	29,12	103,23	34,34%	84,80
3	Nilai Tukar Nelayan	101,5	101,85	100,34	102	102,15	100,15	103	99,17
4	Pertumbuhan Kawasan/ Klaster Kreatif Daerah	78,07	100	128,09	80,07	80,07	100,00	84,07%	95,24
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		107,38%			100,91%			-	-

Sumber: Bappeda Kota Batam

1. Pertumbuhan Omzet Industri Kecil Menengah

Adapun realisasi kinerja nyata dari indikator Pertumbuhan Omzet Industri Kecil Menengah pada tahun 2024 sebesar 7.78 dari target 7.76 dengan capaian 100.26 jika dibandingkan dengan tahun 2023 realisasi sebesar 6,79% dengan target 6.77 dengan capaian 100,30 dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 12.26 maka capaian kinerja ini sudah mencapai 63,98%. Hal ini karena tahun 2024 dipengaruhi oleh factor kondisi ekonomi global dan nasional. Untuk menentukan Pertumbuhan Omzet Industri Kecil Menengah dipengaruhi oleh beberapa faktor/penyebab.

Adapun beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai faktor pendukung capaian kinerja sebagai berikut:

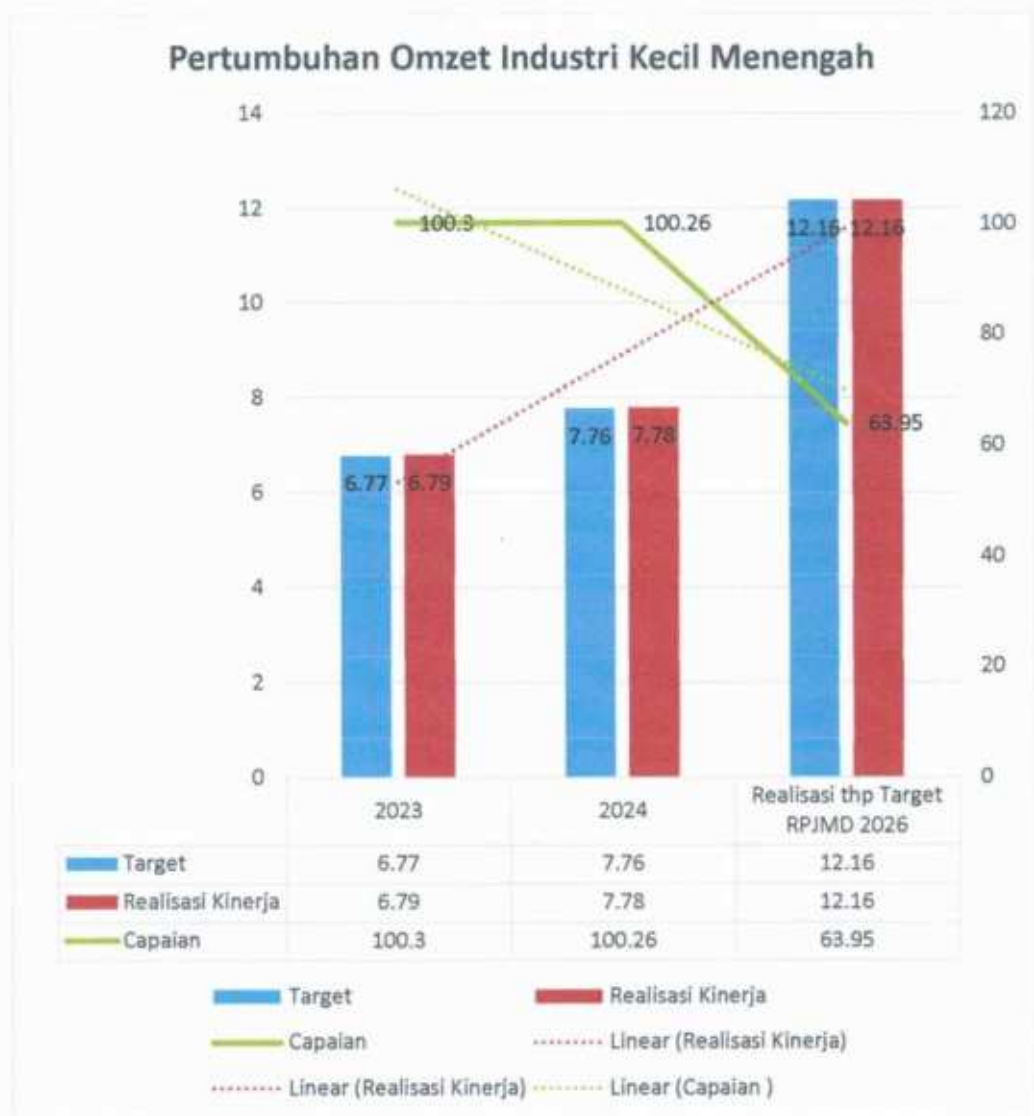
1. Adanya pembinaan terhadap Industri Kecil Menengah
2. Luasnya akses permodalan
3. Terlaksananya kerjasama antara pelaku usaha Industri Kecil Menengah Kota Batam dengan pelaku usaha di luar daerah.

Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaian kinerja Pertumbuhan Omzet Industri Kecil Menengah adalah:

1. Aturan pengiriman barang keluar Kota Batam yang tidak sama dengan status kepabeanan daerah lain;
2. Rantai pasok industri yang tidak saling mendukung;
3. Terbatasnya sumber bahan baku.

Solusi dalam menanggulangi faktor penghambat pencapaian capaian kinerja, diantaranya sebagai berikut:

1. Mempertemukan pelaku UKM dengan akses pembiayaan baik itu perbankan, non perbankan maupun lembaga keuangan lainnya
2. Mengikutsertakan pelaku UKM secara bergiliran untuk mengikuti kegiatan pameran.
3. Melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi sertifikasi usaha untuk meningkatkan kualitas produk, dan pendampingan bagi para pelaku UKM.



Gambar
 Memberikan semangat dan motivasi pada
 kegiatan Pelatihan Marketing dan Branding Produk



Kegiatan Pelatihan Pelaku Usaha Mikro
Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

2. Pertumbuhan Omzet Koperasi dan Usaha Mikro

Koperasi sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 21 Tahun 2015, bahwa pemeringkatan koperasi harus dilaksanakan oleh

Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi yang telah Terakreditasi Kementerian Koperasi dan UKM RI. Koperasi Berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial (Permenkop no 21 tahun 2015 tentang Pemeringkatan Koperasi). Adapun kriteria koperasi berkualitas terdiri dari beberapa aspek yaitu:

a. aspek kelembagaan koperasi;

meliputi legalitas badan hukum aktif keanggotaan, kepengurusan, program kerja, standar operasional prosedur, standar operasional manajemen, peraturan khusus, rapat anggota dan karyawan, rasio peningkatan jumlah anggota serta persentase kehadiran dalam rapat anggota;

b. aspek usaha koperasi;

ditunjukkan dengan membaiknya keterikatan anggota terhadap anggota lain maupun terhadap organisasi, dalam hal rasa tanggung renteng atau kemauan untuk berbagi resiko (risk sharing), tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi, penambahan aset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan peningkatan keuntungan;

c. aspek keuangan koperasi;

ditunjukkan dengan struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan dana, serta ukuran-ukuran kuantitatif lainnya, seperti, prosentase pelunasan simpanan wajib, dan prosentase besaran simpanan sukarela;

d. aspek manfaat koperasi terhadap anggota;

ditunjukkan dengan meningkatkan penghasilan anggota, menawarkan

barang dan jasa yang lebih murah, menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan, menumbuhkan sikap jujur dan terbuka;

e. aspek manfaat koperasi terhadap masyarakat;

ditunjukkan dengan seberapa jauh usaha yang dijalankan koperasi dapat menyerap tenaga kerja setempat serta seberapa banyak jumlah layanan koperasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum termasuk peran koperasi ikut mereduksi kemiskinan masyarakat setempat.



Menfasilitasi Para Usaha Mikro

Indikator ini untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan koperasi dan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri (pasal 5, UU No. 20/2008 Tentang UMKM).

Berdasarkan hal tersebut, capaian Indikator Pertumbuhan Omzet Koperasi dan Usaha Mikro pada tahun 2023 dari terealisasi 25,71% dengan capaian 100,78% dari target yang diperjanjikan 25,51%, dan target tahun 2024 sebesar 28,21%, terealisasi 29,12% dengan capaian 103,23%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD capaian kinerja ini sudah mencapai 84,80%.

Faktor Pendorong Indeks Gini dan Perekonomian Kota Batam 2024 Kota

Batam, sebagai salah satu daerah strategis di Indonesia, menghadapi tantangan dalam mengelola pertumbuhan ekonominya agar merata dan inklusif. Indeks Gini, yang mengukur ketimpangan distribusi pendapatan, menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah ini. Berikut adalah beberapa faktor pendorong yang dapat meningkatkan perekonomian Kota Batam secara merata dan inklusif pada tahun 2024.

1. Pendidikan dan Keterampilan (Pendidikan yang berkualitas dan merata sangat penting untuk mengurangi ketimpangan sosial. Pemerintah Kota Batam berfokus pada peningkatan akses pendidikan, termasuk program pendidikan gratis untuk anak-anak di tingkat SMP. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan, masyarakat akan memiliki keterampilan yang lebih baik untuk bersaing di pasar kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka dan menurunkan angka kemiskinan).
2. Pengembangan Sektor UMKM Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar penting dalam perekonomian Batam. Pengembangan UMKM dapat menciptakan banyak lapangan kerja dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi lokal. Dukungan dari pemerintah dalam bentuk pelatihan, akses ke modal, dan pemasaran produk sangat diperlukan untuk memaksimalkan potensi UMKM).
3. Fokus pada Ekonomi Berkelanjutan (Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui model green economy dan blue economy dapat membantu menjaga sumber daya alam sambil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam secara bijaksana, Batam dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor yang ramah lingkungan).
4. Pembangunan Infrastruktur Pembangunan infrastruktur (yang memadai adalah kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Di Batam, pemerintah telah berkomitmen untuk memperbaiki infrastruktur jalan, transportasi, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan konektivitas antar wilayah tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan menarik

investasi.) Kesimpulan Untuk mencapai perekonomian yang merata dan inklusif di Kota Batam pada tahun 2024, diperlukan pendekatan multi-sektoral yang melibatkan pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan, pengembangan UMKM, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, serta fokus pada ekonomi berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan ketimpangan pendapatan dapat dikurangi dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara signifikan, dan Pemerataan pembangunan baik di hinterland maupun di mainland yang cukup sehingga pemerataan terlaksana dengan baik dari segi pembangunan infrastruktur dasar.

Faktor penghambat indeks Gini dalam meningkatkan perekonomian Kota Batam yang merata dan inklusif pada tahun 2024 melibatkan beberapa aspek penting yang mempengaruhi distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa faktor kunci yang dapat diidentifikasi:

1. Akses terhadap Pendidikan dan Pelatihan (Pendidikan dan pelatihan yang tidak merata dapat menghambat kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi yang lebih luas. Kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan membuat sebagian besar masyarakat tidak mampu bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Ini berkontribusi pada ketidaksetaraan pendapatan, di mana individu dengan pendidikan tinggi mendapatkan lebih banyak peluang dibandingkan mereka yang tidak).
2. Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan distribusi pendapatan di suatu daerah. Di Batam, meskipun pertumbuhan ekonomi tercatat positif, ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah. Pertumbuhan ekonomi yang pesat, seperti yang terjadi pada tahun 2023 dengan pertumbuhan mencapai 7,04 persen, tidak selalu diikuti oleh peningkatan yang merata dalam pendapatan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan segmen-segmen tertentu dari populasi tidak merasakan manfaat dari pertumbuhan tersebut)

3. Infrastruktur dan Investasi (Pengembangan infrastruktur yang tidak merata juga menjadi faktor penghambat. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas publik, beberapa daerah di Batam masih tertinggal dalam hal aksesibilitas dan kualitas infrastruktur. Hal ini menghambat investasi di sektor-sektor tertentu, sehingga memperburuk ketimpangan ekonomi)
4. Partisipasi Masyarakat (Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi penghambat. Ketika masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi, maka kebutuhan dan aspirasi mereka sering kali terabaikan, sehingga menciptakan jarak antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial)

Kesimpulan Untuk mencapai perekonomian yang merata dan inklusif di Kota Batam, perlu ada upaya terintegrasi untuk mengatasi faktor-faktor penghambat ini. Ini termasuk meningkatkan akses pendidikan, memperbaiki infrastruktur secara merata, menerapkan kebijakan ekonomi yang inklusif, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan indeks Gini dapat ditekan sehingga menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh warga Batam.

Rencana tindak lanjut Kota Batam, sebagai salah satu pusat ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau, telah menerapkan berbagai upaya untuk meningkatkan perekonomian yang merata dan inklusif, serta mengatasi masalah ketimpangan pendapatan yang tercermin dalam Indeks Gini. Berikut adalah beberapa langkah yang telah diambil:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat: Pemerintah daerah meluncurkan berbagai program pemberdayaan yang fokus pada peningkatan keterampilan masyarakat, seperti pelatihan kerja dan program kewirausahaan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam berpartisipasi dalam ekonomi lokal.
2. Diversifikasi Ekonomi: Batam berusaha untuk tidak hanya bergantung

pada sektor industri manufaktur tetapi juga mengembangkan sektor pariwisata dan jasa. Dengan diversifikasi ini, diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan peluang bagi masyarakat lokal.

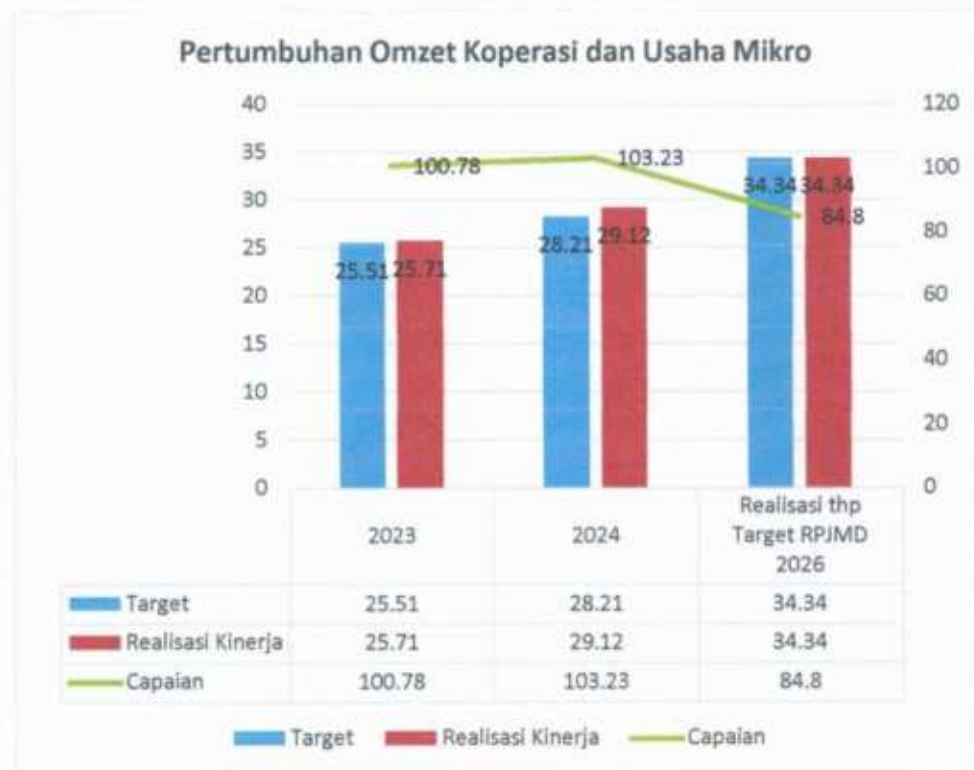
3.

Pengembangan Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur yang lebih baik, seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas publik, bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar daerah. Ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Batam dan sekitarnya.

4. **Kebijakan Pemerataan:** Pemerintah Kota Batam menerapkan kebijakan fiskal yang lebih progresif dan program sosial untuk membantu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Ini termasuk bantuan langsung tunai dan subsidi untuk layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

5. **Investasi dan Kerjasama:** Mendorong investasi dari sektor swasta dengan memberikan insentif bagi perusahaan yang berkomitmen untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Kerjasama dengan berbagai lembaga juga dilakukan untuk memperkuat jaringan sosial dan ekonomi.

Kesimpulan Melalui berbagai upaya tersebut, Kota Batam berkomitmen untuk menciptakan perekonomian yang inklusif dan merata. Meskipun tantangan masih ada dalam hal ketimpangan pendapatan, langkah-langkah yang diambil menunjukkan kemajuan menuju tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih adil bagi seluruh masyarakat. Data terbaru menunjukkan bahwa Kota Batam mengalami fluktuasi dalam Indeks Gini, dengan angka terbaru pada tahun 2024 menunjukkan upaya penurunan ketimpangan pendapatan¹². Meskipun ada penurunan dalam koefisien Gini selama satu dekade terakhir, masih terdapat disparitas pendapatan yang signifikan di antara penduduk.



Gambar
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK
Di Kota Batam



**Menfasilitasi Para Pelaku Usaha Mikro Mingikuti Bazar UKM pada
Acara MTQ Tingkat Kota Batam**



Kegiatan Pengawasan dan Penilaian Kesehatan Koperasi

3. Nilai Tukar Nelayan

Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Pengolah Hasil Perikanan yang mencapai target karena didukung dengan peningkatan produksi nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil yang merupakan sasaran strategis Pemerintah Kota Batam yang dilaksanakan melalui Dinas Perikanan.

Nilai Tukar Nelayan digunakan sebagai indikator meski kinerja juga meliputi kesejahteraan pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan karena pelaku utama yang dominan pada sektor perikanan di Kota Batam adalah nelayan. Selain itu sebagian besar pelaku usaha budidaya ikan terutama budidaya laut dan pengolah hasil perikanan adalah anggota rumah tangga nelayan yang melakukan usaha alternatif. Oleh sebab itu Nilai Tukar Nelayan dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan di Kota Batam.



Indikator Nilai Tukar Nelayan ini adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (I_t) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (I_b) dinyatakan dalam persentase. Sehingga dapat dilihat pada Indikator Nilai Tukar Nelayan dari pada tahun 2024 terealisasi sebesar 102.15 dari target 102 dengan capaian 100.15 jika dibandingkan 2023 terealisasi 101,85% dari target 101.5 dengan capaian 100.34 dan jika disandingkan atas target akhir RPJMD 2026 dengan target sebesar 103 maka capaian sebesar 99.17 %.

**BANTUAN
PEMBERDAYAAN
NELAYAN KECIL
2024**

**SUNGAI BEDUK
8 KELOMPOK**

Kerapu
Ketarap
Bawal
Nelayan Bersama
Dingkis
Lumba Lumba
Sinar Bulan
Nelayan Maju Jaya

**SAGULUNG
3 KELOMPOK**

Maju Utama Jaya
Lance Berjaya
Ikan Dingkis

**BULANG
10 KELOMPOK**

Pemburu
Bahtera Merdeka
Putra Gemilang
Tuah Siti Nurhasanah
Akar Mandiri
Karya Bersama
Air Anugrah
Bina Sejahtera
Sinar Mulia
Sinar Cahaya

**102 KELOMPOK
BERDAYA**

Yudi Admajianto, S.STP
Kepala Dinas

**SEKUPANG
10 KELOMPOK**

Kerapu Bunga Karang
Seraya Maju
Kerapu
Ketarap
Tenggiri
Kakap
Sungai Dangas Berkah
Karya Prima Sejahtera
Sea Tanjung Riau
Nelayan Barokah

**BELAKANG PADANG
15 KELOMPOK**

Nelayan Berkah
Nelayan Jaya
Nasgadhasa
Nur Golibi
Harapan
Terus Dapat
Orang Kite
Tuah Bersatu Pemping
Surya Nelayan
Indra Jaya II
Tanjung Bersinar
Bawal Emas
Kepiting Bakau
Kasu Barat Sejahtera
Nelayan Bertuah

**BATU AMPAR
2 KELOMPOK**

Kelompok Nelayan Sejahtera
Batu Merah

**NONGSA
3 KELOMPOK**

Kuda Laut
Angsa Laut
Cahaya Pagi

**LUBUK BAJA
5 KELOMPOK**

Tanjung Uma Sentosa
Kakap Putih
Tondan
Malaya Satu
Tondan Teritip

**GALANG
46 KELOMPOK**

Pulau Abang Mandiri
Lobster Mutiara
Tanjung Bahari
Tuah Laksemene Muda
Petong Mandiri
Senja Galang
Syahdu 01
Abdi Jaya
Nguan Nelayan Sejahtera
Korek Abadi
Ikatan Nelayan Bersatu
Nasib Nelayan Bersama
Harapan Jaya Bersama
Mutiara Mekar Indah
Hubut Nelayan Rizki
Tuah Bersama
Karas Bertuah
Banyu Biru
Karas Makmur
Eco City I
Eco City II
Eco City III
Eco City IV
Eco City V
Eco City VI
Eco City VII
Eco City VIII
Sembulang Rempang Eco City I
Sembulang Rempang Eco City II
Sembulang Rempang Eco City III
Sembulang Rempang Eco City IV
Sembulang Rempang Eco City V
Sembulang Rempang Eco City VI
Maju Jaya
Nelayan Mutiara Indah
Surya Gemilang
Kuale Jaya Sukses
Surya Mandiri
Bina Nelayan
Setia Bahari
Subang Mutiara
Tuna Biru
Harapan Baru
Berkah
Wardana Jaya
Sumber Makmur
Semukit Jaya



Sumber: Dinas Perikanan Kota Batam

Beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai faktor penghambat capaian kinerja sebagai berikut:

1. Bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap masih sedikit
2. Fasilitas dan infrastruktur dasar perikanan terutama budidaya ikan dan pengolahan ikan belum maksimal.
3. Kualitas SDA Perikanan perairan Kota Batam semakin menurun
4. Kualitas SDM nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah/pemasar hasil olahan belum memadai
5. Jumlah dan kapasitas tenaga pendamping lapangan perikanan belum memadai.

Adapun beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai faktor pendukung capaian kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) yang telah memenuhi SOP melalui pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kota Batam
2. Adanya pembinaan terhadap Unit Pengolahan Ikan (UPI)

3. Ketersediaan ikan konsumsi yang banyak di perairan Kota Batam.

Solusi dalam menanggulangi faktor penghambat pencapaian capaian kinerja, diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan database UPI
 2. Koordinasi dengan kementerian dalam upaya mendapatkan dukungan maksimal DAK terkait bantuan sarana dan prasarana
4. **Pertumbuhan Kawasan/Klaster Kreatif**

Indikator Pertumbuhan Kawasan/Klaster Kreatif ini adalah meningkatnya Kawasan atau klaster ekonomi kreatif yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam. Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Batam memanfaatkan kerjasama dengan pelaku usaha dengan membuka sentra oleh-oleh Kota Batam di salah satu Pusat Perbelanjaan. Sentra ini diisi dengan berbagai macam produk IKM antara lain, makanan, kain dan fashion, dan kerajinan lainnya yang masih terus dikembangkan pada tahun 2024 ini.



Pada tahun pada tahun 2024 realisasi 80,07% dari target 80.07 % dengan capaian kinerja 100% Jika dibandingkan tahun 2023 realisasi 100 dari target 78,07% dengan capaian 128,09%, , apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2026 capaian kinerja ini sudah mencapai 95,24% dari target 84.07. terjadi penurunan yang dikarenakan beberapa kebijakan yang disesuaikan sehingga mempengaruhi kinerja.

Adapun beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai faktor penghambat antara lain:

1. Pedagang kaki lima masih perlu ditata secara proporsional;
2. Belum adanya aplikasi sistem jaringan perdagangan;
3. Belum optimalnya penyediaan sarana distribusi perdagangan;
4. Minimnya produk IKM ekspor unggulan Kota Batam.
5. Rantai pasok industri di Kota Batam belum banyak melibatkan IKM setempat sebagai salah satu bagian dalam rantai pasok industri di Kota Batam;
6. IKM di Kota Batam didominasi oleh IKM pangan dan kerajinan;

Adapun beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai faktor pendukung capaian kinerja sebagai berikut:

1. Adanya pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata
2. Adanya dukungan dari Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) RI dalam pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif di Kota Batam.
3. Terbangunnya jaringan kerjasama pelaku usaha dan Pemerintah, sehingga memungkinkan pertumbuhan klaster kreatif untuk mengembangkan usaha IKM.
4. Fasilitasi untuk promosi komoditi utama ekspor dengan melakukan peningkatan pembinaan usaha produk ekspor unggulan, misi dagang dan peningkatan citra produk ekspor
5. Pendampingan dan pembinaan agar IKM dapat kompeten dan tersertifikasi.

Gambar : Dukungan dari Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) RI



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam

Solusi dalam menanggulangi faktor penghambat capaian kinerja, diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan Pendampingan pengembangan usaha;
2. Penyelenggaraan Awarding Program;
3. Melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengoptimalkan distribusi komoditas tertentu yang tidak efisien;
4. Penataan, pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
5. Membangun sistem aplikasi jaringan perdagangan;
6. Melakukan pendampingan dan pembinaan agar IKM dapat kompeten dan tersertifikasi;
7. Berupaya menghubungkan IKM ke dalam rantai pasok industri di Kota Batam didukung dengan regulasi;
8. Mendorong IKM agar terkoneksi ke dalam e-commerce.

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran meningkatkan perekonomian Kota Batam yang merata dan inklusif ini adalah:

1. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan rincian sebagai berikut:

Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Perencanaan dan Pembangunan Industri	5.517.714.400,-	5.200.583.122,-	94,25

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Batam

2. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	27.765.000,-	26.002.900,-	93,65
	Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	5.760.000,-	5.500.000,-	95,49
2.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	25.319.663,-	24.579.500,-	97,08
3.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	3.779.438.000,-	3.647.973.450,-	96,52
Total		3.838.282.663,-	3.704.055.850,-	96,50

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Batam

3. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Pengelolaan Perikanan Tangkap	7.748.771.600,-	7.323.102.642,-	94,51

2.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.155.997.000	1.034.358.000,-	89,48
3.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	2.039.100.100,-	1.890.880.762,-	92,73
4.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.341.801.000,-	2.246.721.407,-	95,94
Total		13.285.669.700,-	12.495.062.811,-	94,05

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Batam

3. Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Berkualitas Dan Serasi Dengan Tata Ruang Kota Batam Serta Berwawasan Lingkungan

Indikator Kinerja : Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan

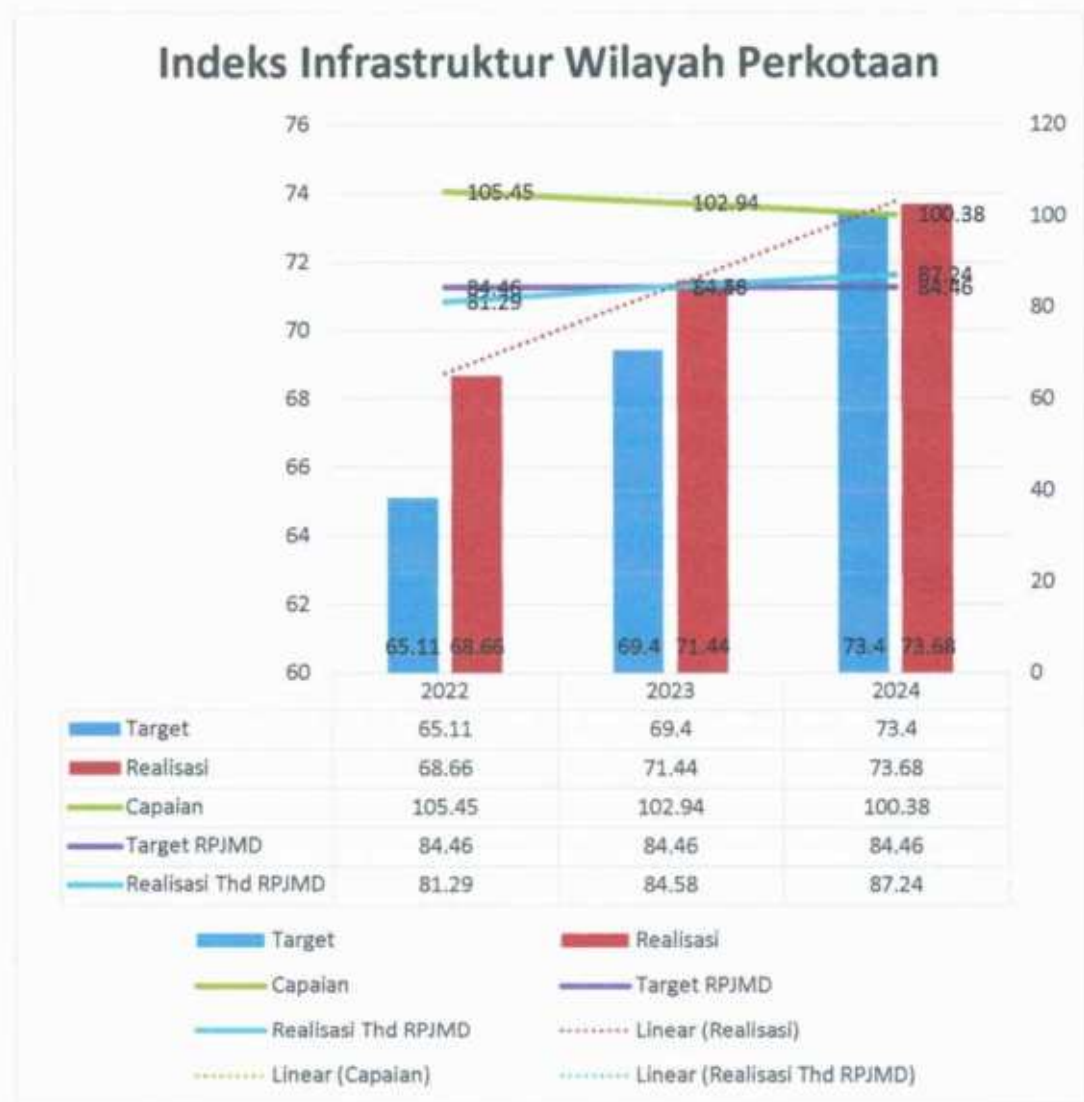
TAHUN	KINERJA			TARGET RPJMD (2026)	CAPAIAN REALISASI THD TARGET RPJMD (2026)
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
2022	65,11	68,66	105,45	84,46	81,29
2023	69,40	71,44	102,94		84,58
2024	73,40	73,68	100,38		87,24

Sumber: Bappeda Kota Batam

Sasaran Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Berkualitas Dan Serasi Dengan Tata Ruang Kota Batam Serta Berwawasan Lingkungan ini adalah perwujudan dalam pokok visi "bandar dunia" yang diarahkan menjadi kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis yang berpotensi menjadi

"center of excellence" serta mewujudkan misi Kota Batam dalam mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.

Realisasi kinerja atas indikator "Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan" adalah sebesar 73,68% dengan target sebesar 73.40 dengan capaian kinerjanya 100,38% jika dibandingkan dengan realisasi 2023 sebesar 71.44 dari target 69.40 dengan capaian 102.94. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Batam tahun 2026 sebesar 84,46 maka capaian kinerjanya pada tahun 2024 sudah mencapai 87,24%.



Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Berkualitas Dan Serasi Dengan Tata Ruang Kota Batam Serta Berwawasan Lingkungan dalam upaya mewujudkan RPJMD 2021-2026. Diukur dengan 6 (enam) indikator, yakni Persentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Persentase pengelolaan sampah, Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perkotaan Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan. Untuk melihat capaian kinerja per indikator dapat dilihat pada indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

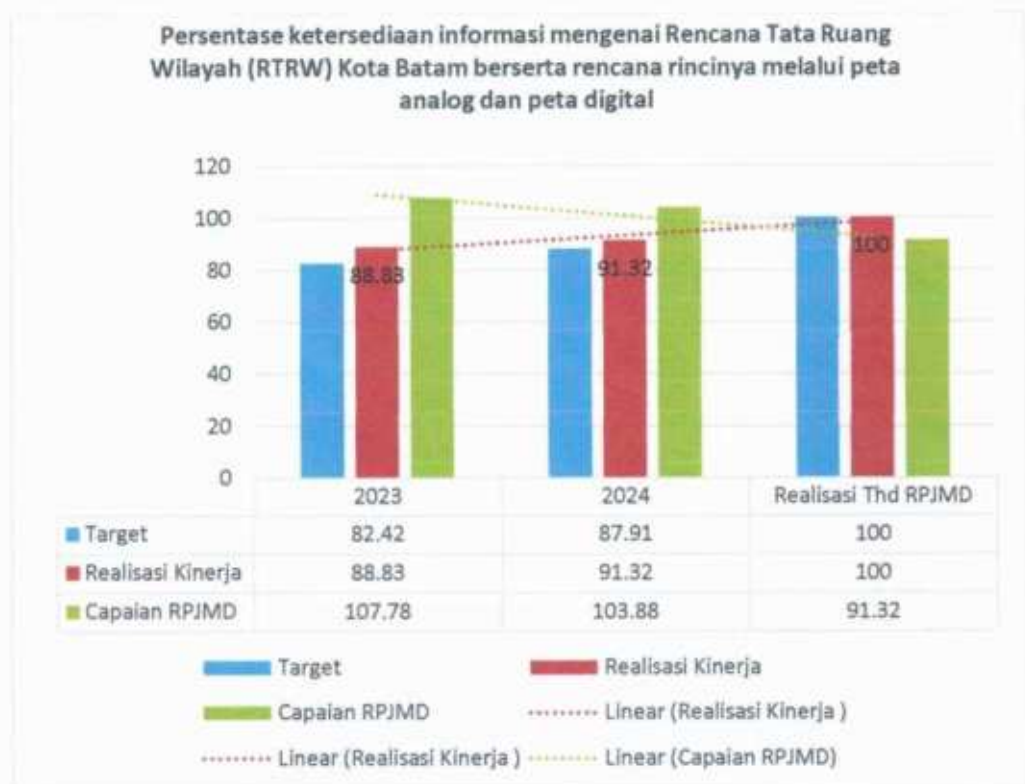
Tabel
Capaian Kinerja Indikator Sasaran Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Berkualitas Dan Serasi Dengan Tata Ruang Kota Batam Serta Berwawasan Lingkungan

No	Indikator Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024			Target RPJMD (2026)	Capaian Realisasi 2024 Thd Target RPJMD (2026)
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Persentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	82,42	88,83	107,78	87,91	91,32	103,88	100%	91,32
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70	67,34	96,20	70,5	64,86	92,00	71,50	90,71

3	Persentase pengelolaan sampah	61,75	76,87	124,49	64,50	76,87	119,18	71,25%	107,89
4	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum	62,25	62,25	100	68,50	68,50	100	95%	72,11
5	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perkotaan	58	50	86,21	63	52	82,54	74,05 %	70,27
6	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	82	83,36	101,66	86	85,78	99,75	95%	90,53
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		102,73%			199,56%			-	-

Sumber: Bappeda Kota Batam

1. Persentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital



Realisasi kinerja nyata indikator ini adalah sebesar 91,32 dari target 87,91 yang direncanakan pada tahun 2024 sehingga capaian kinerjanya adalah 103,88% jika dibandingkan dengan realisasi 2023 sebesar 88.83 dengan target sebesar 82.42 maka capaiannya sebesar 107.78 %. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Batam 2026 sebesar 100% maka capaian kinerjanya pada tahun 2024 sudah mencapai 91,32%.

Indikator Persentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kota Batam berserta Rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital ini adalah cakupan ketersediaan dokumen Tata Ruang yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Batam sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang lingkup pelaksanaan kesesuaian perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang adalah meliputi pengaturan mengenai kegiatan perencanaan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan yang digunakan. Tingginya investasi yang masuk di Kota Batam baik untuk kegiatan industri maupun perumahan

menyebabkan tingginya perubahan alih fungsi lahan. Untuk itulah diperlukan aturan tata ruang yang jelas, detil dan implementatif.

Produk tata ruang yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut adalah Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). RDTR perlu disusun di kawasan perkotaan atau kawasan strategis Kabupaten/Kota. Dalam RDTR telah dijelaskan dengan pasti mengenai Ketentuan Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Zonasi yang meliputi : Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan, Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang, Ketentuan Tata Bangunan, Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal, Ketentuan Pelaksanaan, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Standar Teknis, Ketentuan Peraturan Zonasi.

Kegiatan dokumen Inventarisasi Usulan Revisi Perwako RDTR dan Perda RTRW Kota Batam dilakukan sebagai Upaya untuk mengidentifikasi acuan dalam peninjauan Kembali dokumen Rencana Tata Ruang di Kota Batam beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya Pendampingan Penetapan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK yang telah ditetapkan melalui Peraturan Preiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan KBPBP Batam, Bintan dan Karimun, Pendampingan Kegiatan Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kota Batam, Pendampingan Kegiatan Penetapan Revisi RTRW Provinsi Kepulauan Riau, Harmonisasi Kegiatan Monev Penataan Pemanfaatan Ruang, Harmonisasi terhadap penyesuaian perizinan PKKPR yang terbit di Kota Batam dan Harmonisasi Kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan di Kota Batam. Berdasarkan hal tersebut, berikut daftar dokumen Tata Ruang dan Keseuaian dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang sampai dengan Desember 2024:

Tabel
Rekapitulasi Dokumen tata Ruang Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah Dokumen
-----	--------	----------------

1.	Dokumen Revisi Perwako RDTR WP Nongsa, Batam Kota, Bengkong, Batu Ampar, Lubuk Baja, Sekupang dan Batu Aji	1dokumen
2.	Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) Kota Batam	1 dokumen
3.	Monitoring dan Evaluasi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Kecamatan Sekupang Kota Batam	1 dokumen
4.	Dokumen Penilaian Pelaksanaan PKKPR	5 dokumen
5.	Dokumen Informasi Tata Ruang PKKPR Berusaha (Dokumen Draf Final PKKPR)	290 dokumen
6.	Dokumen Informasi Tata Ruang PKKPR Non Berusaha (Dokumen Pertimbangan Teknis)	158 dokumen
7.	Dokumen Informasi Tata Ruang PKKPR Surat Informasi PKKPR Berusaha UMK (Surat Keterangan Tata Ruang UMKM)	50 dokumen
Jumlah		507 dokumen

Sumber: Dinas CKTR Kota Batam

Faktor pendorong Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan di Batam untuk mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang serta berwawasan lingkungan pada tahun 2024 melibatkan berbagai aspek strategis. Berikut adalah beberapa faktor utama yang berkontribusi dalam konteks ini:

1. Adanya dukungan pihak legislatif dalam penetapan RTRW Kota Batam.
2. Adanya komitmen pimpinan untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana publik dan masyarakat umum menjadi lebih representatif.
3. Adanya komitmen antar personil yang terlibat untuk bersama-sama mencapai target yang sudah ditetapkan.
4. Adanya ketersediaan anggaran sehingga pembangunan dan peningkatan bangunan/ gedung pemerintah dan masyarakat dapat

segera dilakukan.

5. Dukungan koordinasi dan konsultasi oleh Pemerintah Pusat dalam proses penyusunan RTRW dan RDTR Kota Batam.
6. Pembangunan Infrastruktur Fisik Pembangunan infrastruktur fisik di Batam, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara, menjadi prioritas utama pemerintah setempat. Proyek-proyek seperti pengembangan Bandara Internasional Hang Nadim dan Pelabuhan Batu Ampar dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi transportasi, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi
7. Sinergi Antara Pemerintah Kota Batam dan Swasta Kolaborasi antara pemerintah daerah dan Badan Pengusahaan (BP) Batam sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Sinergi ini memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik tetapi juga berorientasi pada pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.
8. Pendekatan Berbasis Komunitas Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Melalui musyawarah untuk menentukan prioritas pembangunan, masyarakat diharapkan dapat lebih terlibat dan merasa memiliki terhadap proyek-proyek yang dilaksanakan di lingkungan mereka.
9. Kebijakan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan Pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan menjadi fokus dalam perencanaan tata ruang kota. Ini termasuk penyediaan jalur hijau, jalur sepeda, dan fasilitas publik yang mendukung keberlanjutan serta kenyamanan bagi pengguna.
10. Dukungan dari Kebijakan Nasional Dukungan dari kebijakan pemerintah pusat dalam hal pendanaan dan regulasi juga menjadi faktor pendorong penting. Program-program nasional yang mendukung pembangunan infrastruktur daerah memberikan dorongan tambahan bagi Batam untuk meningkatkan kualitas infrastrukturnya.

11. Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan terkait manajemen proyek infrastruktur juga sangat penting. SDM yang terampil akan lebih mampu merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek infrastruktur secara efektif. = Dengan mengintegrasikan semua faktor ini, Batam diharapkan dapat menciptakan infrastruktur kota yang tidak hanya modern tetapi juga serasi dengan tata ruang serta berwawasan lingkungan, mendukung visi kota sebagai pusat investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada tahun 2024.

Faktor penghambat dalam mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang di Batam serta berwawasan lingkungan pada tahun 2024 melibatkan berbagai aspek yang saling terkait. Berikut adalah analisis mendalam mengenai faktor-faktor tersebut:

1. Tingginya perubahan alih fungsi lahan.
2. Belum maksimalnya kesadaran masyarakat jasa konstruksi untuk bekerja secara profesional di bidangnya secara utuh (teknis dan administratif).
3. Adanya kendala dalam penyediaan lahan.
4. Adanya kendala dalam penghapusan asset sehingga memperpanjang proses pelaksanaan.
5. Sumber Daya Keuangan Pendanaan yang Terbatas: Pendapatan asli daerah (PAD) yang rendah menjadi salah satu faktor utama penghambat pembangunan infrastruktur. Hal ini menyulitkan pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang vital, Bantuan dari Pemerintah Pusat: Ketergantungan pada anggaran dari pemerintah pusat tanpa adanya alokasi yang memadai untuk proyek infrastruktur lokal juga menjadi kendala.
6. Lingkungan dan Sumber Daya Alam Keterbatasan Sumber Daya Alam: Ketersediaan sumber daya alam yang terbatas dapat mempengaruhi pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan yang buruk dapat memperparah masalah ini, menyebabkan kerusakan yang lebih lanjut pada ekosistem lokal, Dampak Lingkungan dari

Proyek Infrastruktur: Proyek infrastruktur sering kali memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, seperti polusi dan kerusakan habitat, jika tidak dikelola dengan baik.

7. Teknologi dan Inovasi Teknologi Tepat Guna: Penggunaan teknologi yang tidak sesuai atau ketinggalan zaman dalam pembangunan infrastruktur dapat menghambat efisiensi dan efektivitas proyek, Inovasi dalam Perencanaan: Diperlukan pendekatan inovatif dalam perencanaan infrastruktur untuk memastikan bahwa proyek tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga berkelanjutan untuk masa depan. Kesimpulan Mengatasi faktor-faktor penghambat ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat. Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan pendanaan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menerapkan teknologi yang tepat guna, Batam dapat mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan ramah lingkungan pada tahun 2024.

Rencana tindak lanjut Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan dalam mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang kota Batam serta berwawasan lingkungan pada tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Prioritas Pembangunan Infrastruktur

- Perbaikan Jaringan Transportasi:

Jalan Raya: Peningkatan kapasitas jalan raya di kawasan Batam Center, termasuk penambahan jalur hijau, jalur sepeda, dan pedestrian untuk meningkatkan kenyamanan pengguna.

- Pelabuhan Batu Ampar :

Perluasan pelabuhan untuk meningkatkan daya tampung dan mempercepat bongkar muat barang, dengan target mencapai 2 juta TEU kontainer pada tahun 2023.

- Bandar Udara Hang Nadim:

Pembangunan bandar udara yang ditujukan untuk meningkatkan

kapasitas penumpang dan kargo, serta menjadikan Bandar Udara Hang Nadim sebagai pusat logistik dan pergudangan kargo.

2. Manajemen Wilayah Perkotaan Berkelanjutan

- Drainase dan Ruang Terbuka Hijau:

Penyediaan drainase dengan kapasitas yang memadai dan peningkatan ruang terbuka hijau sebagai area resapan untuk mengurangi risiko banjir dan genangan.

- Transportasi Umum Integratif:

Mengembangkan sistem transportasi umum yang terintegratif untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan konektivitas wilayah.

3. Penerapan Teknologi dan Sistem Informasi

- Teknologi Smart City:

Implementasi teknologi smart city untuk memantau dan mengoptimalkan penggunaan infrastruktur, serta meningkatkan efisiensi operasional pemerintahan lokal.

4. Partisipasi Masyarakat dan Swasta

- Corporate Social Responsibility (CSR):

Kolaborasi dengan sektor swasta melalui CSR untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, dan bidang lainnya yang relevan dengan pembangunan kota.

5. Monitoring dan Evaluasi

- Indikator Makro:

Memastikan bahwa perencanaan tetap sesuai dengan indikator makro kota Batam, seperti pertumbuhan ekonomi, indeks gini, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka.

Kesimpulan

Rencana tindak lanjut ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keserasan infrastruktur kota Batam, serta berorientasi pada wawasan lingkungan. Melalui prioritas pembangunan infrastruktur, manajemen wilayah perkotaan berkelanjutan, penerapan teknologi, partisipasi masyarakat dan swasta, serta monitoring evaluasi, pemerintah kota Batam berkomitmen untuk menciptakan kota yang modern, ramah

lingkungan, dan berdaya saing.

1. Pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Pengawasan Bangunan dan Menara dilakukan secara kontinyu guna membangun kesadaran masyarakat dalam hal membangun sesuai Tata Ruang dan PBG (Pesetujuan Bangunan Gedung).
2. Optimalisasi verifikasi izin pemanfaatan ruang.

2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

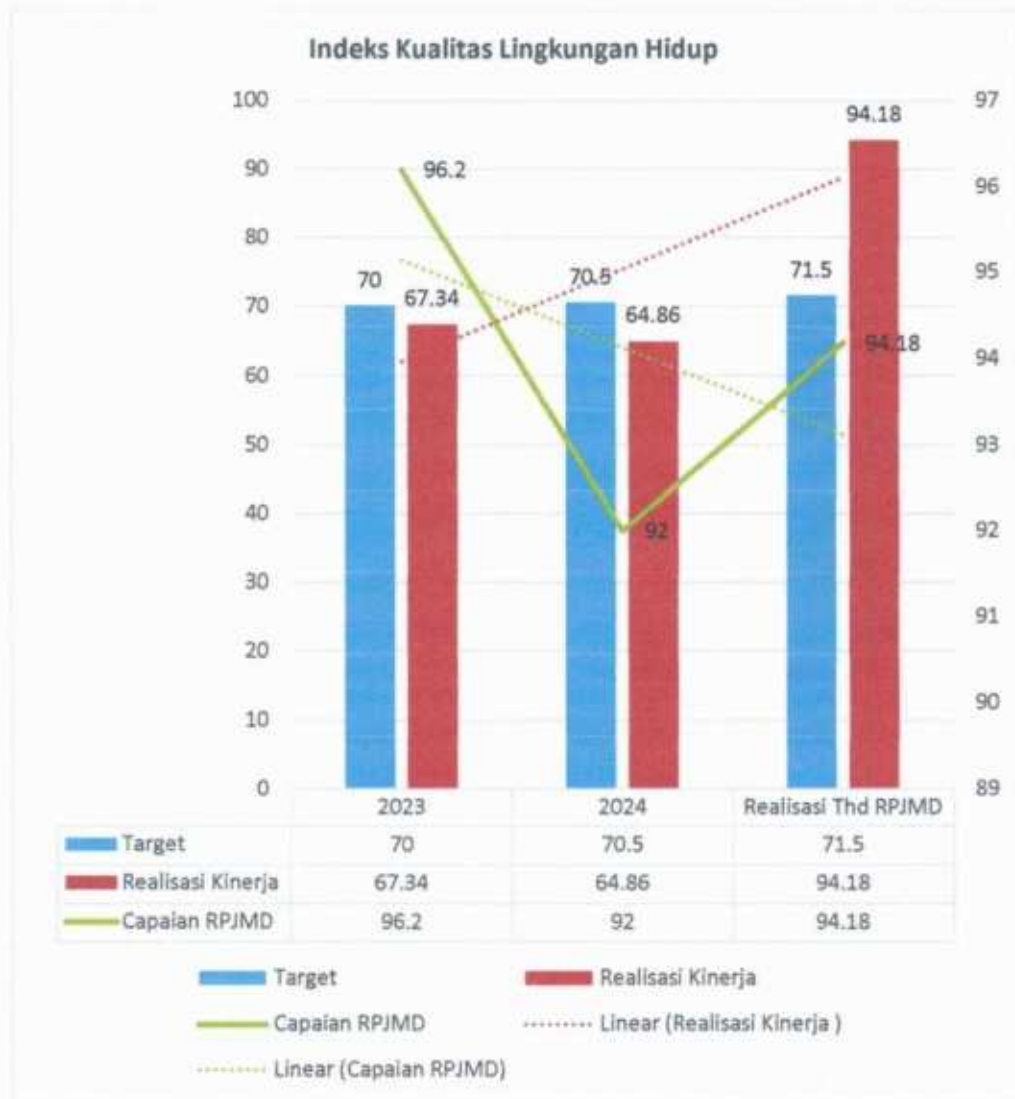
Realisasi kinerja Indikator Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2024 adalah sebesar 64.86 dibandingkan target 70.5 maka capaian sebesar 92.00 jika dibandingkan dengan realisasi 2023 sebesar 67.34 dengan target sebesar 70.00 maka capaiannya sebesar 96.20.78 %. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Batam 2026 sebesar 71.50 % maka capaian kinerjanya pada tahun 2024 sudah mencapai 94,18 %.

Capaian kinerja ditunjukkan pada Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tercapai sebesar 64,86. Adapun Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah sebagai berikut :

Indeks Tutupan Hutan (ITH x 21,9%) + Indeks Kualitas Udara (IKU x 40,5%) + Indeks Kualitas Air (IKA x 37,6%)

Nilai indikator Indeks Tutupan Hutan yang ditindaklanjuti mencapai 58,08; Indikator Indeks Kualitas Udara yang ditindaklanjuti mencapai 82,33; dan Indikator Indeks Kualitas Air yang ditindaklanjuti mencapai 50,00. sehingga capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= (0,376 \times 50,00) + (0,405 \times 82,33) + (0,219 \times 58,08) \\ &= 18,8 + 33,344 + 12,719 \\ &= 64,86 \end{aligned}$$



Dengan pendekatan yang dilakukan, berdasarkan data di atas, nilai indikator Indeks Tutupan Hutan yang ditindaklanjuti mencapai 58,08; Indikator Indeks Kualitas Udara yang ditindaklanjuti mencapai 82,33; dan Indikator Indeks Kualitas Air yang ditindaklanjuti mencapai 50,00. maka capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah sebagai berikut: $(0,376 \times 50,00) + (0,405 \times 82,33) + (0,219 \times 58,08) = 18,8 + 33,344 + 12,719 = 64,86$ maka nilai IKL kota Batam tahun 2024 adalah 64,86.

Realisasi kinerja nyata pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan terhadap target sebesar 70,50 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, capaian ini tidak mencapai target dengan

persentase capaian kinerjanya adalah 92%. Sebagai tahun keempat, bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebesar 96,20% mengalami sedikit penurunan. Namun terhadap target capaian IKLH di akhir masa RPJMD Kota Batam yaitu di tahun 2026 sudah mencapai 94,18% dari target 71,50%.

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota menggunakan rumus $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$, dimana IKL adalah komposit Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). Berdasarkan perhitungan akan diperoleh kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Tabel
Nilai IKLH dan Kategori

No.	Nilai IKLH	Kategori
1.	$90 \leq x \leq 100$	Sangat Baik
2.	$70 \leq x < 90$	Baik
3.	$50 \leq x < 70$	Sedang
4.	$25 \leq x < 50$	Kurang
5.	$0 \leq x < 25$	Sangat Kurang

Sumber:
Permen.
dan

LH

Kehutanan RI No. 27 Tahun 2021

Tujuan digunakannya indikator ini adalah sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada publik terkait pencapaian perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup dan sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Indikator ini berupa indeks yang menggambarkan kondisi dari hasil pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Pengukuran Indeks Kualitas Air mengacu pada Keputusan Menteri LH No. 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air (dengan tujuh parameter kunci: TSS, BOD-5, COD, DO, Sulfat, Feal Coli dan Total Coliform). Pada tahun 2023 ini, IKA Kota Batam 52,00.

Untuk Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Batam tahun 2024 dihitung dengan metode passive sampler yang terdiri atas 3 (tiga) sumber data pemantauan yaitu :

1. Data pemantauan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesi, sebanyak 5 (lima) kali pemantauan dalam satu tahun
2. Data Pemantauan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, sebanyak 1 (satu) kali pemantauan dalam satu tahun
3. Data Pemantauan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, sebanyak 2 (dua) kali pemantauan dalam satu tahun.

Langkah - langkah menghitung Indeks Kualitas Udara (IKU):

1. Menghitung rerata parameter NO₂ dan SO₂ dari tiap periode pamantauan untuk masing-masing lokasi (titik) sehingga didapat data rerata untuk area transportasi (A), Industri (B), pemukiman/ perumahan (C1) dan komersial/perkantoran/perdagangan (C2);
2. Menghitung rerata parameter NO₂ dan SO₂ yang merupakan perhitungan rerata dari ke empat titik pemantauan;
3. Menghitung Indeks leu dari rerata NO₂ dan SO₂, yakni rerata NO₂

dan SO₂ Kota Batam dibandingkan terhadap baku mutu masing-masing parameter, kemudian dijumlahkan dan dirata-ratakan.

4. Indeks Udara Model EU (IEU) dikonversikan menjadi indeks IKLH.

Dari pendataan tersebut tercatat IKU Kota Batam mencapai 84,12.

Sedangkan Nilai indikator Indeks Tutupan Hutan yang ditindaklanjuti dengan metode pendekatan penghitungan ITH sebagai berikut:

1. Kecukupan luas (kawasan hutan dan) penutupan hutan minimal 30% pada daerah aliran sungai dan/atau pulau.
2. Kemampuan dan kesesuaian lahan pada karakteristik lahan tertentu yang membutuhkan tutupan lahan berupa pepohonan, seperti pada sempadan sungai, pantai dan sekitar danau/waduk, lahan kemiringan lereng lebih dari 25%. Karakteristik lahan tersebut juga dapat mewakili wilayah hulu dan hilir, dimana sempadan sungai, sekitar danau/waduk dan lahan kemiringan lereng lebih dari 25%, pada umumnya terdistribusi di bagian tengah hingga ke hulu. Sedangkan sempadan pantai di bagian hilir.
3. Berkaitan dengan arahan penggunaan lahan di wilayah perkotaan, minimal 30% peruntukan lahannya berupa ruang terbuka hijau. Peruntukan sebagai ruang terbuka hijau tersebut dapat berupa hutan kota (minimal 10% dari luas perkotaan), kebun raya, taman keanekaragaman hayati atau taman kota yang didominasi pepohonan.
4. Penggunaan data citra satelit Landsat dalam analisis tutupan lahan, terdapat keterbatasan khususnya pada wilayah perkotaan sehingga diperlukan pendetailan data untuk pelaksanaan pemantauan kondisi ruang terbuka hijau.

Namun dengan pencapaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, terdapat beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penghambat, antara lain:

1. Tidak ada foto udara terupdate yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam
2. Meningkatnya laju pertumbuhan pembukaan lahan dalam

pembangunan

3. Belum maksimalnya koordinasi dengan instansi terkait (eksternal) mengenai pengelolaan lingkungan.
4. Kurangnya data base dan lemahnya pengelolaan data base tentang pengelolaan lingkungan, sehingga menyulitkan dalam pengambilan kebijakan.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai faktor pendukung capaian kinerja karena adanya sinergi dengan stakeholder dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau.

Solusi dan rekomendasi dalam menanggulangi faktor penghambat pencapaian capaian kinerja, diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi baik internal maupun eksternal mengenai pengelolaan lingkungan.
2. Meningkatkan kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan hidup.
3. Meningkatkan peranan masyarakat umum dan pelaku usaha terhadap hukum/ peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup melalui sosialisasi dan penyuluhan.
4. Menciptakan metode pembangunan yang ramah lingkungan.
5. Meningkatkan ketaatan masyarakat umum dan pelaku usaha terhadap hukum/ peraturan perundangan di bidang lingkungan melalui upaya penegakan hukum dan penerapan sanksi.
6. Meningkatkan database terkait Lingkungan Hidup
7. Perlu dibuat regulasi yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan RTH dan peningkatan luasannya untuk mencapai proporsi ideal.

Sesuai indeks kualitas tutupan lahan, bahwa kualitas lingkungan hidup juga ditentukan dari kelayakan lingkungan yang menjadi tempat tinggal masyarakat. Salah satu kriteria ruang kota yang nyaman adalah memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas kota. Ruang Terbuka

Hijau (RTH) merupakan bagian dari ruang terbuka suatu kawasan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman atau area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Karakteristik fisik kota Batam dilihat dari letak geografis berada di lembah/cekungan dengan potensi pencemaran udara cukup tinggi sebagai akibat sirkulasi udara yang terpusat dan terakumulasi akibat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Perkembangan Kota Batam yang pesat dalam berbagai sektor telah menyebabkan adanya perubahan tata ruang kota dengan berkurangnya Ruang Terbuka Hijau Kota baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang sangat berpengaruh terhadap keseimbangan lingkungan hidup. Dalam menjaga keseimbangan ekosistem kota, perlu adanya keseimbangan antara ruang terbangun dengan ruang terbuka hijau secara proporsional.

RTH memiliki beragam fungsi meliputi fungsi ekologis, sosial budaya, estetika dan ekonomi. RTH ditujukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan dan mewujudkan keseimbangan antara lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman. Keberadaan RTH tidak hanya menjadikan kota sebagai tempat yang sehat dan layak huni tapi juga nyaman dan asri.

Dalam mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan, maka pembangunan infrastruktur dan sarana kota merupakan faktor yang penting dalam pembangunan skala prioritas Kota Batam, termasuk penataan dan pengelolaan RTH sebagai sarana publik. RTH selain mempunyai fungsi sebagai penyeimbang ekosistem kota yaitu fungsi ekologis, juga mempunyai fungsi sosial dan estetika kota sehingga dalam penataan maupun pengelolaannya harus dapat mencerminkan fungsi-fungsi tersebut, agar terbentuk kota yang representatif dan mempunyai

ciri khas yang dapat dibanggakan sehingga dapat meningkatkan "nilai jual" Kota Batam. Kota Batam dengan luas 103.374 Ha (sesuai RTRW Kota Batam 2021-2026) sampai tahun 2023 luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola adalah 3.088.782,23 m² (data RTH Dinas Perakimtan) yang terdiri dari 183 lokasi dengan sebaran RTH berikut:

Tabel

Lokasi RTH Kota Batam pada Tahun 2024

RTH	Luas (m ²)	Jumlah Lokasi
RTH Pemeliharaan Taman Kota	176.052,23	59
RTH Jalan (Jalur jalan sebelah dalam jalan Utama)	1.668.403	120
RTH Kebun Raya Batam	856.600	Dari 85,6 ha luas administrasi kebun raya, seluas 29 ha yang sudah dibuka dalam kondisi terpelihara
RTH Pemakaman	387.727	3
Total	3.088.782,23	183

Sumber: Disperakimtan Kota Batam

Keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja maupun peningkatan/penurunan kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor/penyebab. Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja Ruang Terbuka Hijau, yaitu:

1. Mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada, serta tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain.
2. Melaksanakan intensifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik maupun privat.

3. Pengembangan pola kemitraan mengenai pengelolaan RTH dengan berbagai stakeholder.
4. Melaksanakan peralihan PSU Perumahan dari Pengembang menjadi Aset Pemerintah Kota Batam

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian sasaran adalah, antara lain:

1. Keterbatasan lahan untuk RTH yang tersedia di Kota Batam.
2. Masih banyak Pengembang Perumahan yang belum melakukan serah terima PSU ke Pemerintah Kota Batam.
3. Peran serta swasta belum maksimal dalam peningkatan kualitas RTH publik.

Agar pencapaian sasaran dapat terwujud, diperlukan perbaikan kinerja sebagai solusi/ rekomendasi untuk tahun yang akan datang; yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan RTH.
2. Melibatkan peran serta aktif dari unsur kewilayahan dalam pengelolaan dan pengendalian RTH terutama yang berada di lingkungan sekitarnya.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan komunikasi tentang pentingnya peranan RTH yang memiliki fungsi ekologi, sosial dan estetika.
4. Melakukan inventarisasi lokasi pengadaan lahan dan pemanfaatan aset milik Pemerintah Kota Batam yang akan berdampak positif dalam penambahan luasan RTH.

3. Persentase pengelolaan sampah

Persentase pengelolaan sampah adalah cakupan pelayanan persampahan dengan gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dapat dibuang ke TPA dan dikurangi sejak dari sumber dengan metode Reuse, Reduce, Recycle (3R) pada suatu kurun waktu tertentu.

Cakupan layanan pengelolaan sampah merupakan penjumlahan dari capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Batam dengan capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Batam (ton/tahun).

Persentase pengelolaan sampah ini menunjukkan apakah seluruh sampah yang dihasilkan di Kota Batam telah ditangani dengan baik sehingga tidak ada lagi sampah yang ditimbun di pinggir jalan atau dibuang ke sungai. Semakin tinggi cakupan layanan pengelolaan sampah harus ditunjukkan dengan kondisi bersih tanpa ceceran sampah di seluruh wilayah Kota Batam. Persentase Pengelolaan Sampah di Kota Batam adalah perbandingan volume sampah yang ditangani dengan timbunan sampah. Target Persentase pengelolaan sampah pada akhir periode RPJMD adalah sebesar 71,25%. Hal ini telah disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota mengenai kebijakan dan strategi daerah dalam penanganan sampah.



Realisasi kinerja indikator Persentase Pengelolaan Sampah pada tahun 2024 adalah sebesar 76,87% dari target sebesar 64,50% yang direncanakan sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 119,18%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Jika dibandingkan dengan realisasi 2023 sebesar 76.87% dari target 61.75 % maka capaian sebesar 124.49 %, dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Batam 71,25% maka capaian kinerjanya sudah melebihi target karna sudah mencapai 107,89%.

Namun dengan pencapaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, terdapat beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penghambat, antara lain:

- a. Pengangkutan sampah yang masih dicampur
- b. Belum tersedianya sarana untuk pengelolaan sampah secara terpilah
- c. Belum maksimalnya koordinasi dengan instansi terkait (eksternal) mengenai pengelolaan lingkungan
- d. Kurangnya data base dan lemahnya pengelolaan data base tentang pengelolaan lingkungan
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah secara mandiri serta turut serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- f. Kurangnya edukasi dalam pengelompokan sampah terutama limbah rumah tangga

Adapun beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai faktor pendukung capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Pengelolaan sampah dilakukan mulai dari pihak kecamatan tidak hanya DLH.
- b. Adanya program Bank Sampah

Solusi dan rekomendasi dalam menanggulangi faktor penghambat pencapaian capaian kinerja, diantaranya sebagai berikut:

- a. Peningkatan program penyuluhan lingkungan hidup terhadap

masyarakat

- b. Mengurangi timbunan sampah dan sampah terpilah, terdaur ulang dan termanfaatkan
- c. Membudayakan pemilahan sampah di masyarakat.



Gambar
Workshop Pengelolaan Sampah



Gambar
Bank Sampah Kota Batam

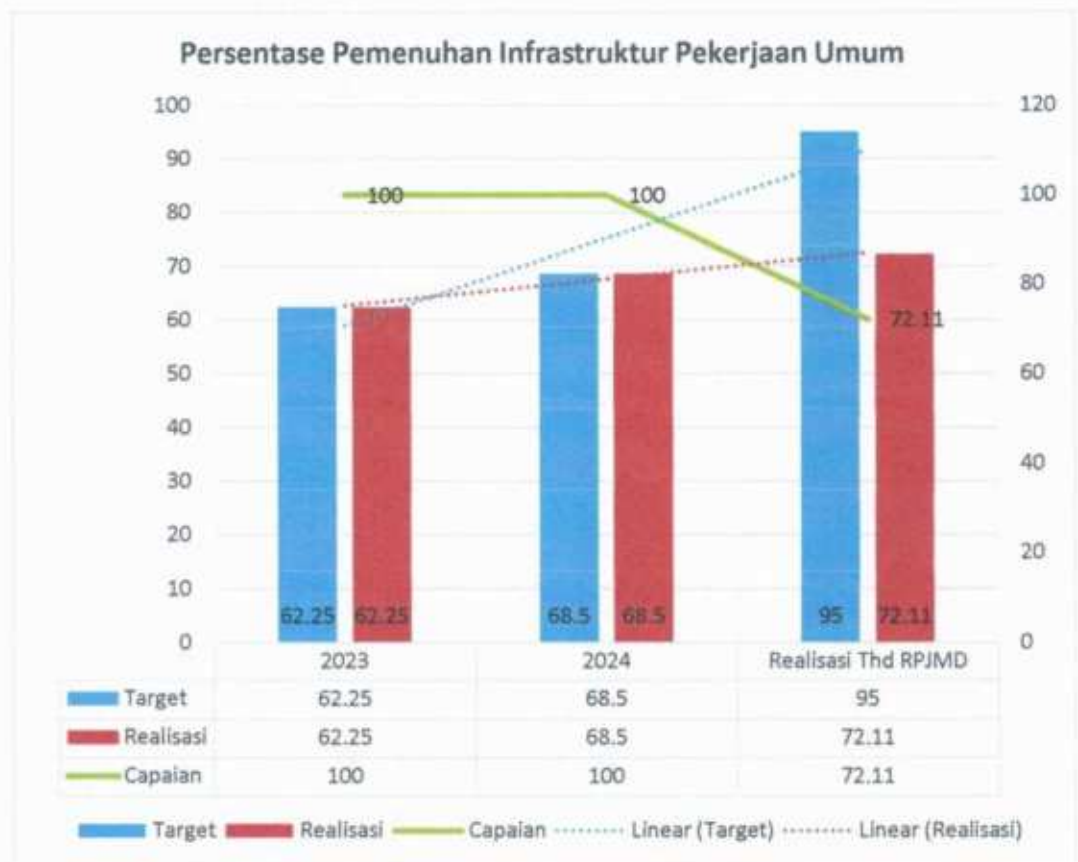


Sumber Data: DLH Kota Batam

4. Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Pada indikator Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum adalah cakupan pemenuhan jalan dalam kondisi mantab dan penanggulangan 42 titik banjir dalam wilayah perkotaan di Kota Batam. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2022 sebagai tahun pertama RPJMD Kota Batam 2021-2026, dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Realisasi kinerja indikator Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum pada tahun 2024 adalah sebesar 68,50% dari target sebesar 68,50% yang direncanakan sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Jika dibandingkan dengan realisasi 2023 sebesar 62.25% dari target 62.25 % maka capaian sebesar 100 %, dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Batam 95% maka capaian kinerjanya sudah melebihi target karna sudah mencapai 72.11%.



Tabel
Capaian Indikator Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum
Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	cakupan pemenuhan jalan dalam kondisi mantap	88.5	88.5	100	89	89	100
2	penanggulangan 42 titik banjir	36	36	100	48	48	100
Rata-rata Capaian		100			100		

Sumber: Bappeda Kota Batam

a. Cakupan pemenuhan jalan dalam kondisi mantap

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 / PRT / M / 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, yang dimaksud dengan Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Sampai dengan tahun 2024 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam telah melakukan 60% dari kebutuhan penanganan jalan Kota Batam pada periode RPJMD Kota Batam 2021-2026. Penanganan Jalan Kota Batam yang telah dilakukan pada tahun 2024 antara lain: pembangunan jalan sepanjang 3,456 km, pelebaran jalan menambah lajur sepanjang 6,168 km, rekonstruksi jalan sepanjang 3,697 km, dan pemeliharaan rutin jalan sepanjang 30 km. Penanganan jalan Kota Batam ini juga didukung oleh penanganan Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Batam sebanyak 16.157 tiang.

Capaian kinerja nyata indikator cakupan pemenuhan jalan dalam kondisi mantap adalah sebesar 88,98% dari target sebesar 89% sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%. Sebagai tahun kedua, capaian tahun ini bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 tidak

mengalami penurunan ataupun peningkatan.

Faktor pendukung pencapaian aspek kualitas/kondisi infrastruktur jalan antara lain adalah:

1. Adanya akselesari pembangunan yang dilakukan oleh Pemko Batam dengan BP Batam
2. Adanya dukungan pemerintah pusat dalam percepatan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dengan terbitnya Permen PUPR No. 6 tahun 2022
3. Sebagai prioritas pembangunan pemerintah Kota Batam yang tertuang didalam RPJMD Kota Batam.
4. Telah berjalannya pemeliharaan rutin jalan melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan ditetapkan terkait ketersediaan lahan dan kondisi lapangan.

Gambar

Kondisi ruas jalan di Kota Batam



Sumber: DBMSDA Kota Batam

Gambar
Pemeliharaan rutin jalan di Kota Batam



Sumber: DBMSDA Kota Batam

b. Penanggulangan 42 titik banjir

Persentase indikator Penanggulangan 42 titik banjir dengan target pada 2024 sebanyak 48 titik sehingga dengan realisasi 48 titik maka capaian kinerjanya adalah 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 mengalami peningkatan terhadap penanganan titik banjir terus meningkat. Menurut Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Yang disebut genangan adalah terendamnya suatu kawasan perkotaan lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam.

Kendala atau faktor penghambat yang dihadapi dalam penanganan permasalahan genangan adalah:

1. Kondisi curah hujan ekstrim yang menyebabkan kapasitas saluran tidak mampu menampung seluruh limpasan hujan.

2. Masih tingginya praktik membuang sampah ke sungai/saluran, sehingga saluran mampat dan aliran air terhambat.
3. Adanya pembangunan di wilayah yang tadinya area resapan air serta di atas badan saluran sehingga menghambat kelancaran normalisasi sungai/saluran.
4. Banyak titik banjir yang sering terjadi karena lokasinya berdekatan dengan laut. Sehingga ketika hujan tiba air laut juga pasang menyebabkan banjir.

Sedangkan faktor pendukung dalam penanganan permasalahan genangan adalah :

1. Berjalannya pemeliharaan sungai dan saluran melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membuat sumur resapan dalam rangka mengurangi limpasan air hujan, didukung oleh edukasi dari Dinas dengan pembuatan drum pori di lingkungan pemukiman dan perkantoran.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga daerah resapan air, didukung oleh edukasi dari Dinas dengan gerakan menanam pohon di kawasan hulu.



Gambar : Himbauan waspada Cuaca Ekstrem Kota Batam



Gambar
Gerak cepat pencegahan Banjir Kota Batam



Sumber: DBMSDA Kota Batam

Solusi atau upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk menurunkan lama genangan adalah sebagai berikut:

1. Normalisasi dengan membersihkan aliran drainase yang tersumbat dari sampah-sampah dan tanah maupun membersihkan jalan-jalan dari sisa endapan lumpur.
2. Pembangunan drainase induk yang dibangun secara bertahap.
3. Melakukan rehabilitasi tanggul sungai dan saluran
4. menambah ruang aliran air ke gorong-gorong
5. Upaya inovasi dengan pendekatan kolaborasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan melalui edukasi untuk giat menanam, membuat sumur resapan dan tidak membuang sampah ke sungai/saluran

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran "lama genangan yang tertangani pada titik genangan", maka direkomendasikan agar Pemerintah Kota Batam lebih meningkatkan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor karena masalah genangan ini tidak semata-mata diakibatkan oleh rendahnya kapasitas saluran (masalah infrastruktur), tetapi juga karena faktor-faktor lain seperti persampahan, perilaku masyarakat dan rendahnya resapan air hujan.

Gambar

Pembersihan Sampah Di Saluran



Sumber: DLH Kota Batam



5. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perkotaan

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perkotaan Kota Batam adalah perbandingan antara sarana dan prasarana perhubungan dan transportasi yang telah terpenuhi dengan total kebutuhan yang ada dalam wilayah perkotaan di Kota Batam. Capaian kinerja nyata indikator Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perkotaan ini adalah sebesar 52% dari target sebesar 63% yang direncanakan pada tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 82,54%, capaian ini belum mencapai target yang diperjanjikan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 50 % dengan target 58 capaian 86.21% dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Batam 74.05% maka capaian kinerjanya mencapai 70,27 %.

Dengan data capaian di atas, target diketahui jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang dapat dibangun hanya sebanyak 90 Unit. Hal ini disebabkan ada beberapa penyesuaian anggaran akibat masih banyaknya ruas-ruas jalan di Kota Batam yang masih dalam tahap peningkatan/pelebaran, namun kedepannya Dinas Perhubungan Kota Batam akan rutin berkoordinasi dengan instansi terkait agar kebutuhan terhadap sarana dan prasarana Perhubungan untuk menunjang keselamatan dapat tersedia sebagaimana yang sudah dianggarkan.

Faktor Pendukung yang menjadi penyebab keberhasilan dalam pencapaian target kinerja adalah:

1. Dukungan teknologi yang ramah lingkungan dalam pengembangan sarana dan prasarana perhubungan.
2. Dukungan pemerintah pusat dengan berbagai kebijakan terkait skema pendanaan dalam pengembangan infrastruktur tidak hanya mengandalkan Dana Pemerintah Daerah saja, bisa melibatkan pihak swasta.
3. Adanya inovasi dalam pengembangan transportasi.

Gambar
Pembangunan Transfer Point di Kota Batam



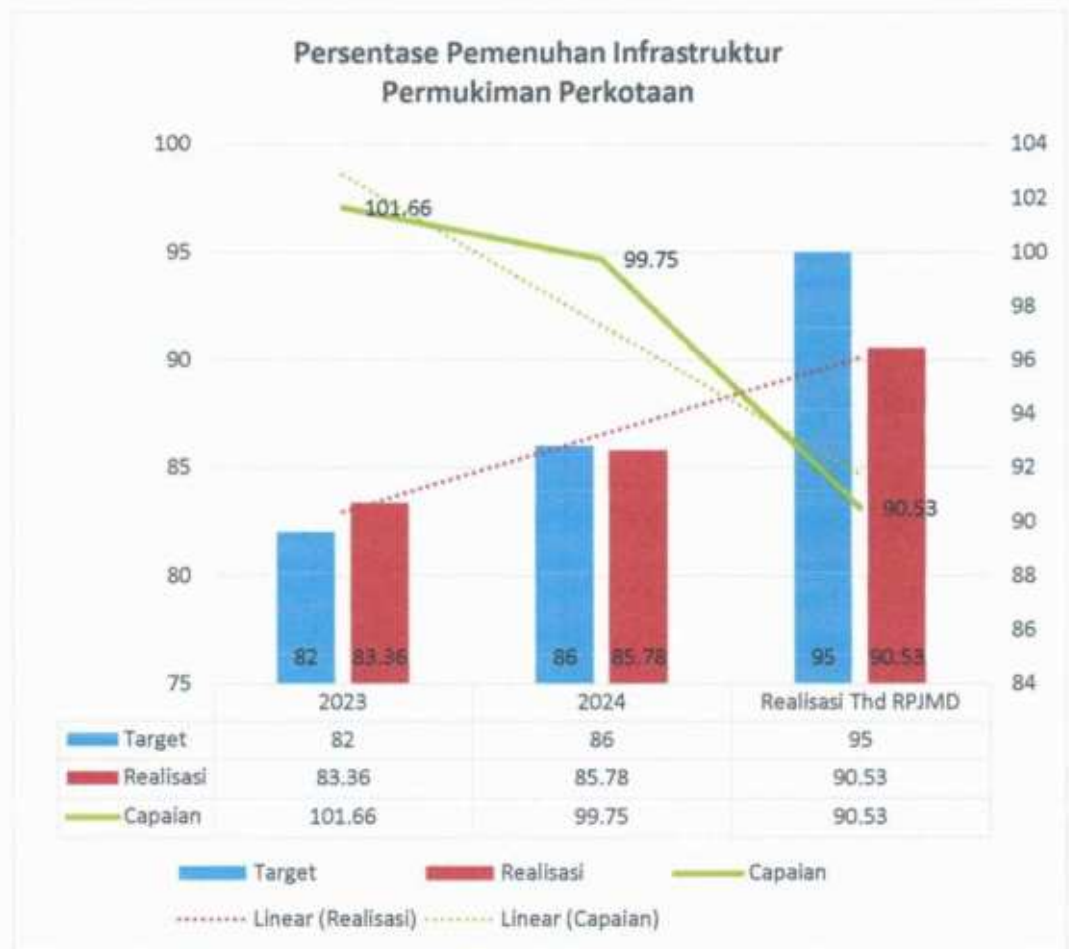
Sumber: Dishub Kota Batam

Gambar

Peluncuran Unit Bus Trans dengan Pola Buy To Service (BTS)



Gambar 2.11. Bus Trans Batam pola BTS (*Buy The Service*)



Sumber: Dishub Kota Batam

6. Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Realisasi kinerja indikator Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan pada tahun 2024 adalah sebesar 85.78% dari target sebesar 86% yang direncanakan sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99.75%, Jika dibandingkan dengan realisasi 2023 sebesar 83.36% dari target 82 % maka capaian sebesar 101.66 %, dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Batam 95% maka capaian kinerjanya sebesar 90.53%.

Dalam mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan, maka pembangunan infrastruktur dan sarana kota merupakan faktor yang penting dalam pembangunan skala prioritas Kota Batam. Masih rendahnya pendapatan dan daya beli masyarakat menyebabkan sejumlah penduduk Kota Batam tidak mampu memiliki rumah yang layak dan sehat. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya penduduk yang tinggal pada rumah dengan kondisi kurang layak atau kurang sehat bahkan tidak sedikit yang tinggal pada permukiman kumuh.

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan melaksanakan fasilitasi kebutuhan hunian bagi masyarakat kurang mampu serta mengupayakan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas untuk menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan nyaman. Pencapaian indikator Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini

Tabel
Pencapaian Indikator Persentase Pemenuhan Infrastruktur
Permukiman Perkotaan Tahun 2024

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Rumah Layak Huni Perkotaan	89,67	89,67	100%
2	Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di kawasan perkotaan	84,00	83,24	99.09%

3	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	72.46	72.35	99,85%
4	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Perkotaan	98,01%	97,88%%	99.87%

Sumber: Data Perakimtan Kota Batam

1. Persentase Rumah Layak Huni Perkotaan

Sesuai dengan Permen PUPR No. 14 tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang terdiri dari 7 aspek permukiman kumuh, yakni

- a. Kondisi Bangunan Gedung, meliputi:
 - Ketidakteraturan bangunan;
 - Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
 - Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
- b. Kondisi Jalan Lingkungan, meliputi:
 - Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman; dan/atau
 - Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- c. Kondisi Penyediaan Air Minum, meliputi:
 - Akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
 - Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.
- d. Kondisi Drainase Lingkungan, meliputi:
 - Drainase lingkungan tidak tersedia;
 - Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau
 - Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- e. Kondisi Pengelolaan Air Limbah, meliputi:
 - Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau

- Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- f. Kondisi Pengelolaan Persampahan, meliputi:
- Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
 - Kondisi Pengamanan (Proteksi) Kebakaran.
 - Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan
 - Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.
- g. Dan sebagai aspek tambahan, yaitu Ketersediaan Ruang Terbuka Publik.

Berdasarkan SK Kumuh Tahun 2019 adalah 738,85 Ha yang dijadikan basis data awal perencanaan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 139,28 Hektar, 2021 sebesar 140,36 Ha, 2022 sebesar 119,45 Ha dan tahun 2023 sebesar 86,16 Ha. Berdasarkan penetapan kinerja tahun 2023, target penanganan kumuh sebesar 59,53% dengan realisasi mencapai 65,68%. Apabila dilihat dari realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 terdapat selisih penanganan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 tingkat partisipasi/investasi dalam program penanganan kumuh hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBD Kota Batam dan APBD Provinsi Kepulauan Riau yang terdata dilaksanakan di wilayah kota Batam, sedangkan kontribusi APBN tahun 2023 tidak ada alokasi. Perumusan capaian yang dilaksanakan disesuaikan dengan realisasi berdasarkan aspek penanganan kumuh sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh Dinas Perakimtan Kota Batam 52 | Page Satker KOTAKU dan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam.

Adapun faktor yang menjadi penghambat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tidak terkendalinya pemanfaatan ruang yang mengakibatkan kesulitan penataan baik perumahan maupun lingkungan permukiman

sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan permukiman serta jaringan jalan lingkungan yang kurang aksesibel di wilayah perkotaan.

2. Relatif rendahnya kesadaran masyarakat dalam partisipasi mendukung program pemerintah dalam mengentaskan kawasan kumuh di wilayah perkotaan perkotaan.
3. Pesatnya arus urbanisasi sebagai tantangan bagi pemerintah untuk secara positif berupaya agar pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur lingkungan perumahan/permukiman lebih merata di wilayah perkotaan.
4. Tidak memadainya penyediaan dibandingkan dengan kebutuhan infrastruktur lingkungan perumahan/permukiman di wilayah perkotaan.

Rekomendasi untuk pencapaian kinerja berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh adalah sebagai berikut :

1. Mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru serta mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
2. Mencari terobosan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Batam terkait lahan- lahan yang statusnya belum menjadi aset Pemerintah Kota agar pekerjaan tetap dapat dilaksanakan.
3. Pemerintah Kota perlu meningkatkan alokasi anggaran setiap tahun dari sumber dana APBD dalam rangka terus menerus mengupayakan penuntasan kawasan kumuh dan layak huni di permukiman.
4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam rangka pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur yang sudah dibangun Pemerintah Kota.
5. Pemerintah Kota harus memiliki regulasi yang tegas dalam

pengaturan zonasi kawasan.

Selain persentase luasan kawasan kumuh, persentase kepala keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menempati hunian yang layak pun menjadi faktor pendukung dalam indikator Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Masih rendahnya pendapatan dan daya beli masyarakat menyebabkan sejumlah penduduk Kota Batam tidak mampu memiliki rumah yang layak dan sehat. Oleh karena itu Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan melaksanakan fasilitasi kebutuhan perumahan bagi masyarakat kurang mampu serta mengupayakan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas untuk menciptakan lingkungan perumahan yang sehat dan nyaman.

Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja perbaikan rumah tidak layak huni adalah sinergitas pembiayaan dalam penyediaan rumah layak huni dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Pusat. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja antara lain:

1. Adanya rumah tidak layak huni yang telah diperbaiki secara swadaya dan telah berpindah tangan, sehingga tidak dapat memenuhi kelengkapan administrasi kepemilikan.
2. Ketersediaan lahan untuk pembangunan rumah susun masih terkendala;
3. Meningkatnya jumlah penduduk di daerah perkotaan yang membutuhkan akses perumahan
4. Adanya aglomerasi yang terjadi di kawasan-kawasan industri sehingga adanya pembangunan rumah liar dan tidak layak yang

menimbulkan perluasan kawasan kumuh

5. Database Rumah Tidak Layak Huni datanya masih ada calon penerima yang belum memenuhi kriteria
6. Status Kepemilikan Lahan untuk pengembangan infrastruktur permukiman yang belum jelas

Solusi/rekomendasi untuk mencapai sasaran adalah sinergitas pembiayaan dalam penyediaan rumah layak huni dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Pusat. Implementasi kebijakan strategis untuk mengurangi luasan kumuh pada tahun 2022 sebagai berikut:

1. Perlu melakukan validasi data BDT terkait data penerima bantuan yang benar-benar memenuhi kriteria penyaluran bantuan RTLH berdasarkan kriteria baku;
2. Mencari alternatif pembiayaan selain APBD (APBN, PPP, CSR);
3. Penguatan sistem kontrol dalam pembangunan infrastruktur;
4. Meningkatkan koordinasi dengan BP Batam dan Kantor pertanahan untuk menyediakan lahan pembangunan Rumah Susun;
5. Mengembangkan pembangunan perumahan secara vertikal untuk ketersediaan lahan yang terbatas pada kawasan yang padat penduduk
6. Pembangunan rusunawa dan rusunami di kawasan-kawasan industri agar terpenuhi infrastruktur permukiman bagi tenaga kerja
7. Perbaikan database untuk Calon Penerima Rumah Tidak Layak Huni
8. Proses verifikasi dan monitoring lahan pada saat perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman perlu dilakukan

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Berkualitas Dan Serasi Dengan Tata Ruang Kota Batam Serta Berwawasan Lingkungan ini adalah :

1. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.532.125.504,-	1.721.653.604,-	67,99

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Batam

2. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	336.442.000,-	195.065.616,-	57,98
2.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	665.055.003,-	581.830.277,-	87,49
3.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	105.089.000,-	97.359.000,-	92,64

4.	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	51.089.000,-	50.674.500,-	99,19
5.	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	66.997.000,-	14.144.900,-	21,11
6.	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	56.545.000,-	46.420.000,-	82,09
7.	Pengelolaan Persampahan	81.140.566.660,-	74.762.650.147,-	92,12
Total		82.421.783.663,-	75.748.144.440,-	91,90

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Batam

3. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Pengelolaan Keanakeragaman Hayati (KEHATI)	21.619.372.000,-	18.807.134.735,-	86,99

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Batam

4. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan SDA Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	12.579.249.920,-	10.183.727.274,-	80,96
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	17.580.555.744,-	15.583.137.191,-	88,64
3.	Penyelenggaraan Jalan	87.176.154.754,-	84.511.150.781,-	96,94
4.	Pengembangan Jasa Kontruksi	226.885.840,-	137.571.352,-	60,63
Total		117.562.846.258,-	110.415.586.598,-	93,92

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Batam

5. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	46.368.151.350,-	43.785.449.155,-	94,43

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Batam

4. Mewujudkan Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Bertaqwa Menuju Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera

Realisasi kinerja nyata indikator Sasaran Mewujudkan Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Bertaqwa Menuju Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera Tahun 2024 diukur dengan 2 (dua) indikator "Indeks Pembangunan Manusia" dengan capaian sebesar 100,69 % dan "Persentase Penduduk Miskin" dengan capaian sebesar 96,49 %. Dengan hasil capaian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Batam telah mampu mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan.

Indikator Kinerja 1: Indeks Pembangunan Manusia

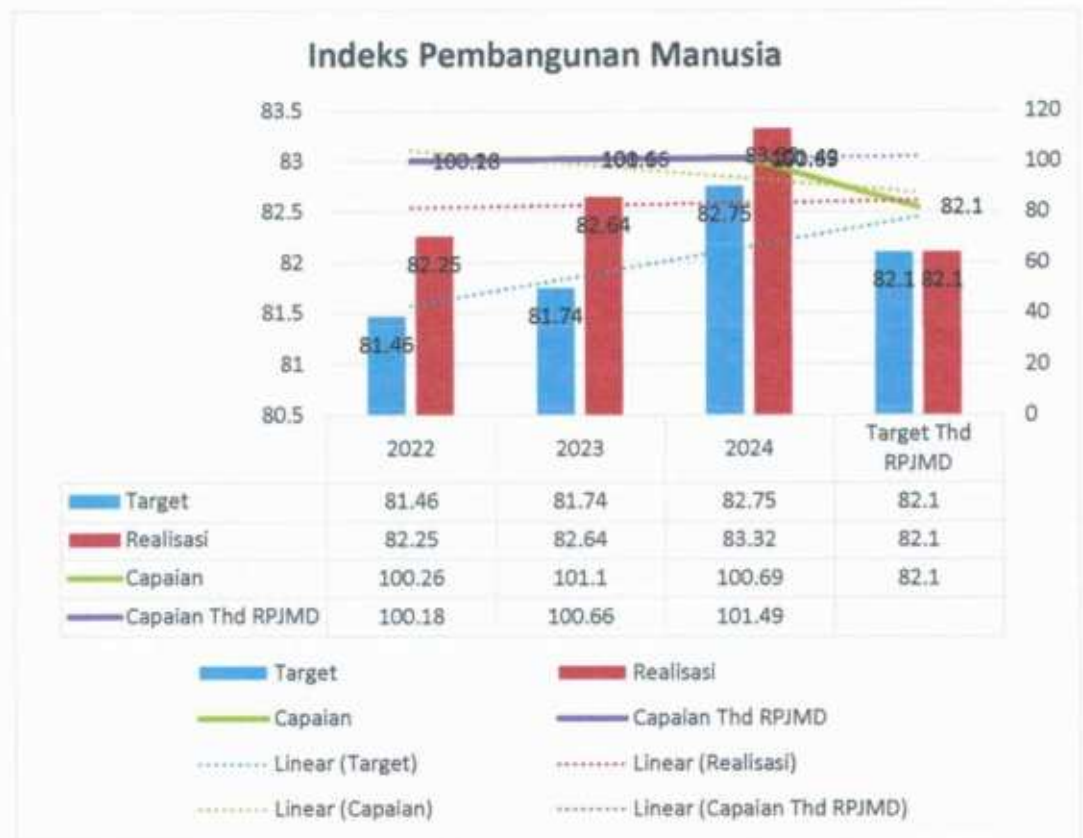
TAHUN	KINERJA			TARGET RPJMD (2026)	CAPAIAN REALISASI THD TARGET RPJMD (2026)
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
2022	81.46	82.25	100.97	82,10	100,18
2023	81,74	82,64	101,10		100,66
2024	82,75	83,32	100,69		101,49

Sumber: Bappeda Kota Batam

Realisasi kinerja nyata indikator "Indeks Pembangunan Manusia" adalah sebesar 83,32 dari target sebesar 82,75 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan persentase capaian kinerjanya adalah 100,69%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Jika dibandingkan dengan realisasi 2023 sebesar 82.64 dengan target 81.74 dengan capaian 101.10 dan apabila disandingkan dengan target RPJMD 2026 dengan target 82.10 maka capaian sebesar 101.49%

Rincian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten / Kota di Kepulauan Riau Tahun 2024:

1. Batam: 83,32
2. Tanjungpinang: 81,58
3. Natuna: 78,60
4. Provinsi Kepulauan Riau: 77,97
5. Bintan: 77,96
6. Karimun: 75,49
7. Kepulauan Anambas: 73,47
8. Lingga: 73,05





BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BATAM



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 2024

Berita Resmi Statistik No. 05/01/2171/Th. IV, 03 Januari 2025

Umur Harapan Hidup
Saat Lahir
75,19 tahun

IPM KOTA BATAM
2024

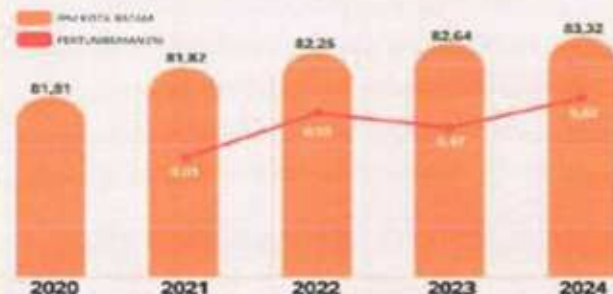
83,32

Rata-rata Lama Sekolah
13,56 tahun
Harapan Lama Sekolah
11,21 tahun

Pengeluaran Riil per Kapita
per Tahun yang Disesuaikan
Rp19.668.000

PERTUMBUHAN IPM 2024

0,82 %
dibandingkan
tahun 2023



batamkota.bps.go.id



@bps.batam



BPS Kota Batam

Pertumbuhan IPM 2024 Kota Batam tahun 2024 didukung oleh peningkatan ketiga dimensi penyusunnya yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), dimensi pengetahuan yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan dimensi standar hidup layak yang diukur melalui Rata-rata Pengeluaran Riil per Kapita tahun yang disesuaikan.

Dari sisi dimensi umur panjang dan hidup sehat, UHH saat lahir di Kota Batam sebesar 75,19, artinya bayi yang lahir pada tahun 2024 di Kota Batam memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,19 tahun, lebih lama 0,21 tahun atau mengalami kenaikan 0,28 persen dibandingkan dengan

bayi yang lahir pada tahun 2024. Sumber data UHH menggunakan hasil Long Form SP2020 (LF SP2020)

Pada dimensi pengetahuan, HLS penduduk umur 7 tahun Kota Batam pada 2024 meningkat 0,22 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,34 tahun menjadi 13,56 tahun. Sementara itu, RLS penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,02 tahun, dari 11,19 tahun menjadi 11,21 tahun pada tahun 2024.

Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) pada 2024 meningkat 678 ribu rupiah atau 3,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

1. Perkembangan IPM Kota Batam Tahun 2020–2024

Selama lima tahun terakhir, pembangunan manusia di Kota Batam terus mengalami kemajuan. Selama 2020–2024, IPM Kota Batam rata-rata meningkat sebesar 0,46 persen per tahun, dari 81,81 pada 2020 menjadi 83,32 pada 2024.

2. Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM Indonesia 2020–2024

IPM Kota Batam tahun 2024 tumbuh 0,82 persen dibandingkan tahun 2023 dan tumbuh 1,85 persen dibandingkan tahun 2020. Peningkatan IPM Kota Batam tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan indikator UHH; dimensi pengetahuan dengan indikator RLS dan HLS; serta dimensi standar hidup layak dengan indikator pengeluaran riil per kapita per tahun. Perkembangan dimensi penyusun IPM Kota Batam selama tahun 2020–2024.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batam Menurut Dimensi Penyusunnya, 2020–2024

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan	tahun	74,73	74,76	74,78	74,98	75,19

Hidup (UHH) saat Lahir						
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	13,16	13,17	13,32	13,34	13,56
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	11,14	11,15	11,17	11,19	11,21
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	ribu rupiah	18.095	18.034	18.506	18.990	19.668

Indeks Pembangunan Manusia diukur dengan 6 indikator sasaran sebagaimana tabel di bawah ini. Rincian capaian kinerja per indikator tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel
Capaian Indikator Pemenuhan Kinerja Sasaran
pada Indeks Pembangunan Manusia Kota Batam
Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024			Target RPJMD (2026)	Capaian Realisasi 2024 Thd Target RPJMD (2026)
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Indeks pendidikan	73,87	74,36	100,66	73,93	75,03	101,49	74,05%	101,32
2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	15	65,80	438,67	20	80,24	401,2	35	229,26
3	Indeks Kesehatan	82,26	82,49	100,28	82,33	83,65	101,60	82,47	101,43

4	Indeks Pengeluaran	91,11	90,98	99,86	91,87	92,82	101,03	93,38	99,40
5	Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan	8,64	13,17	152,43	9,64	8,80	91,29	11,64%	75,60
6	Persentase Penurunan Konflik dan Pelanggaran	14,3%	38,80	271,33	16,70	37,25	223,05	25%	149
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		193,87			169,94				

Sumber: Bappeda Kota Batam

Realisasi kinerja Indeks pendidikan Tahun 2024 adalah sebesar 75,03 dari target sebesar 73,93 dengan persentase capaian kinerjanya adalah 101,49%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Jika dibandingkan dengan realisasi 2023 sebesar 74,36 dengan target 73,87 dengan capaian 100,66 dan apabila disandingkan dengan target RPJMD 2026 dengan target 74,05 maka capaian sebesar 101.32%



1. Indeks Pendidikan

Indikator pembentuk indeks Pendidikan adalah Rata-rata lama Sekolah dan Angka Melek Huruf yang sebutannya telah diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Batam pada tahun 2024 sebesar 11,21 meningkat 0,02 poin dari capaian tahun 2023 sebesar 11,19. Capaian ini menggambarkan bahwa penduduk Kota Batam rata-rata pendidikannya pada tingkat SMA/K Kelas 2 semester 2. Berikut tabel dan grafik

perkembangan capaian Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Batam dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 :

Tabel
Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Batam
Tahun 2019 – 2024

Indikator/Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	11,13	11,14	11,15	11,17	11,19	11,21

Sumber: Data BPS Kota Batam



Sumber: Data BPS Kota Batam

Implementasi kebijakan strategis meningkatnya kualitas pendidikan

masyarakat pada tahun 2024 diharapkan memberikan dampak semakin meningkatnya kualitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), dan meningkatnya aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh pendidikan, serta angka melanjutkan pendidikan.

Faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana sekolah masih belum sesuai standar
2. Masih adanya anak putus sekolah yang disebabkan bukan karena faktor pembiayaan namun disebabkan faktor sosial di keluarga dan lingkungan masyarakat. Anak-anak yang putus sekolah sebagian berasal dari keluarga yang bermasalah dan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung untuk tumbuh kembang anak
3. Masih ada pendidik dengan kompetensi yang tidak sesuai standar.

Sedangkan faktor pendukung dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya Bantuan Pendidikan untuk warga yang kurang mampu agar bisa sekolah untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan Perguruan tinggi.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan kemampuan daya beli masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan (usia sekolah 7-12 tahun).
3. Dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sesuai kewenangannya dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas.

Adapun upaya dan solusi serta rekomendasi untuk mendorong pencapaian kinerja dengan meningkatkan mutu dan manajemen sekolah.

- **Harapan Lama Sekolah**

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator makro yang

perhitungannya menjadi tanggungjawab Badan Pusat Statistik (BPS). Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Untuk menunjukan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator angka kelulusan dan rata-rata nilai hasil ujian. Adapun angka harapan lama sekolah di Kota Batam dari tahun 2019 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Sumber: Data BPS Kota Batam



Sumber: Data BPS Kota Batam

Tabel
Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Batam
Tahun 2019 – 2024

Indikator/Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,15	13,16	13,17	13,32	13,34	13,56

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan anak-anak yang pada 2024 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 14,34 tahun hal ini dianggap anak-anak berusia 7 tahun dapat melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi hingga Diploma II. Angka HLS 13 tahun ini menunjukkan keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun terutama untuk jenjang sekolah dasar namun dengan semakin tingginya HLS ini juga maka pemerintah Kota Batam perlu meningkatkan upaya agar anak-anak yang saat ini sedang bersekolah SD/MI dan SMP/MTs dapat mengikuti proses pendidikan selanjutnya.

Gambar
Pembelajaran Pendidikan Sekolah Dasar





Sumber: Disdik Kota Batam

Gambar
Pembelajaran Pendidikan Sekolah Menengah Pertama





Sumber: Disdik Kota Batam

1. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat

Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat adalah tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu. Rata-rata aktivitas membaca masyarakat diukur oleh 5 indikator:

1. Frekuensi membaca per minggu
2. Durasi/intensitas membaca per hari
3. Jumlah bacaan per triwulan (3 bulan terakhir)
4. Frekuensi mengakses internet
5. Durasi/intensitas mengakses internet

Faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan teknologi gadget tidak terlalu dimanfaatkan untuk kemudahan akses terhadap buku-buku secara online, namun lebih kepada pemanfaatan media sosial dan permainan.
2. Dukungan sarana dan prasarana di setiap kecamatan belum memadai

Sedangkan faktor pendukung dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Budaya Gemar Membaca yang terus dilakukan sampai ke tingkat kelurahan untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat sehingga dapat menjadi garda terdepan dalam mengembangkan minat baca baik dilingkungan sekitarnya.
2. Mengalakkan program Bunda Bertutur sebagai salah satu upaya dari lingkungan terdekat bagi anak-anak usia dini untuk menumbuhkan gemar membaca.

Adapun upaya dan solusi untuk mendorong pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Menambah jumlah koleksi buku baik secara fisik maupun buku digital di Perpustakaan Umum Kota Batam
2. Kerjasama dengan pihak swasta melalui dukungan dana CSR terhadap pembangunan perpustakaan di setiap kecamatan
3. Melakukan inovasi dalam pengelolaan perpustakaan Kota Batam

Gambar

Sosialisasi Budaya Gemar Membaca Tahun 2024



Sumber: Dispusip Kota Batam

Gambar

pelaksanaan meningkatkan minat membaca pada anak sejak usia dini



2. Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan merupakan salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia. Salah satu ukuran yang digunakan sebagai bahan perhitungan Indeks Kesehatan yaitu Umur Harapan Hidup (UHH). UHH adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. UHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x. Ukuran yang umum digunakan adalah Umur Harapan Hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan UHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir.

Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Umur Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan

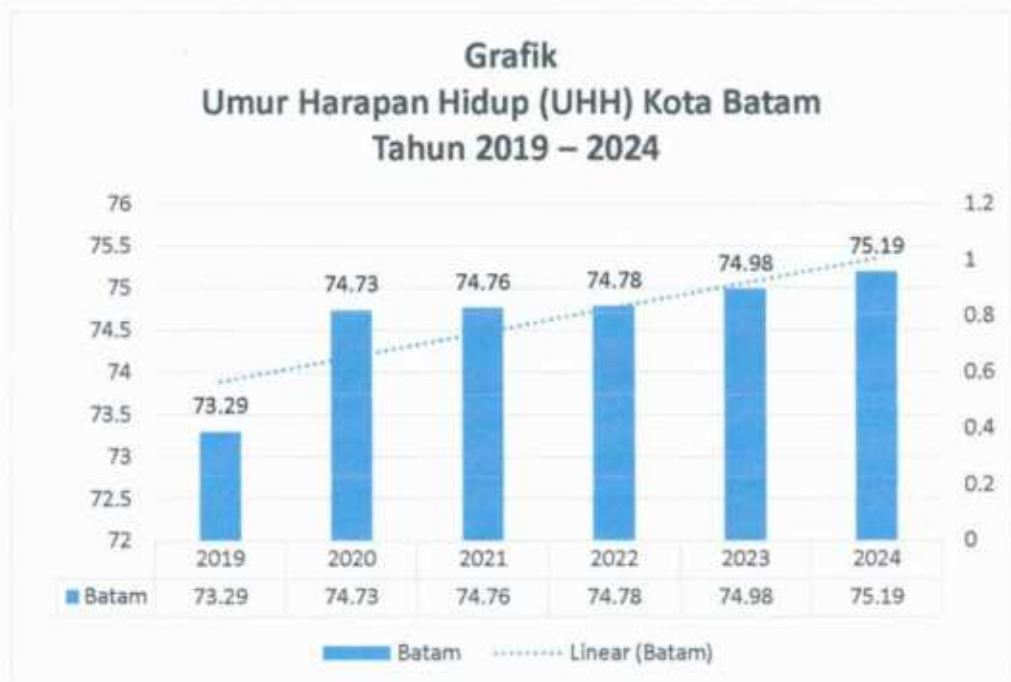
kemiskinan.

Capaian Kinerja nyata UHH Kota Batam pada tahun 2024 adalah sebesar 75,19 tahun. Terus meningkat dari tahun ke tahun, adapun perkembangan capaian UHH di Kota Batam dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel
Umur Harapan Hidup (UHH) di Kota Batam tahun 2019 - 2024

Indikator/Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Umur Harapan Hidup (UHH)	73,29	74,73	74,76	74,78	74,98	75.19

Sumber: Data BPS Kota Batam



Sumber: Data BPS Kota Batam

UHH 75.19 mempunyai interpretasi bahwa secara rata-rata bayi yang baru lahir pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bertahan hidup 0.22 tahun lebih lama. Angka ini lebih lama 0,1 tahun atau naik 0,28 persen dibandingkan 2023. Faktor pendorong tercapainya UHH dari bidang kesehatan dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Keterbukaan masyarakat terhadap penyuluhan tenaga kesehatan;
2. Dukungan jaminan kesehatan melalui BPJS kesehatan.

Keberhasilan program kesehatan terutama dalam pencapaian indeks kesehatan dan usia harapan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara unsur pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, agar di tahun-tahun mendatang angka harapan hidup meningkat, maka pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat perlu bersama-sama melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan
2. Meningkatkan daya beli masyarakat
3. Meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan,
4. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kalori,
5. Meningkatkan kemampuan masyarakat agar bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Namun, dalam pencapaian kinerja ada faktor yang menjadi penghambat, yakni sebagai berikut :

1. Prasarana kesehatan yang belum memadai untuk setiap pelayanan kesehatan di Puskesmas
2. Tenaga Kesehatan belum tersebar secara merata di setiap Puskesmas

Sedangkan faktor pendukung dalam pencapaian kinerja antara lain karena meningkatnya akses kesehatan melalui penambahan sarana kesehatan di setiap kecamatan

Adapun upaya dan solusi untuk mendorong pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Menambah tenaga kesehatan sesuai dengan spesifikasi yang

dibutuhkan oleh setiap puskesmas

2. Meningkatkan standar pelayanan kesehatan
3. Jaminan Kesehatan dari Pemerintah Daerah untuk keluarga tidak mampu

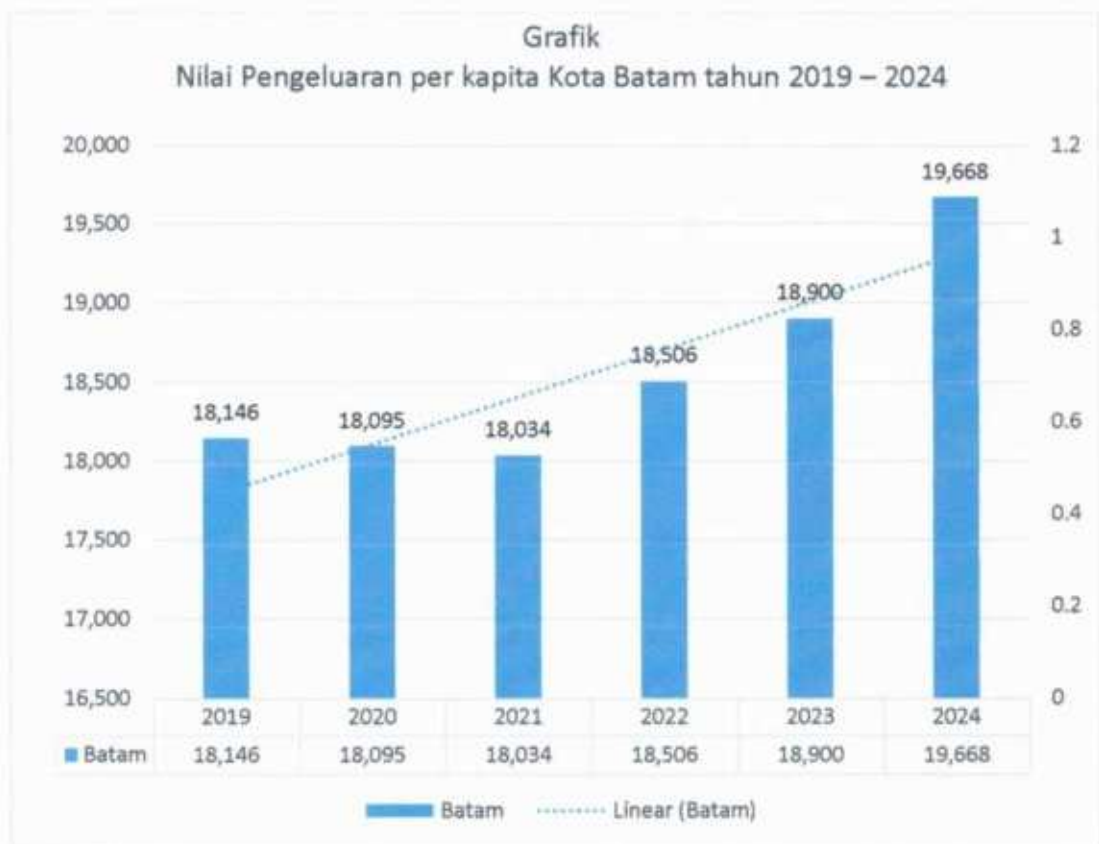
3. Indeks Pengeluaran

Indeks Pengeluaran adalah indeks yang membandingkan antara nilai pengeluaran per kapita Kota Batam dengan nilai pengeluaran per kapita minimum dan maksimum di Indonesia. Indeks pengeluaran merupakan salah satu komponen pendukung capaian IPM Kota Batam sebagai wujud dari Standar Hidup Layak, beberapa faktor yang mendorong meningkatnya pengeluaran per kapita diantaranya adalah bertambahnya pendapatan masyarakat, meningkatnya kebutuhan dan tingkat inflasi. Bertambahnya pendapatan akan mendorong kemampuan daya beli yang akan menstimulasi peningkatan konsumsi masyarakat. Konsumsi pokok yang paling dibutuhkan masyarakat adalah bahan pangan. Harga bahan pangan dipengaruhi ketersediaan barang atau keseimbangan tingkat permintaan dan penawaran. Bila terjadi kesenjangan antara tingkat permintaan dan penawaran maka akan mengakibatkan inflasi harga barang. Semakin tinggi kesenjangan maka akan semakin tinggi tingkat inflasi yang terjadi. Hal ini akan berdampak pada kenaikan harga barang dan akan berakibat pada bertambahnya pengeluaran masyarakat untuk memberi barang-barang yang dibutuhkannya. Nilai Pengeluaran per kapita Kota Batam pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 19.668/orang/tahun. Terus meningkat dari tahun ke tahun, perkembangan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel
Nilai Pengeluaran per kapita Kota Batam tahun 2019 – 2024

Standar Hidup Layak							
Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran per kapita	Ribu rupiah/Orang/Tahun	18,146	18,095	18,034	18,506	18,900	19.668

Sumber: Data BPS Kota Batam



Sumber: Data BPS Kota Batam

Adapun salah satu faktor penghambat dalam pencapaian kinerja karena tingginya populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Wilayah Kota Batam, disebabkan tumbuh dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial.

Adapun beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai faktor pendukung

capaian kinerja sebagai berikut:

1. Menyediakan lapangan pekerjaan sehingga banyak masyarakat yang berkerja sehingga meningkat daya belinya.
2. Memperbanyak produksi industri kecil dan mikro dalam upaya meningkat kesejahteraan pegawai.

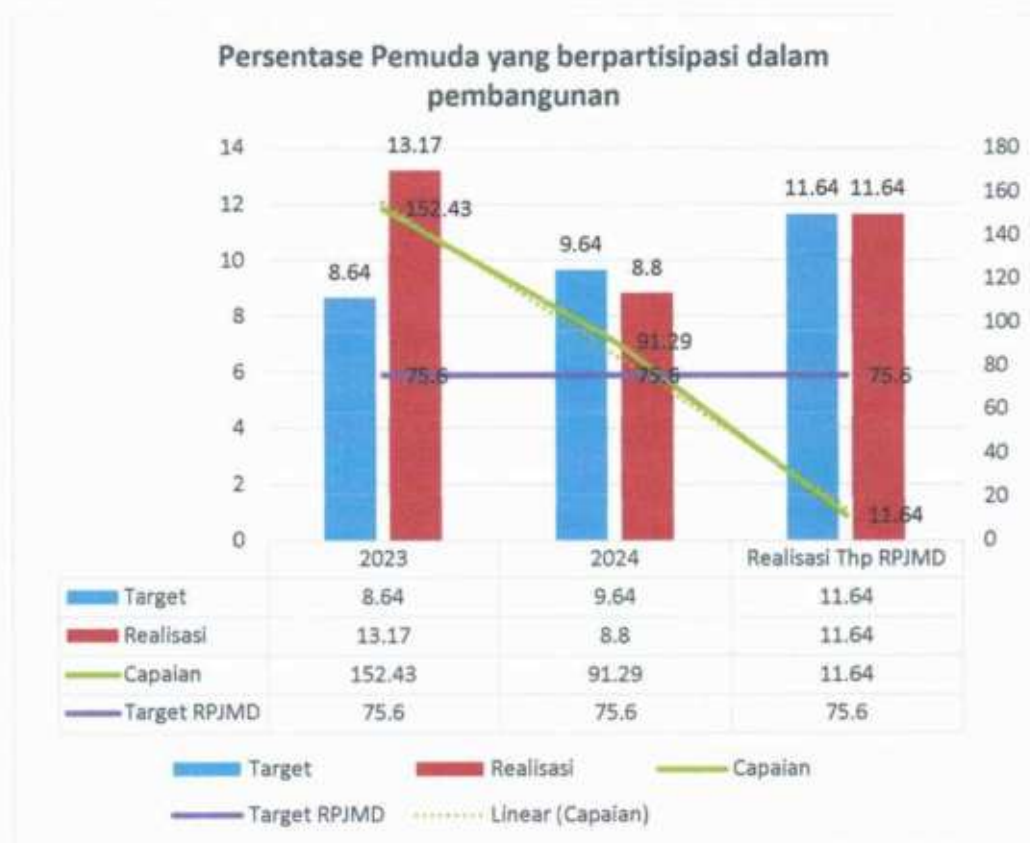
Solusi dalam menanggulangi faktor penghambat pencapaian capaian kinerja, diantaranya sebagai berikut:

1. Bersinergi dengan berbagai pihak dalam menjamin keberlangsungan penyediaan barang ataupun jasa untuk meningkat daya beli masyarakat.
2. Menciptakan ide-ide baru untuk menumbuhkan wirausaha baru.

4. Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan

Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan adalah tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu.

Realisasi indikator Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan tahun 2024 sebesar 8,80 % dengan target 9,64 dengan Capaian kinerja sebesar 91,29%. Jika dibandingkan realisasi 2023 sebesar 13,17% dari target 8,64 dengan capaian sebesar 152,43%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Batam 11,64% maka capaian kinerjanya mencapai 75,60%.



Pencapaian dilakukan dengan program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan melalui kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota, serta pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga. Dalam pembinaan prestasi olahraga diketahui cabang olahraga pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel
Cabang Olahraga Berprestasi Kota Batam Tahun 2024

No.	Cabang Olahraga	Nomor/Kategori/Kelas
1	PELTI	Persatuan Lawn Tennis Indonesia- di Johor, Malaysia Persatuan Lawn Tennis Indonesia-FKIP UIR di Pekanbaru, Riau 23-27 Mei 2024 Persatuan Lawn Tennis Indonesia-ACS OPEN di Jakarta 31 Mei-2 Juni 2024

		PELTI, Kejuaraan Nasional Lapangan, UTC I Tournament Championship JATENG 14-16 juni 2024 POPDA IX KEPRI 2024
2	ISSI	Mangsang Bike Park Dowhil National Singapore Championship Ikatan Sport Sepeda Indonesia Batam- di Batam
3	PERTINA	Singapore BRWAL FOR IT ALL BOXING Persataun Tinju Indonesia Amatir, Kota batam, KEPRI, 18 Mei 2024 Singapore PRA POPNAS ZONA 1 (RIAU, SUMATRA BARAT, KEPULAUAN RIAU, JAMBI, BANGKA BELITUNG) TAHUN 2024, PADANG Persatuan Tinju Indonesia Amateur, Kota Batam, KEPRI, Sumbar Johor Tournament OPEN Boxing Persataun Tinju Indonesia Amatir, Kota batam, Januari 2024 Malaysia
4	PORLASI	Persatuan Layar Seluruh Indonesia, T-Sail Trengganu, Malaysia, 28 mei - 2 Juni 2024 PON XXI ACEH-SUMUT 2024
5	IPSI	ASEAN School Game, IPSI Batam, Vietnam 1 s-d 9 juni 2024 POPDA IX KEPRI 2024
6	POSSI	Kejurnas Finswimming dan Piala Gubernur SUMSEL 2024 PERSATUAN OLAHRAGA SELAM SELURUH INDONESIA Kejurnas Finswimming dan Piala Gubernur SUMSEL 2024 25-29 Juni 2024
7	PASI	POPDA IX KEPRI 2024
8	PERBASI	POPDA IX KEPRI 2024 PRA POPNAS ZONA I TAHUN 2024, PADANG SUMBAR
9	PRSI	POPDA IX KEPRI 2024
10	PBVS	POPDA IX KEPRI 2024 PRA POPNAS ZONA I TAHUN 2024, PADANG SUMBAR
11	PBSI	POPDA IX KEPRI 2024
12	ASKOT PSSI	POPDA IX KEPRI 2024
13	PSTI	POPDA IX KEPRI 2024 PON XXI ACEH-SUMUT 2024 PRA POPNAS ZONA I TAHUN 2024, PADANG SUMBAR
14	PTMSI	POPDA IX KEPRI 2024
15	TAEKWONDO	PON XXI ACEH-SUMUT 2024
16	SKI AIR	PON XXI ACEH-SUMUT 2024
17	IODI	PON XXI ACEH-SUMUT 2024
18	JUJITSU	PON XXI ACEH-SUMUT 2024
19	KICK BOXING	PON XXI ACEH-SUMUT 2024
20	FORKI	TANGERANG SELATAN, BANTEN

Sumber: Dispora Kota Batam

Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana prasarana pemuda dan olahraga yang bertaraf nasional dan internasional.
2. Rendahnya koordinasi dengan berbagai stakeholder dalam pembinaan pemuda, pramuka dan olahraga baik lintas sektor atau antar instansi baik pusat dan daerah.

Adapun upaya dan solusi untuk mendorong pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Badan Pengusahaan Kawasan dan Badan Pertanahan Daerah untuk memperoleh lahan bagi pembangunan sarana prasarana olahraga di Kota Batam.
2. Membuat database kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan olahraga melalui dorongan, dukungan, kesempatan, pelatihan dan pendampingan sehingga mempunyai kemampuan untuk berwirausaha, produktif, berprestasi dan bertanggung jawab.
4. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai stakeholder dalam pembinaan pemuda, pramuka dan olahraga baik lintas sektor atau antar instansi baik pusat dan daerah.

5. Persentase Penurunan Konflik dan Pelanggaran

Persentase Penurunan Konflik dan Pelanggaran adalah menurunnya tingkat angka kejadian konflik sosial dan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok.

Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan

dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Realisasi kinerja indikator Persentase Penurunan Konflik dan Pelanggaran tahun 2024 ini adalah sebesar 37.25 % dari target 16.70 % dengan capaian sebesar 223.05 jika dibandingkan 2023 maka realisasi sebesar 38,80% dari target sebesar 14,30% yang direncanakan pada tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 271,33%,. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Batam 25% maka capaian kinerjanya mencapai 149 %.



Salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja adalah tingkat heterogenitas suku dan ras di Kota Batam yang sangat tinggi akibat daya tarik Kota Batam dan letak yang sangat strategis sehingga banyak pendatang dari daerah lain yang membuat Kota Batam sebagai miniatur Indonesia

Sedangkan faktor pendukung dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Adanya forum kerukunan umat beragama sebagai wadah dalam menciptakan kondisi yang kondusif di masyarakat
2. Koordinasi dan sinergitas yang baik antara Forkopimda Kota Batam

Adapun upaya dan solusi untuk mendorong pencapaian kinerja dapat dengan meningkatkan peran dan koordinasi Forkopimda dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.

Indikator Kinerja 2: Persentase Penduduk Miskin

TAHUN	KINERJA			TARGET RPJMD (2026)	CAPAIAN REALISASI THD TARGET RPJMD (2026)
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
2022	4.74	5.19	90.51	4,65	89,60
2023	4,69	5,02	93,43		92,63
2024	4,68	4.85	96.49		95.88

Sumber: Bappeda Kota Batam



Untuk indikator persentase penduduk miskin ini pada tahun 2024 realisasi sebesar 4,85% dari target 4,68 dengan capaian adalah 96,49%, hal ini menunjukkan perlu penanganan lebih serius dan intens oleh Pemerintah Kota Batam dan bila dibandingkan dengan target 2023 sebesar 4,69 dengan realisasi 5,02 dengan capaian 93,43 %. Apabila disandingkan terhadap target akhir RPJMD sebesar 4,65%, capaian Pemerintah Kota Batam baru mencapai 95,88%. Walaupun terendah, nyatanya ada peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2023 sebesar 5,02 kemudian menurun menjadi 4,85. Persentase penduduk miskin Kota Batam pada Maret 2024 sebesar 4,85 persen, turun 0,17 persen poin dibandingkan kondisi Maret 2023.

Penduduk Miskin

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar

(basic needs approach) Untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

kondisi inflasi Maret m-to-m Kota Batam periode Maret 2024, kelompok pengeluaran Makanan, Minuman dan Tembakau mengalami inflasi sebesar 1.07 dengan andil terhadap inflasi sebesar 0.30, dan nilai inflasi y-o-y pada kelompok pengeluaran yang sama mencapai 6.88 (Sumber: BRS Inflasi Kota Batam Maret 2024). Kelompok pengeluaran Makanan, Minuman dan Tembakau merupakan pengeluaran vital bagi seluruh masyarakat Kota Batam, sehingga meskipun perubahan harga terhadap komponen ini bertanda positif dengan kondisi perekonomian yang semakin stabil berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Kota Batam.

Meskipun persentase penduduk miskin menunjukkan tren yang menurun sejak periode Maret 2022-Maret 2024, akan tetapi potret kemiskinan dari sisi jumlah penduduk miskin mengalami tren yang meningkat pada periode tersebut. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan jumlah penduduk miskin lebih lambat dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk secara umum. Jumlah dan presentase Penduduk Miskin Kota Batam Maret 2018 S.D

Maret 2024



Jumlah dan persentase penduduk Miskin Kota Batam, Maret 2018 s/d Maret 2024.

Pada bulan Maret 2024, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kota Batam mencapai 83,57 ribu orang. Bertambah sekitar 480 orang dibandingkan kondisi Maret 2023 (83,09 ribu orang).

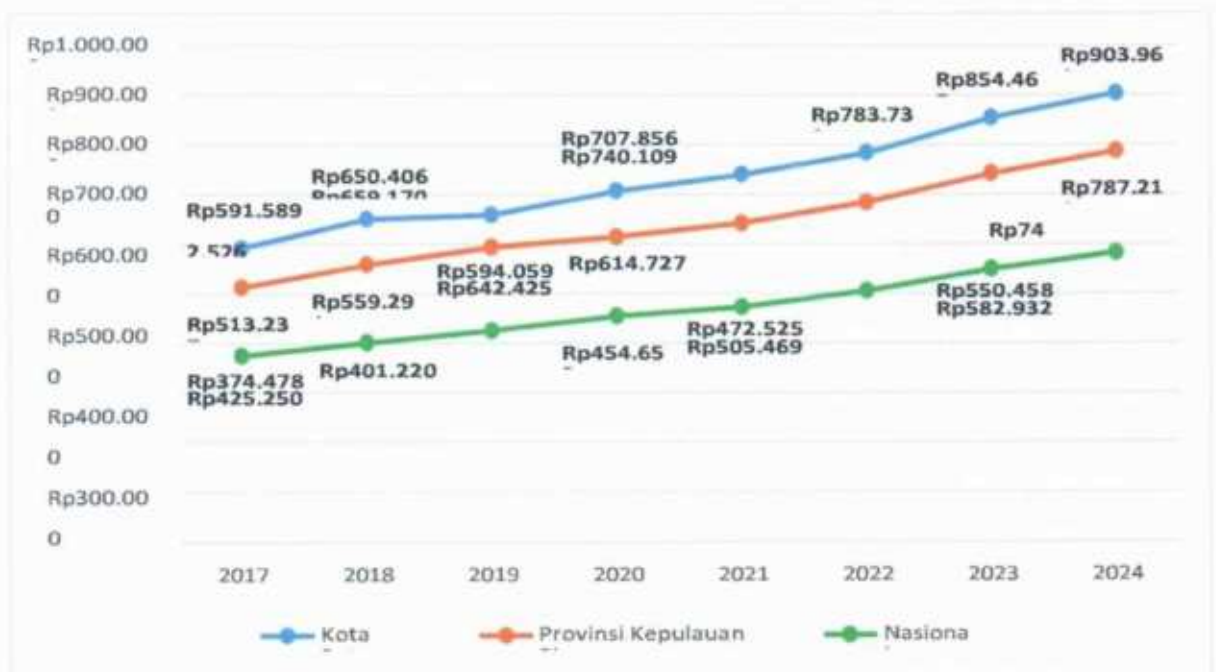
Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Karimun	13,99	5,78	0,99	0,21	492.654
Bintan	9,17	5,44	0,61	0,13	496.764
Natuna	4,17	5,04	0,31	0,03	501.927
Lingga	9,02	9,99	1,25	0,37	562.906
Kepulauan Anambas	2,98	6,67	0,94	0,18	504.332
Kota Batam	83,57	4,85	0,65	0,12	903.960
Kota Tanjungpinang	15,39	6,86	0,86	0,14	798.218
Provinsi Kepulauan Riau	138,30	5,37	0,70	0,15	787.211

Jumlah Penduduk Miskin, Presentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan, dan Garis Kemiskinan 7 Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau, Maret 2024

Garis Kemiskinan (GK)

Perkembangan garis kemiskinan Maret 2017-Maret s.d Maret 2024 menunjukkan tren yang selalu meningkat. Garis kemiskinan (GK) adalah gambaran besarnya nilai rupiah per bulan yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup minimumnya baik makanan maupun bukan makanan. Seseorang dikategorikan tidak miskin jika pengeluaran kebutuhan hidup minimum berada di atas Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan Maret 2017 hanya Rp 591.589,-/kapita/bulan, sedangkan pada Maret 2024 garis kemiskinan mencapai Rp 903.960,-/kapita/bulan (meningkat hingga 52 persen dibandingkan kondisi Maret 2017). Berdasarkan Gambar 2, terlihat bahwa garis kemiskinan Kota Batam selalu lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau dan garis kemiskinan Indonesia.

- a. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
- b. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi- padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)
- c. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.



Garis kemiskinan Kota Batam, Prov.Kepulauan Riau dan Indonesia Maret 2017 – Maret 2024

Berdasarkan Permensos Nomor 146 Tahun 2013 tentang penetapan kriteria dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu bahwa terdapat beberapa kriteria seseorang dinyatakan sebagai penduduk miskin atau tidak mampu, yaitu:

1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
3. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam setahun untuk setiap anggota rumah tangga;
5. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
6. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan

kondisi tidak baik/kualitas rendah termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;

7. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
8. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah;
9. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran
10. Luas lantai rumah kecil (kurang dari 8 m²/orang); dan
11. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

Apabila mengacu pada kriteria fakir miskin di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penanganan fakir miskin bersifat multisektor yang perlu melibatkan berbagai dinas dan lembaga terkait pada bidang ekonomi, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

Sebagai tahun kedua RPJMD, capaian kinerja Persentase Penduduk Miskin diukur dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Persentase Penurunan PPKS. Adapun rincian capaian kinerja per indikator tahun 2024, sebagaimana tabel di bawah ini:

PROFIL KEMISKINAN KOTA BATAM MARET 2024

Berita Resmi Statistik No. 35/08/2171/Th. V, 2 Agustus 2024

Penduduk Miskin

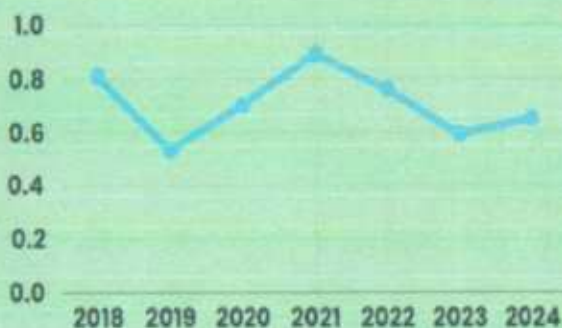
**83.57
RIBU Jiwa**

Bertambah 0.58% dari
tahun sebelumnya



Tingkat Kemiskinan periode Maret 2024 yaitu **4.85%** yang artinya 9 hingga 10 dari 200 orang hidup di bawah garis kemiskinan

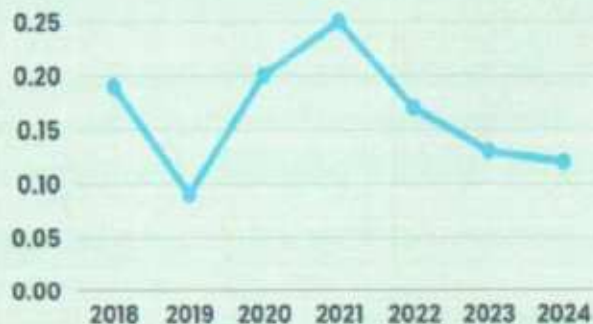
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Batam, 2018-2024



Rata-rata ketimpangan pengeluaran penduduk miskin sedikit lebih menjauh dari garis kemiskinan dibandingkan periode 1 tahun sebelumnya.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Batam, 2018-2024

Ketimpangan pengeluaran antara satu penduduk miskin dengan penduduk miskin lain semakin menunjukkan perbaikan dalam 3 tahun terakhir, meskipun belum lebih baik dibandingkan kondisi 2019



Sumber: BPS, Analisis Data Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) Maret 2024 di Kota Batam



BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BATAM
batamkota.bps.go.id

Teknis dan Sumber Data

- a. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Headcount Index*, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk
- b. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
- c. Garis Kemiskinan yaitu nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang selama satu bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimumnya baik makanan maupun non makanan.
- d. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
- e. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.
- f. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan Maret 2024 adalah data Susenas bulan Maret 2024. Sebagai informasi tambahan, juga digunakan hasil survei SPKKD (Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan.
- g. Penduduk Miskin yaitu penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran

perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan.

Tabel

Capaian Kinerja Sasaran pada Indikator Persentase Penduduk Miskin
Kota Batam Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024			Target RPJMD (2026)	Capaian Realisasi 2024 Thd Target RPJMD (2026)
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	87,60	96,86	110,57	87,9	91,0	103,52	88,50	102,82
2	Persentase Penurunan PPKS	1,50	1,82	121,33	1,45	1,77	122,07	1,35	131,11
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		115,95%			12,795%			-	-

Sumber: Bappeda Kota Batam

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Batam Tahun 2024 ini merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Realisasi kinerja nyata indikator ini adalah sebesar 91,00% dari target sebesar 87,9% sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 103,52%, Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 96,86% dengan target 87,60% dengan capaian 110,57%. apabila capaian kinerja indikator bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Batam sebesar 88,50% maka capaian kinerjanya mencapai 102,82 %.



Berbagai program-program stimulus untuk masyarakat miskin terus dilakukan diantaranya sembako murah, bantuan sosial, pembangunan rumah tidak layak huni. Agar pencapaian sasaran dapat terwujud, diperlukan perbaikan kinerja sebagai solusi/ rekomendasi untuk tahun yang akan datang yaitu:

1. Lebih mengoptimalkan implementasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), melalui sosialisasi atau bimbingan yang lebih intensif.
2. Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi dan lembaga terkait Pangan secara mandiri dan berkelanjutan dalam membangun sikap baru terhadap pangan sehat
4. Perlu dipertahankan pola konsumsi pangan lokal dengan mengurangi kebutuhan sumber pangan dari impor (berbasis gandum/terigu/kentang)
5. Penguatan konsumsi buah dan sayuran lokal dalam berbagai bentuk cara penyajian
6. Pertahankan keberadaan lahan pertanian yang ada di Kota Batam, meskipun produksinya sedikit dibandingkan kebutuhan

7. Menjamin pasokan pangan dan pengembangan kelompok pengolah pangan lokal
8. Gerakan masyarakat menuju gizi seimbang aman berbasis pangan lokal
9. Pengembangan inovasi dalam produksi pertanian serta peternakan.

Pada peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja maupun peningkatan/penurunan kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor/penyebab. Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja, yaitu:

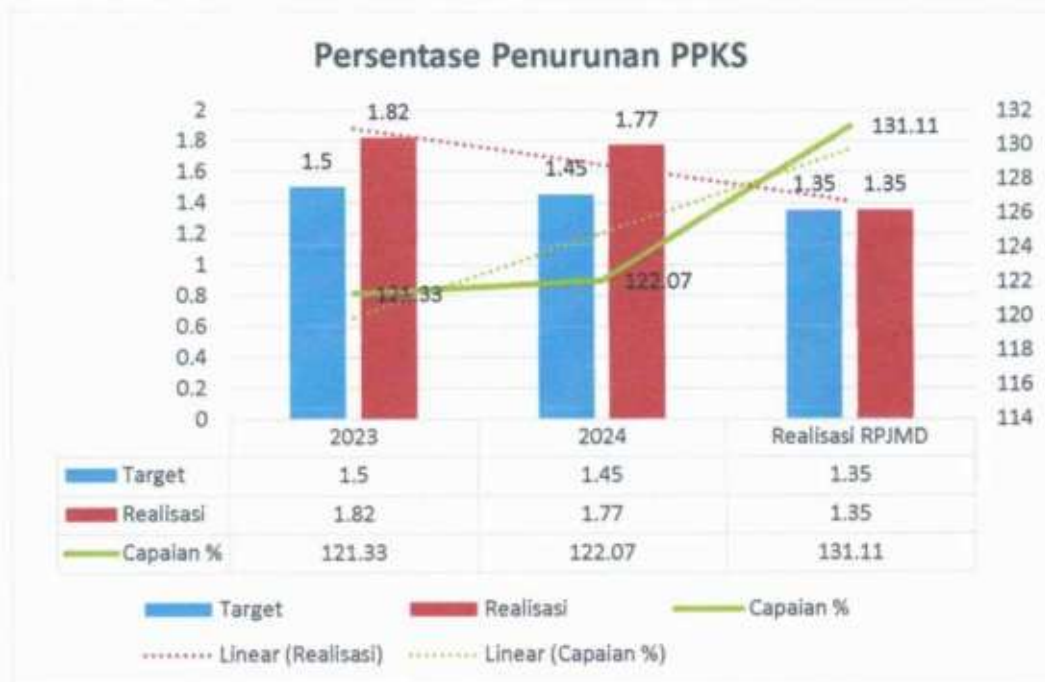
1. Meningkatnya produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)
2. Adanya pengendalian dan pengawasan bibit serta ternak dari pemerintah Kota Batam
3. Dukungan dari Asosiasi yang berhubungan dengan pertanian dan peternakan.

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Terkait Fasilitasi Sertifikasi Halal, kurangnya pedagang unggas dan daging yang sudah mempunyai sertifikat halal dari LPPOM-MUI untuk RPH (Rumah Potong Hewan) sementara sertifikat ini menjadi salah satu syarat bagi kehalalan suatu produk olahan unggas (ayam, bebek, itik) dan olahan daging (daging sapi, domba, kambing, kerbau).
2. Pendapatan yang belum mencukupi kebutuhan tiap individu.

1. Persentase Penurunan PPKS

Realisasi Persentase Penurunan PPKS Kota Batam Tahun 2024 sebesar 1,77 % dari target sebesar 1,45% sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 122,07%, Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 1,82% dengan target 1,50% dengan capaian 121,33%. apabila capaian kinerja indikator bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Batam sebesar 1,35% maka capaian kinerjanya mencapai 131,11 %.



Dalam upaya mengurangi beban penduduk miskin di Kota Batam yang diakibatkan oleh menurunnya daya beli masyarakat selama masa pandemik, maka pemerintah baik pusat maupun daerah melaksanakan program Bantuan Sosial non-reguler bagi warga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan penduduk yang terdampak yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Tingginya populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Wilayah Kota Batam, disebabkan tumbuh dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor (Ekonomi, Budaya, Politik, Etnis, Agama, Penyimpangan perilaku, Hukum, industrialisasi dan urbanisasi). Adapun luasnya wilayah Kota Batam yang merupakan daerah kepulauan terdiri dari 12 kecamatan dan 64 Kelurahan. Data Tahun 2023 (DTKS) 331.829 jiwa dari sebelumnya 364.308 jiwa, artinya ada penurunan dari jumlah data yang ada.
2. Masih perlu di optimalkan kembali peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam membantu penanganan

permasalahan kesejahteraan sosial, sehingga dapat dan mampu memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial di lingkungannya dengan baik.

3. Belum adanya keseimbangan antara populasi PMKS yang harus ditangani dan dengan ketersediaan dana, hal ini mengakibatkan upaya penanganan tidak dapat dilaksanakan secara serempak, sementara keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang bermobilitas tinggi, belum dapat bersinergi dengan daerah lain.
4. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia dalam pemahaman dan pengetahuan mengenai permasalahan Kesejahteraan Sosial yang dimiliki baik di kalangan Legislatif, aparatur pemerintahan maupun masyarakat khususnya kalangan yang berpotensi sebagai sumber kesejahteraan sosial mitra kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.
5. Tercapainya program-program APBD II dikarenakan ada beberapa kegiatan Dalam melaksanakan kegiatan atau penananagan jika ada kejadian terlebih dahulu contoh ; Kejadian bencana Alam/Sosial, Penanganan Orang Terlantar dan Penanganan Pemakaman bagi Tunawan (Mr/Mrs meninggal terlantar), sementara untuk Program Nasional melalui Program Keluarga harapan, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota batam cukup berjalan lancar, meskipun ada beberapa kendala di lapangan, dapat di koordinasikan Lintas Dinas / Lembaga sebagai pelaksana Program di Daerah.

Upaya dan solusi serta rekomendasi untuk mendorong pencapaian kinerja Dalam memecahkan kendala hambatan diatas Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam menentukan skala prioritas baik lokasi maupun jumlah besaran anggaran yang digunakan pada setiap kegiatan dan memberikan bantuan penunangan dalam rangka meningkatkan kemampuan, tenaga/Sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang terdapat pada Sumber Kesejahteraan Sosial guna meningkatkan pelayanan Kesejahteraan Sosial pada masyarakat,

disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran Mewujudkan Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Bertaqwa Menuju Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera ini adalah :

1. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Pengelolaan Pendidikan	403.326.895.986,-	382.578.347.133,00	94,86
2.	Pengembangan Kurikulum	21.036.000,-	20.068.000,-	95,40
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.040.000,-	4.989.600,-	99,00
4.	Pengendalian Perizinan Pendidikan	10.080.000,-	9.853.200,-	97,75
Total		403.363.051.986,-	382.613.257.933,-	94,86

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Batam

2. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Pemenuhan Upaya Kesehatan	108.037.362.334,-	105.840.566.235,-	97,97

	Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	809.120.000,-	732.722.538,-	90,56
3.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1.002.098.000,-	873.341.000,-	87,15
4.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	864.576.500,-	806.520.500,-	93,29
Total		110.713.156.834,-	108.253.150.273,-	97,78

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Batam

3. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Pembinaan Perpustakaan	198.010.500,-	183.757.350,-	92,80
2.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	39.944.000,-	39.202.000,-	98,14

Total	237.954.500,-	222.959.350,-	93,70
-------	---------------	---------------	-------

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Batam

4. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	8.929.940.000,-	8.704.460.000,-	97,47
2.	standarisasi dan perlindungan konsumen	547.891.880,-	488.909.464,-	89,23
Total		9.477.831.880,-	9.193.369.464,-	97,00

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Batam

5. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Pemberdayaan Sosial	2.456.653.000,-	2.344.566.905,-	95,44
2.	Rehabilitasi Sosial	2.248.215.608,-	1.974.631.100,-	87,83
3.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.438.564.801,-	1.359.346.500,-	94,49
4.	Penanganan Bencana	800.890.000,-	693.923.295,-	86,64

Total	6.944.323.409,-	6.372.467.800,-	91,77
-------	-----------------	-----------------	-------

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Batam

6. Program yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Setdako Batam dengan rincian sebagai berikut:

Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Perekonomian Dan Pembangunan	1.432.533.200,-	1.349.132.949,-	94,18

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Batam

7. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.079.333.300,-	924.096.180,-	85,62
2.	Penanganan Kerawanan Pangan	90.012.000,-	61.050.000,-	67,82
3.	Pengawasan Keamanan Pangan	55.434.200,-	48.395.000,-	87,30
4.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.008.666.047,-	1.946.650.200,-	96,91
5.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	207.576.114,-	189.458.142,-	91,27

6.	Penyuluhan Pertanian	272.690.000,-	259.996.400,-	95,35
7.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	741.896.392,-	676.172.551,-	91,14
Total		4.455.608.053,-	4.105.818.473,-	92,15

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Batam

5. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Memperluas Akses Hinterland

Indikator Kinerja : **Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland.**

TAHUN	KINERJA			TARGET RPJMD (2026)	CAPAIAN REALISASI THD TARGET RPJMD (2026)
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
2022	53,07	56,11	105,73	71,66	78,30
2023	59,41	67,94	114,36		94,81
2024	68,00	68,83	101,22		96,05

Sumber: Bappeda Kota Batam

Realisasi Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland.Kota Batam Tahun 2024 sebesar 68,83 % dari target sebesar 68,00% sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101,22%, Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 67,94% dengan target 59,41% dengan capaian 114,36 %. apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Batam sebesar 71,66 % maka capaian kinerjanya mencapai 96,05 %.

Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland.



Pemenuhan terhadap Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland di Kota Batam diukur melalui data realisasi pada 3 indikator berikut ini:

Tabel

Capaian Kinerja Indikator Sasaran Mewujudkan Pemerataan
Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Memperluas Akses Hinterland
Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024			Target RPJMD (2026)	Capaian Realisasi 2024 Thd Target RPJMD (2026)
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman wilayah	55,85	76,25	136,53	63,01	77,65	123,23	77,19	100,61

	<i>hinterland</i>								
2	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan di wilayah <i>hinterland</i>	91	91	100	94	106	113	100	106
3	Persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah <i>hinterland</i>	31,38	36,58	116,57	31,38	36,58	116,57	37,80	96,77
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		117,7			117,6			-	-

Sumber: Bappeda Kota Batam

1. Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman wilayah *hinterland*

Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman wilayah *hinterland* ini adalah cakupan rumah layak huni yang dipenuhi, sarana dan prasarana utilitas yang layak, luasan wilayah yang bebas kumuh, dan peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman dalam wilayah *Hinterland* (di luar wilayah *mainland* P. Batam)

Capaian kinerja nyata indikator ini adalah sebesar 76,25 dari target sebesar 55,85 yang direncanakan sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 136,53%. Capaian ini melebihi target. Sebagai tahun kedua RPJMD, dengan capaian kinerja indikator tersebut, bila dibandingkan terhadap target akhir 2026 sebesar 77,19% maka capaian kinerjanya mencapai 98,78%. Pencapaian indikator Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman wilayah *hinterland* dapat dilihat pada pencapaian indikator seperti dalam tabel di bawah ini

Tabel
Pencapaian Indikator Persentase Pemenuhan Infrastruktur
Permukiman Wilayah Hinterland Tahun 2024

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Rumah Layak Huni Wilayah Hinterland	89,67	89,67	100%
2	Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di Wilayah Hinterland	84,00	83,24	99,85%
3	Persentase Penurunan Kawanam Kumuh di Wilayah Hinterland	72,46	72,35	99.85%
4	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	98,01	97,88	99.87%

Sumber: Dinas Perakimtan Kota Batam

Capaian pemenuhan rumah layak huni kota batam di wilayah hinterland dukung melalui pelaksanaan program kawasan permukiman di wilayah hinterland dengan sub kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah hinterland, namun tahun 2024 wilayah hinterland belum ada alokasi usulan yang harus ditangani karena masih dalam pendataan dan perumusan regulasi terkait status aset bangunan atas air. Sampai dengan tahun 2024 realisasi pelaksanaan penyediaan rumah layak huni di wilayah hinterland adalah 2.501 Unit atau 74,00% sesuai dengan target yang ditetapkan. Secara bertahap untuk tahun 2024 realisasi atas capaian diukur hanya dari pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh satker kementerian yang bersumber dari APBN, sedangkan untuk APBD Kota Batam sendiri tidak terdapat alokasi anggaran untuk penanganan RTLH menjadi RLH dikarenakan adanya prioritas lain yang lebih mendesak.

Secara umum data lingkungan perumahan/permukiman yang ada di Kota Batam wilayah hinterland sejumlah 79 Lingkungan Perumahan/Permukiman yang tersebar di 3 (Tiga) Kecamatan. Basis data tersebut diperoleh berdasarkan kondisi data perumahan yang terdata di Kota Batam untuk wilayah hinterland dengan kondisi perumahan yang diselenggarakan oleh pengembang tidak termasuk Kavling Siap Bangun (KSB) ataupun Kampung Tua. Realisasi untuk pelaksanaan sampai dengan tahun 2024 tercapai dengan persentase 77,78% (61 Lingkungan Perumahan/Permukiman) dengan tingkat capaian 102,41% dari target yang ditetapkan yakni 75,95% (60 Lingkungan Perumahan/Permukiman) melebihi dengan target yang ditetapkan. Dalam perencanaan dan penganggaran tahun 2024 untuk wilayah hinterland realisasi melebihi target dikarenakan, wilayah hinterland menjadi skala prioritas penanganan infrastruktur, sedangkan penetapan target berdasarkan perhitungan rata-rata penanganan yang selalu dikerjakan pada periode sebelumnya.

Luasan kawasan permukiman kumuh di wilayah hinterland berdasarkan SK Kumuh Tahun 2019 adalah 882,43 Ha yang dijadikan basis data awal perencanaan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 0,78 Hektar, 2021 sebesar 74,55 Ha, 2022 sebesar 56,83 Ha dan Tahun 2023 sebesar 281,28 Ha. Dalam proses penganggaran untuk wilayah hinterland yang menjadi prioritas tahun 2024 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertamanan berdasarkan program yang ada yakni Program Kawasan Permukiman tidak ada alokasi target kinerja anggaran yang ditetapkan, realisasi yang ada bersumber dari pelaksanaan anggaran pembangunan beberapa aspek kumuh lain seperti jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah serta persampahan dan RTH yang dilaksanakan oleh baik Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan melalui program lainnya maupun Perangkat Daerah lain yang melaksanakan program yang menunjang penanganan aspek kumuh serta dialokasikannya 4 kelurahan yang merupakan Kawasan Investasi dari Lokasi Kumuh sehingga realisasi terhitung tetap ada dengan capaian

100% atau 46,85%.

Kebutuhan infrastruktur kota batam untuk wilayah hinterland masih terdapat infrastruktur yang perlu dibangun dengan total 108.058,95 Meter, dengan realisasi pembangunan tahun 2023 sepanjang 30.306,75 Meter. Hasil capaian pengurangan terhadap realisasi tersebut masih menyisakan kebutuhan sepanjang 77.752,20 Meter yang harus ditangani sampai dengan berakhirnya renstra perangkat daerah.

Capaian tahun 2024 berdasarkan target yang telah ditetapkan untuk wilayah perkotaan sebesar 89,87% (30.306,75 Meter) terealisasi dengan tingkat capaian sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut didukung oleh Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam yang dilaksanakan melalui APBD Kota Batam serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berlokasi di Kota Batam melalui APBD Provinsi. Apabila dibandingkan, realisasi capaian tahun 2024 lebih tinggi dibanding tahun 2023 yang terealisasi 27.987,36 Meter, hal ini dikarenakan tahun 2024 Kota Batam prioritas pembangunan dan penganggaran fokus pada penanganan infrastruktur yang berkelanjutan. Selain itu dipengaruhi oleh kondisi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang cukup sehingga mampu menopang pembangunan yang telah direncanakan.

Dalam pencapaian kinerja ini dipengaruhi juga dengan beberapa faktor penghambat, antara lain :

1. Tidak memadainya penyediaan dibandingkan dengan kebutuhan infrastruktur lingkungan perumahan/permukiman di wilayah hinterland.
2. Relatif rendahnya kesadaran masyarakat dalam partisipasi mendukung program pemerintah dalam mengentaskan kawasan kumuh di wilayah hinterland.
3. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman yang mana sebagian

besar kualitas perumahan dan permukiman masih terbatas dan belum memenuhi standar pelayanan yang memadai sesuai skala kawasan yang ditetapkan.

4. Ketersediaan jenis transportasi laut belum memadai dan terlayani dalam pendistribusian barang maupun penumpang dari satu pulau ke pulau lainnya.

Sedangkan faktor yang menjadi faktor pendukung dalam pencapaian kinerja Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman wilayah hinterland, sebagai berikut:

1. Adanya dukungan pemerintah pusat dalam percepatan pengembangan infrastruktur permukiman dengan terbitnya Permen PUPR No. 6 tahun 2021
2. Masih tersedianya lahan yang luas dalam pengembangan permukiman di kawasan hinterland

Solusi serta rekomendasi yang dapat dilakukan dalam menanggulangi faktor penghambat pencapaian capaian kinerja, diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses wilayah hinterland terhadap material pembangunan fisik
2. Perbaikan database untuk Calon Penerima Rumah Tidak Layak Huni
3. Adanya pelaksanaan pembaharuan database calon penerima RTLH.
4. Pemerintah Kota perlu meningkatkan alokasi anggaran setiap tahun dari sumber dana APBD dalam rangka terus menerus mengupayakan penuntasan kawasan kumuh dan layak huni di permukiman.
5. Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam rangka pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur yang sudah dibangun Pemerintah Kota.
6. Pemerintah Kota harus memiliki regulasi yang tegas dalam pengaturan zonasi kawasan.
7. Menambah armada laut sebagai simpul konektivitas antar pulau dalam

rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Hinterland.

2. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan di wilayah *hinterland*

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan di wilayah *Hinterland* adalah perbandingan antara sarana dan prasarana perhubungan dan transportasi yang telah terpenuhi dengan total kebutuhan yang ada dalam wilayah *Hinterland* (di luar wilayah *mainland* P. Batam)

Capaian kinerja nyata indikator ini adalah sebesar 97% dari target sebesar 91% yang direncanakan sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 106,59%. Capaian ini melebihi target sebagai tahun kedua RPJMD dengan target akhir 2026 sebesar 100% maka capaian kinerjanya mencapai 97%.

Ketercapaian indikator Sasaran untuk tahun 2023 didukung dengan adanya hibah sarana transportasi laut dari Kementerian Sosial pada bulan November 2023 berupa 3 unit kapal penumpang berkapasitas 20 orang dengan maksimal daya angkut 40 orang per kapal yang diperuntukkan untuk mengangkut anak sekolah di wilayah *hinterland*, dengan rute sebagai berikut:

Rute 1 : Pulau Gara - Pulau Lingka - Pulau Bertam

Pulau Bertam – Pulau Lingka – Pulau Gara

Pulau Gara – Pulau Bertam – Pulau Lingka – Pulau Gara

Rute 2 : Pulau Mecan - Pulau Sarang - Pulau Lengkang - Pulau Sambu
- Belakang Padang

Belakang Padang – Pulau Sarang – Pulau Mecan – Pulau

Sarang – Pulau Mecan

Pulau Mecan – Belakang Padang – Pulau Sambu – Pulau

Lengkang – Pulau Sarang – Pulau Mecan

Rute 3 : Pulau Terong – Pulau Tumbang – Pulau Geranting

Pulau Geranting - Pulau Tumbang – Pulau Geranting

Pulau Geranting – Pulau Tumbang – Pulau Terong

Gambar
Kapal Hibah dari Kementerian Sosial Tahun 202
untuk angkutan anak sekolah



Sumber: Dishub Kota Batam

Pemenuhan indikator ini didukung dengan pencapaian tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut dengan tingkat capaian kinerja dengan capaian 87% dengan realisasi 43% dari target 49%. Ketercapaian pada indikator Program ini dinilai tinggi dengan membandingkan jumlah masyarakat hinterland yang dilayani dengan angkutan laut dibagi jumlah daya angkut angkutan laut dalam satu tahun, namun dalam pencapaian target dinilai masih belum memenuhi pencapaian yang diharapkan hal ini dikarenakan jumlah masyarakat yang memanfaatkan transportasi laut masih belum maksimal, hal ini bisa juga dikarenakan kapal milik Dinas Perhubungan Kota Batam masih melayani dua kecamatan hinterland dari 3(tiga) wilayah hinterland yang ada di Kota Batam yaitu Kecamatan Bulang dan Kecamatan Galang dengan total jumlah pulau yang dilalui masih 20 pulau dari 30 pulau yang direncanakan akan beroperasi.

Tingkat aksesibilitas ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT Pelayanan Transportasi yang melaksanakan angkutan laut untuk masyarakat di wilayah hinterland. Transportasi laut yang tersedia sebanyak

1 Unit Kapal (KM Sri Lengkang) dan 3 Unit Speed Boat (Sri Jaloh, Sri Mecan dan Sri Nipah), yang beroperasi seminggu selama 3 (tiga) hari yaitu pada Senin, Rabu dan Sabtu dengan rute sebagai berikut:

1. Rute KM Sri Lengkang : Pulau Jaloh - Cengkui - Aweng - Selat nenek - Temoyong - Pulau Seraya - Pulau Buluh – Sagulung
2. Speed Boat Galang - Rute I : Pulau Karas - Pulau Mubut – Sembulang
3. Speed Boat Galang - Rute II : Pulau Sembur - Pulau Nanga - Teluk Nipah - Pulau Korek - Tanjung Pengapit - Kampung Baru - Air Lingke
4. Speed Boat Galang - Rute III : Air Saga - Pulau Abang – Cakang

Gambar
pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan
di wilayah hinterland Tahun 2024





Sumber: Dishub Kota Batam

3. Persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah *hinterland*

Persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland adalah cakupan penduduk yang memperoleh layanan air bersih dan sanitasi yang layak dalam wilayah Hinterland (di luar wilayah mainland P. Batam).

Di Kota Batam pada saat ini terdapat 2 tempat pelayanan air bersih, yaitu mainland dan hinterland. Jenis penyediaan air bersih mainland pada dasarnya merupakan air minum yang telah disediakan oleh Perusahaan Penyediaan Air Bersih di Kota Batam untuk melayani kebutuhan aktivitas di Kota Batam yang saat ini masih dalam pengelolaan BP Batam. sedangkan penyediaan air bersih di hinterland tidak bersumber pada Perusahaan Penyediaan Air Bersih melainkan dari sumber air baku yang dapat diambil dari sumur gali/bor, mata air dan lain-lain.

Pada tahun 2023 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam memiliki target untuk indikator cakupan layanan air bersih sebesar 31,38 dan terealisasi sebesar 36,58 dengan capaian 116,57%. Capaian layanan pada

tahun 2022 tercapai sebesar 122,23% dari target 29,55%, berdasarkan hal tersebut terjadi penurunan layanan sebesar 5,66%. Apabila dibandingkan dengan target pada akhir RPJMD sebesar 37,80%, capaian kinerja tahun ini sudah mencapai 96,77%.

Pengukuran dilaksanakan atas Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis, Pembangunan, Peningkatan, Perluasan dan Operasional/Pemeliharaan SPAM di Wilayah Hinterland dengan jumlah SR akhir tahun 2023 berjumlah 7.662 SR atau sekitar 30.648 jiwa. Penambahan SR dilakukan dengan pembangunan SPAM baru di beberapa lokasi dan penambahan jaringan SR serta penyambungan SR Mandiri di Kegiatan BLUD. Untuk mencapai target yang telah disepakati di dalam RPJMD Tahun 2021 s.d 2026 pada tahun 2023 Pemerintah Kota Batam menambah pengelolaan penyediaan air bersih di hinterland sebanyak 319 SR atau sebanyak 1.276 jiwa dengan lokasi sebagai berikut :

1. Pembangunan SPAM Pulau Nguan Kel. Galang Baru Kec. Galang sebanyak 51 SR/ 204 Jiwa
2. Pembangunan SPAM Pulau Seraya Kel. Batu Legong Kec. Bulang sebanyak 120 SR/480 Jiwa
3. Optimalisasi WTP Air Raja sebanyak 10 SR/40 Jiwa
4. Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Pulau Nguan Kel. Galang Baru Kec. Galang sebanyak 138 SR/552 Jiwa

Sedangkan pengelolaan penyediaan air bersih di hinterland dengan jumlah yang terlayani sampai akhir tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel

Rekapitulasi SR Air Bersih Kota Batam s.d. akhir Tahun 2024

No	Nama WTP/Unit Pelayanan	Kec/Kel	Jumlah SR	Jumlah Jiwa	NAMA WADUK	Ket
1	WTP Belakang Padang	Belakang Padang	1.349	5.396	Waduk Sekanak 1 Dan Sekanak 2	Waduk dan Tadah Hujan

2	WTP Mecan	Pulau Mecan	263	1.052	WADUK MECAN	Waduk dan Tadah Hujan
3	WTP Pemping	Pulau Pemping	214	856	WADUK PEMPING	Waduk dan Tadah Hujan
4	WTP Kasu	Kasu	208	832	Waduk Sungai Lumba	Waduk dan Tadah Hujan
5	WTP Ngenang	Ngenang	174	696	Waduk Ngenang	Waduk dan Tadah Hujan
6	WTP Pecung	Pecung	245	980	Waduk Tanjung Kerang	Waduk dan Tadah Hujan
7	WTP Bulang	Bulang Lintang	240	960	Waduk Bulang Lintang	Waduk dan Tadah Hujan
8	WTP Geranting	Pulau Terong	190	760	Waduk Pulau Riang	Waduk dan Tadah Hujan
9	WTP Terong	Pulau Terong	281	1.124	Waduk Air Batang	Waduk dan Tadah Hujan
10	WTP Setokok	Pulau Setokok	116	464	Waduk Setokok	Waduk dan Tadah Hujan
11	WTP Air Raja	Air Raja	146	584	Waduk Air Raja	Waduk dan Tadah Hujan
12	WTP Subang Mas	Subang Mas	67	268	Waduk Subang Mas	Waduk dan Tadah Hujan
13	WTP Rempang Cate	Rempang Cate	130	520	Waduk Rempang Cate	Waduk dan Tadah Hujan

14	WTP Sembulang	Sembulang	75	300	Tangkapan Air Sembulang	Tangkapan Air
15	WTP Pulau Abang	Pulau Abang	332	1.328	Waduk Pulau Abang	
16	IKK Tiangwanggang	Tembesi	452	1.808		PT. Moya/Spam Batam
17	IKK Pulau Buluh	Pulau Buluh	541	2.164		PT. Moya/Spam Batam
18	SWRO Belakang Padang	Sekanak Raya	831	3.324		Air Laut
19	WTP Jaloh	Pantai Gelam	227	908	Waduk Pulau Jaloh	Waduk dan Tadah Hujan
20	WTP Temoyong	Temoyong	159	636	Waduk Temoyong	Waduk dan Tadah Hujan
21	WTP Air Gara Bertam	Kasu	158	632	Waduk Bertam	Waduk dan Tadah Hujan
22	WTP Tanjung Banun	Sembulang	92	368	Waduk Tanjung Banun	Waduk dan Tadah Hujan
23	WTP Petong	Pulau Abang	111	444		Waduk dan Tadah Hujan
24	WTP Kp. Baru Galang	Subang Mas	81	324		Waduk dan Tadah Hujan
25	WTP Galang Baru	Galang Baru	299	1,196		Waduk dan Tadah Hujan

26	WTP Pulau Air	Batu Legong	116	464		Waduk dan Tadah Hujan
27	SWRO Pulau Labu	Batu Legong	49	196		Air Laut
28	WTP Selat Nenek	Temoyong	218	872		Waduk dan Tadah Hujan
29	WTP Nguan	Galang Baru	172	688		
30	WTP Seraya	Batu Legong	116	464		Waduk dan Tadah Hujan
31	WTP Pulau Cengkui	Pantai Gelam	71	7		Waduk dan Tadah Hujan
32	WTP Tanjung Kubu	Bulang Lintang	25	100		Waduk dan Tadah Hujan
Jumlah			7.684	30.736		

Sumber: Dinas CKTR Kota Batam

Untuk pengelolaan penyediaan sanitasi di hinterland dengan jumlah yang terlayani dari tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2024 sebanyak 1.979 KK atau 9.895 jiwa. Untuk rekapitulasi jumlah penambahan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.48

Rekapitulasi SR Sanitasi Kota Batam s.d. Akhir Tahun 2024

No	Lokasi	Kel/Kec	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan (KK)	Jumlah Pelayanan (Jlwa)	Pelaksana	Keterangan
1.	P. Bulang Lintang	Bulang Lintang/Bulang	MCK+	25	125	KSM P.Bulang Lintang	Pembangunan di Tahun 2011
2.	P. Jaloh	Pantai Gelam/Bulang	MCK+	25	125	KSM P.Jaloh	Pembangunan di Tahun 2011
3.	P. Mecan	Sekanak Raya Belakang Padang	MCK+	25	125	KSM P.Mecan	Pembangunan di Tahun 2011
4.	P. Geranting	Pulau Terong/Belakang Padang	MCK+	25	125	KSM P.Geranting	Pembangunan di Tahun 2011
5.	Kampung Bukit	Tanjung Riau/Sekupang	IPAL Komunal	29	145	KSM Kampung Bukit	Pembangunan di Tahun 2012
6.	Tanjung Sengkuang	Tanjung Sengkuang Batu Ampar	IPAL Komunal	23	115	KSM Tanjung Sengkuang	Pembangunan di Tahun 2012
7.	Bulang Keban	Bulang	MCK+	25	125	KSM Bulang Keban	Pembangunan di Tahun 2012
8.	Tanjung Riau	Tanjung Riau/Sekupang	MCK+	25	125	KSM Pulau Seraya	Pembangunan di Tahun 2012
9.	Air Raja	Air Raja/Galang	IPAL Komunal	38	190	KSM Air Raja	Pembangunan di Tahun 2015
10.	P. Abang	Pulau Abang/Galang	IPAL Komunal	132	660	KSM Pulau Abang	Pembangunan di Tahun 2015
11.	P. Pemping	Pemping/Belakang Padang	IPAL Komunal	38	190	KSM Lancang Kuning	Pembangunan di Tahun 2016
12.	Sagulung	Tembesi/Sagulung	IPAL Komunal	57	285	KSM Tiangwangkanng Sukses	Pembangunan di Tahun 2016
13.	Setokok	Setokok/Bulang	IPAL Komunal	70	350	Cv. Adelia Pratama	Pembangunan di Tahun 2016
14.	Pecung	Pecung/Belakang Padang	IPAL Komunal	41	205	KSM Pecung Mandiri	Pembangunan di Tahun 2017
15.	Kabil	Kabil/Nongsa	IPAL Komunal	44	220	KSM Panggur Sehat Sejahtera	Pembangunan di Tahun 2017
16.	Subang Mas	Subang Mas/Galang	IPAL Komunal	41	205	KSM Subang Mas Cemerlang	Pembangunan di Tahun 2017

Sumber: Dinas CKTR Kota Batam

Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja ini adalah:

1. Adanya komitmen dari semua Stage Holder untuk percepatan penuntasan infrastruktur layanan air bersih untuk semua wilayah Hinterland dan kawasan yang menjadi tupoksi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.
2. Rancangan peningkatan penanganan sumber-sumber air di wilayah Hinterland yang memiliki sumber air baku dan atau yang memiliki konektivitas jaringan pipa ATB terdekat.
3. Keterlibatan masyarakat berupa hibah lahan ikut punya andil yang besar dalam pemenuhan kebutuhan air bersih secepatnya dapat tercapai.
4. Adanya komitmen pemerataan dan peningkatan penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana sanitasi lingkungan permukiman di wilayah Hinterland juga mendapat dukungan ketersediaan lahan oleh warga masyarakat setempat
5. Pelaksanaan pemasangan pipa dan reservoir pada penyediaan air bersih sampai pada meteran didepan rumah.

6. Komitmen dari Pemerintah Pusat melalui penyediaan dana DAK untuk penyediaan sarana air bersih.

Faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Batam sangat tinggi, sehingga sulit membuat target penuntasan penanganan secara keseluruhan.
2. Sulitnya dan terbatasnya sumber air baku yang tersedia kurang memadai untuk dilakukan pengolahan air bersih sampai mengalir ke rumah-rumah, bahkan ada sebagian lokasi WTP hanya mengandalkan sumber air hujan.
3. Lokasi yang akan dijadikan pengolahan air bersih merupakan pulau-pulau kecil hanya berpenduduk tidak kurang dari 100 jiwa, sehingga menimbulkan cost yang tidak sedikit.

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Memperluas Akses Hinterland ini adalah :

1. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	95.881.240.703,-	88.172.492.864,-	91,96

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Batam

2. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
--------------	----------------	-----------------	-------------

Pengelolaan Pelayaran	13.089.587.276,-	11.914.944.570,-	91,02
-----------------------	------------------	------------------	-------

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Batam

3. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	36.840.191.858,-	34.580.901.908,-	93,87
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	640.447.560,-	639.289.000,-	99,88
	37.480.639.418,-	35.220.190.908,-	93,97

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Batam

6. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Professional, Akuntabel, Transparan Dan Mengayomi

Indikator Kinerja: Indeks Reformasi Birokrasi

TAHUN	KINERJA			TARGET RPJMD (2026)	CAPAIAN REALISASI THD TARGET RPJMD (2026)
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
2022	64,00	56,98	89,03%	81,00	70,34
2023	70,01	81,92	117,03		101,14
2024	74,00	83,48	112,81		103,06



Realisasi kinerja nyata indikator "Indeks Reformasi Birokrasi" tahun 2024 adalah sebesar 83,48 dari target sebesar 74,00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 112,81%, Jika dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 81,92 dengan target 70,01 capaiannya sebesar 117,03 % capaian ini telah melebihi target yang diperjanjikan. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Batam dengan target sebesar 81,00 maka capaian kinerja sasaran indikatornya sudah melebihi yaitu sebesar 103,06 %.

Dengan hasil capaian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Batam telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada implementasi RB General dan RB Tematik, Namun, masih ada yang harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi, antara lain:

1. Penerapan reformasi birokrasi yang optimal hingga tingkat Perangkat Daerah.
2. Rencana aksi oleh agen perubahan yang berkelanjutan dan mampu menggerakkan perubahan.
3. Meningkatkan pemahaman RB sebagai bagian yang terintegrasi dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari bukan lagi sebagai tugas tambahan.

4. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan/kebijakan
5. Pengelolaan SDM yang belum optimal.
6. Pengawasan atas kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat.
7. Kebijakan sistem kompensasi penerima layanan.
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas hasil survei kepuasan masyarakat.

Adapun hasil penilaian reformasi birokrasi tahun 2024 dan beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam lembar kerja evaluasi, yaitu:

Hasil Evaluasi RB Tahun 2024

No	Komponen	Indikator Penilaian	Skor	Rekomendasi
1	RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	2,33	Memastikan seluruh kegiatan utama beserta rencana aksinya dapat direalisasikan dan mencapai target yang ditetapkan. Menetapkan target atas kegiatan utama dengan mempertimbangkan kondisi capaian tahun-tahun sebelumnya. Memastikan Rencana Aksi relevan dan cukup memadai untuk mencapai target sasaran kegiatan utama. Memastikan seluruh indikator output atas rencana aksi cukup menggambarkan sasaran. Memastikan target output atas rencana aksi mempertimbangkan baseline tahun sebelumnya. Melakukan reviu agar seluruh rencana aksi didukung dengan anggaran yang memadai dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi.
2	RB General	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk penyederhanaan birokrasi	3	Segera terapkan sistem kerja sebagai implementasi dari peraturan mengenai sistem kerja pasca dilakukan penyederhanaan birokrasi
3	RB General	Tingkat Maturitas SPIP	3,29	1 Peningkatan Kualitas perencanaan, melalui : a. Perumusan sasaran program dan sasaran kegiatan bagi seluruh OPD; b. Penyempurnaan / perbaikan kualitas perencanaan dengan memperhatikan cascading sesuai proses bisnis dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome dan memenuhi kriteria SMART

					c. Reviu terhadap proses dan kualitas penyusunan perencanaan untuk memastikan apakah program dan kegiatan telah mendukung ketercapaian sasaran strategis dan prioritas pembangunan daerah
				2	Perumusan sasaran program dan sasaran kegiatan bagi seluruh OPD
				3	Penyempurnaan/perbaikan kualitas perencanaan dengan memperhatikan cascading sesuai proses bisnis dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome dan memenuhi kriteria SMART
				4	Mendorong Pemda untuk mengoptimalkan fungsi struktur pengelola resiko
				5	Melakukan pemantauan atas keketerjadian risiko
				6	Mengidentifikasi dan menganalisis risiko kemitraan dan menyusun mitigasi risikonya
4	RB General	Nilai SAKIP	68,85	Catatan dan rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP dapat diakses pada esr.menpan.go.id dengan menggunakan akun instansi	
5	RB General	Tingkat Digitalisasi Arsip	91,73	Penjelasan rekomendasi tingkat digitalisasi arsip dapat dikonfirmasi ke Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	
6	RB General	Tingkat Tindak Lanjut pengaduab masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	5	Perlu Penyelesaian Aduan	
7	RB General	Indeks Kualitas Kebijakan	55.5	1	Memperkuat dukungan pimpinan terkait pengelolaan kualitas kebijakan dan meningkatkan konsolidasi antar unit kerja untuk menggali data dan informasi tata kelola kebijakan yang dimiliki
				2	Meningkatkan penerapan tata kelola kebijakan yang baik dengan beberapa agenda antara lain :
					a. Memperkuat dukungan pengkajian /analisis /telaah /kebijakan dalam perencanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan
					b. Memperkuat partisipasi stakeholder dalam proses kebijakan secara lebih representatif termasuk dengan kelompok stakeholder di luar instansi atau kelompok rentan di lapangan
					c. Mengelola komunikasi kebijakan kepada seluruh stakeholder sasaran dalam seluruh proses kebijakan

				d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan untuk memastikan dampak/ketercapaian tujuan kebijakan atau keselarasan implementasi kebijakan dalam penyelesaian masalah kebijakan atau target pencapaian yang menjadi latar belakang inisiasi kebijakan e. Melibatkan secara aktif SDM fungsional analisis kebijakan/pejabat fungsional terkait lainnya yang kompeten untuk melakukan analisis dan menyusun rekomendasi kebijakan di seluruh proses kebijakan
				3 Menyempurnakan bukti dukung sesuai catatan validasi LAN
8	RB General	Indeks Reformasi Hukum	86.1	Diperhatikan kekurangan nilai pada masing-masing variabel
9	RB General	Indeks Pembangunan Statistik	2,46	* Pemerintah Kota Batam perlu melaksanakan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan proses bisnis statistik serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan. * Pemerintah Kota Batam perlu memastikan setiap prosedur pada SOP pelaksanaan proses bisnis sudah sesuai dengan pedoman teknis dan diterapkan secara menyeluruh oleh setiap Produsen Data * Pemerintah Kota Batam perlu mengupayakan pemenuhan kompetensi sumber daya manusia bidang manajemen data agar dapat dilakukan seluruhnya yaitu kompetensi di bidang proses bisnis penyelenggaraan statistik sektoral
10	RB General	Indeks Tata Kelola Pengadaan	86,89	1 Tingkatkan dan pertahankan kinerja pengumuman RUP SIRUP 2 Tingkatkan dan pertahankan kinerja realisasi paket tender 3 Perlu ditingkatkan kinerja penyelesaian paket katalog elektronik 4 Pertahankan kinerja realisasi toko daring 5 Tingkatkan dan pertahankan kinerja realisasi paket non-tender/non e-purchasing 6 Tingkatkan dan pertahankan kinerja pencatatan e-kontrak 7 Segera memenuhi keterisian JF PPBJ melalui pengangkatan pertama, PPPK, dan/atau Perpindahan dari Jabatan Lain 8 Implenetasi dengan baik pencapaian tersebut. Selanjutnya persiapan menuju tingkatan berikutnya

11	RB General	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	88.73	Melaksanakan saran dalam surat ketua Ombudsman yang telah disampaikan kepada Pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah
12	RB General	Indeks SPBE	3,77	Rekomendasi terdapat dalam LHE masing-masing instansi
13	RB General	Capaian Makro IKU	94,32	Merupakan capaian IKU Makro yang terdiri dari tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan rasio gini
14	RB General	Capaian Non Makro IKU	92,31	Melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan terhadap seluruh target IKU yang disepakati dalam Perjanjian Kinerja, sehingga apabila dijumpai capaian IKU secara berkala belum "on the track" segera dilakukan langkah-langkah antisipasi untuk meningkatkan capaian IKU tersebut dalam triwulan-triwulan berikutnya
15	RB General	Indeks Berakhlak	68,58	Laporan lengkap dapat diunduh pada website evalbudker.menpan.go.id dengan username dan password yang sama sewaktu pengisian evaluasi budaya kerja
16	RB General	Survei Penilaian Integritas	68,7	Internal : 78,5 Eksternal : 83,01 Eksper : 59,38 Setelah mengetahui analisis terkait faktor koreksi pada subbab sebelumnya, Pemerintah Kota Batam dapat melakukan analisis mendalam mengenai perumusan rekomendasi dan rencana aksi untuk menindaklanjuti hasil SPI 2024. Dalam SPI 2024, Pemerintah Kota Batam mendapat skor SPI sebesar 68,7. Indeks tersebut menempatkan Pemerintah Kota Batam dalam kategori rentan yang berarti Pemerintah Kota Batam sangat rentan terpapar praktik korupsi. Hal ini akibat sistem pencegahan yang lemah/tidak berjalan dan/atau meningkatnya jumlah oknum pejabat/pegawai yang kurang berintegritas yang menempati posisi/jabatan/layanan strategis/kunci di lembaga, sehingga meningkatkan risiko korupsi lembaga secara keseluruhan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa upaya dan program pencegahan korupsi dilakukan lembaga saat ini TIDAK EFEKTIF.
17	RB General	Survey Kepuasan Masyarakat	90.04	Pertahankan Pelaksanaan SKM, mempertahankan dan meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
18	RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	0.23	(1) Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait (2) Memastikan intervensi berupa rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan dan penggaran, proses bisnis dan standar operasional prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi

				(3)	Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain
19	RB Tematik	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	0,25	(1)	Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait
				(2)	Memastikan intervensi berupa rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan dan penggaran, proses bisnis dan standar operasional prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi
				(3)	Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain
20	RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	1	(1)	Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait
				(2)	Memastikan intervensi berupa rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan dan penggaran, proses bisnis dan standar operasional prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi
				(3)	Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain
21	RB Tematik	Pengendalian inflasi (strategi pembangunan)	0	(1)	Memastikan rencana aksi menunjukan adanya perbaikan/inovasi untuk menjawab permasalahan dan bukan business as usual
				(2)	Memastikan Rencana Aksi tematik juga berfokus pada prioritas permasalahan utama/kritis
				(3)	Menyempurnakan Rencana Aksi yang menunjukan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain
22	RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	1,73	Angka Kemiskinan yang digunakan angka maret tahun 2024, sumber data BPS	
23	RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	2,05	Data Realisasi Investasi yang digunakan Triwulan III 2023	
24	RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Camapaian Dampak)	0.38	Menggunakan Data Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023 Berdasarkan Surat Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Nomor OT.04.03/A.IV/1483/2025 Tanggal 5 Februari 2025	

25	RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Indikator Dampak)	2.95	Perhitungan capaian dampak PDN mengacu pada KepmenPANRB 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024
26	RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	0	Berdasarkan Penilaian Kinerja Pengendalian Inflasi Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan data tahun 2023 dan 2024 predikat penilaian kinerja pengendalian inflasi berada pada kriteria Belum Baik.
27	RB General	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2	Instansi sudah menyusun arsitektur SPBE To-Be sesuai standar

Dalam upaya mewujudkan RPJMD 2021-2026, Indeks Reformasi Birokrasi didukung dengan 5 indikator sasaran sebagaimana tabel di bawah ini. Rincian capaian kinerja per indikator tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel

Capaian Kinerja Indikator Sasaran Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Professional, Akuntabel, Transparan dan Mengayomi 2023 dan 2024

No	Indikator Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024			Target RPJMD (2026)	Capaian Realisasi 2024Thd Target RPJMD (2026)
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Nilai Tata Kelola Kearsipan PD	60	57,42	95,70	65	67,07	103,18	70 (baik)	95,81
2	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100	Level 3	Level 3	100	Level 3	100
3	Pertumbuhan Pajak Daerah	4.72	18.56	393.22	4.72	14.77	313	4,72	313
	Pertumbuhan Retribusi Daerah	4.72	48.40	1027.6	4.72	20.83	441.28	4.72	441.28

4	Indeks Profesionalitas ASN	60,89	85,91	143,18	62,00	84,72	136,65	66	128,36
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	89,01	100,01	90	90,05	100,05	92	97,88
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		28.636,34			238,83				

Sumber: Bappeda Kota Batam

1. Nilai Tata Kelola Kearsipan OPD

Nilai Tata Kelola Kearsipan OPD merupakan hasil penilaian atas pengelolaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang dikeluarkan oleh Lembaga ANRI melalui Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.

Realisasi kinerja nyata indikator "Nilai Tata Kelola Kearsipan OPD" adalah sebesar 67,05 dari target sebesar 65,00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 103,18%, capaian ini belum mencapai target yang diperjanjikan. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Batam dengan target sebesar 70, maka capaian kinerja sasaran indikatornya mencapai 95,81%.

Dengan besaran pencapaian tersebut, dipengaruhi beberapa faktor pendukung, antara lain :

1. Implementasi pengarsipan melalui aplikasi Srikandi
2. Adanya pembinaan kepada perangkat daerah selaku pembuat arsip

Sedangkan faktor yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian kinerja Nilai Tata Kelola Kearsipan OPD, sebagai berikut:

1. Lemah jaringan internet di beberapa lokasi Perangkat Daerah sehingga menghambat penggunaan aplikasi srikandi
2. Keterbatasan perangkat daerah dalam membuat arsip sesuai dengan

prosedur dan ketentuan yang berlaku

3. Dukungan SDM Kearsipan perangkat daerah belum memadai.

Solusi serta rekomendasi yang dapat dilakukan dalam menanggulangi faktor penghambat pencapaian capaian kinerja, diantaranya sebagai berikut:

1. Menambah sinyal penguat untuk meningkatkan jaringan internet di beberapa lokasi Perangkat Daerah yang jauh dari jangkauan.
2. Adanya sosialisasi terhadap pemanfaatan srikandi di setiap masing-masing perangkat daerah
3. Pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip terhadap SDM pengelola arsip masing-masing perangkat daerah
4. Adanya regulasi turunan dari Pemerintah Daerah terkait kearsipan
5. Pemanfaatan Aplikasi oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam

Gambar

Pencanangan Gerakan Batam Sadar Tertib Arsip
(GERBANG SATRIA)





Sumber: Dispusip Kota Batam

2. Tingkat Maturitas SPIP

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP ini dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pengawasan yang professional dilingkungan Pemerintah Kota Batam atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Inspektorat Daerah Kota Batam berperan untuk menciptakan manajemen pemerintahan yang baik, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Terintegrasi pada Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kota Batam telah melakukan sosialisasi tersebut untuk semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam. SPIP terintegrasi tersebut dimaksudkan sebagai manajemen yang dikoordinasikan oleh Bagian Perencanaan atau fungsi lainnya dalam melakukan Penilaian Mandiri (PM), APIP (Inspektorat) dalam melakukan Penjaminan Kualitas (PK), dan BPKP dalam melakukan Evaluasi yang mana keberhasilan implementasi SPIP terintegrasi membutuhkan komitmen manajemen untuk meningkatkan

kualitas perencanaan, dengan menerapkan Manajemen Risiko yang mendukung pencapaian tujuan. Begitu juga bagi APIP, untuk dapat memfasilitasi penerapan manajemen risiko, termasuk atas risiko-risiko fraud (termasuk korupsi), dan melakukan pengawasan pada area-area yang berisiko tinggi melalui Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR). APIP juga harus dapat mendorong perbaikan sistem pengendalian intern secara berkelanjutan.

Realisasi kinerja nyata indikator "tingkat maturitas SPIP" adalah sebesar 100% dari target level 3 yang direncanakan dalam perjanjian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi pada level 3, capaian ini sudah sesuai target yang diperjanjikan dan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kategori penilaian tingkat Kabupaten/Kota. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Batam dengan target sebesar pada level 3, maka capaian kinerja sasaran indikatornya Pemerintah Kota Batam sudah pada capaian tertinggi.

Dengan berkembangnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, perlu penilaian yang dapat menggambarkan Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP khususnya daerah. Diantaranya guna menilai tingkat kematangan, keandalan sistem dan memberi keyakinan bahwa proses penyelenggaraan SPIP sudah sesuai. Atas pencapaian SPIP Kota Batam yang selama tiga kali berturut-turut telah meraih level 3, dan dari peraihan WTP (Opini Wajar Tanpa Pengecualian) yang sudah mencapai 12 kali berturut-turut Kota Batam sudah layak mendapatkan level 4 dengan nilai Maturitas SPIP sebesar 3,5 hingga 3,8.

Gambar

Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2024



Sumber: Inspektorat Daerah Kota Batam

Walaupun besaran pencapaian sudah cukup tinggi, namun masih ada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi, antara lain :

1. Kuantitas dan kualitas kompetensi SDM sebagai auditor internal yang masih kurang sehingga tidak dapat memenuhi standar operasional pengawasan internal yang memadai;
2. Formasi kebutuhan Auditor dan P2UPD belum memadai;
3. Prasarana dan sarana pendukung kegiatan yang masih belum optimal dan memadai;
4. Rendahnya perhatian perangkat daerah terhadap implementasi Sistem Pengawasan Intern Pemerintah;
5. Rendahnya kepedulian perangkat daerah untuk melakukan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
6. Pelaksanaan tugas-tugas mandatory belum dapat dilakukan secara maksimal.

Sedangkan faktor yang menjadi faktor pendukung dalam pencapaian kinerja Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP, sebagai berikut:

1. Dukungan dan perhatian pimpinan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal.

2. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan operasional pengawasan yang cukup
3. Optimalisasi pemberdayaan prasarana dan sarana serta sumber daya APIP yang dimiliki; dan
4. Adanya koordinasi yang baik antara APIP dengan pihak-pihak eksternal terkait.

Solusi yang dapat dilakukan dalam menanggulangi faktor penghambat pencapaian capaian kinerja, diantaranya sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemberdayaan prasarana dan sarana serta sumber daya APIP yang dimiliki
2. Lebih meningkatkan ketaatan terhadap jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan serta ketepatan waktu pelaksanaannya.
3. Menginventarisir kasus/pengaduan yang masuk kemudian membuat skala prioritas masalah yang harus segera dilakukan tindak lanjutnya
4. Meningkatkan pengendalian mutu pengawasan tim dalam setiap penugasan pemeriksaan.

3. Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah

Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah adalah meningkatnya realisasi pajak daerah dan retribusi daerah tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Realisasi kinerja nyata indikator "Pertumbuhan Pajak Daerah" diketahui bahwa pada tahun 2024 14,77 dari target 4,72 dengan capaian kinerja Pertumbuhan Pajak Daerah sebesar 313 %. Pertumbuhan Pajak Restribusi Daerah Realisasi 20,83 dari target 4,72% capaian sebesar 441,28% sehingga kinerja pelayanan dikategorikan sangat tinggi. Apabila

dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Batam dengan target sebesar 4,72, maka capaian kinerja sasaran indikatornya sudah melebihi target Pada pajak Daerah sebesar 313% dan Restribusi Daerah 441,28. Perbandingan secara rinci dapat dilihat berikut ini:

Tabel
Perbandingan Penerimaan Retribusi Daerah
Tahun 2024

Program (1)	Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)	Kategori Kinerja (7)
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Realisasi Pajak Daerah	1.423.589.9447.986	1.407.042.992.643,15	98,84%	Sangat Tingg
		Realisasi Retribusi Daerah	193.131.375.383	169.737.328.905,50	87,89%	Tinggi
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Wajib Pajak	5%	11,84%	236,8%	Sangat Tinggi

Sumber: Bapenda Kota Batam

Dengan besaran pencapaian tersebut, dipengaruhi beberapa faktor penghambat, antara lain:

1. Kurangnya pengawasan terhadap wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya
2. Kerjasama dalam meningkatkan pajak belum dilakukan dengan pihak swasta
3. Dukungan SDM dalam melakukan pengelolaan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan standar yang diperlukan

Sedangkan faktor yang menjadi faktor pendukung dalam pencapaian kinerja Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

1. Program Relaksasi Pajak Daerah, Relaksasi BPHTB yaitu pemberian

discount 50% terhadap pemindahan karena hibah yang dibuktikan dengan akta hibah, dan pemberian discount 10% terhadap pemberian hak baru untuk luasan tanah minimal 10.000 M²; Database terhadap wajib pajak daerah.

2. Penghapusan denda PBB-P2 yaitu piutang tahun 1994 s.d 2024.
3. Peningkatan Layanan Perpajakan Secara Online melalui aplikasi Whatsapp serta melakukan Validasi Online melalui e-signature, berkas validasi dapat dicek langsung oleh PPAT.
4. Implementasi alat rekam pajak (CSR Bank Riau Kepri Syariah 525 unit, dan APBD 2023 sebanyak 200 unit.
5. Melakukan Roadshow (Jemput Bola) Pelayanan PBB di 12 (dua belas) Kecamatan, Komplek Perumahan dan Pusat Perbelanjaan.
6. Mobilisasi Sarana Informasi Bus Interaksi Pajak (SIBIJAK), layanan pajak keliling ke pemukiman warga dan goes to school.
7. Pengembangan Sistem Manajemen Reklame (SIMREK).
8. Penagihan secara aktif terhadap Piutang Pajak Daerah.
9. Pemasangan spanduk peringatan/teguran kepada wajib pajak tidak taat.
10. Pengembangan mitra layanan pembayaran Pajak Daerah melalui kerjasama dengan sejumlah bank seperti Bank Riau Kepri Syariah, Bank BJB, Bank Mandiri.
11. Pengembangan mitra layanan pembayaran Pajak Daerah melalui kerjasama dengan sejumlah kanal digital seperti Gotagihan, LinkAja, Traveloka, Bukalapak, Tokopedia, Pospay, BliBli.com, Alfamart, Indomaret, Qris.
12. Peningkatan pelayanan dengan kerjasama lintas instansi seperti PT. Bright PLN Batam, DJPK Kanwil Provinsi Kepri, BPN Kota Batam, Disdukcapil, Diskominfo, DPMPTSP, Kejaksaan Negeri Batam, BP Batam, KPKNL Batam, OPD Penghasil.
13. Melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pajak daerah dan retribusi daerah agar tercipta kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi dengan dilanjutkan upaya penegakan hukum (law enforcement) bekerjasama dengan

instansi terkait.

Solusi serta rekomendasi yang dapat dilakukan dalam menanggulangi faktor penghambat pencapaian capaian kinerja, diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan regulasi terbaru atas hasil evaluasi tarif retribusi yang sudah dianggap tidak relevan dengan kondisi saat ini.
2. Melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat agar lebih mudah. Hal ini dilakukan agar tumbuhnya kesadaran dalam melakukan pembayaran retribusi daerah.
3. Membangun kesadaran seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini OPD Penghasil tentang tugas dan tanggung jawab selaku pengelola retribusi daerah sesuai bidang tugasnya untuk melakukan upaya-upaya peningkatan penerimaan retribusi daerah.

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH

TAHUN 2023-2024

NO	JENIS PAJAK DAERAH	REALISASI 2023	REALISASI 2024	BERTAMBAH / BERKURANG	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 4-3	(6) = 5/3*100
1	Pajak Reklame	19.813.768.911,00	22.021.756.526,00	2.207.987.615,00	11,14
2	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	1.992.267.950,35	2.972.843.334,00	980.575.383,65	49,22
3	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	214.532.617.777,00	210.667.534.495,00	- 3.865.083.282,00	-1,80
4	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	414.286.200.730,00	492.145.582.171,15	77.859.381.441,15	18,79
5	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	128.553.606.790,00	151.057.054.556,00	22.503.447.766,00	17,51
6	PBJT-Tenaga Listrik	275.282.708.069,00	310.822.499.262,00	35.539.791.193,00	12,91
7	PBJT-Jasa Perhotelan	126.891.585.437,90	159.985.270.298,00	33.093.684.860,10	26,08
8	PBJT-Jasa Parkir	11.015.771.754,00	10.625.865.338,00	- 389.906.416,00	-3,54
9	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	33.769.076.763,65	46.744.586.663,00	12.975.509.899,35	38,42
JUMLAH		1.226.137.604.182,90	1.407.042.992.643,15	180.905.388.460,25	14,75

Gambar

Realisasi PAD Kota Batam *Sumber: Bapenda Kota Batam*

REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH

TAHUN 2023-2024

NO	JENIS RETRIBUSI DAERAH	REALISASI 2023	REALISASI 2024	BERTAMBAH / BERKURANG	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 4-3	(6) = 5/3*100
1	Jasa Umum	57.369.104.190,00	63.363.051.578,00	5.993.947.388,00	10,45
2	Jasa Usaha	774.831.181,00	9.958.228.194,00	9.183.397.013,00	1185,21
3	Perizinan Tertentu	82.354.283.426,00	96.416.049.133,50	14.061.765.707,50	17,07
JUMLAH		140.498.218.797,00	169.737.328.905,50	29.239.110.108,50	20,81

REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH

TAHUN 2023-2024

NO	JENIS PAD	REALISASI 2023	REALISASI 2024	BERTAMBAH / BERKURANG	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 4-3	(6) = 5/3*100
1	Hasil Pajak Daerah	1.226.137.604.182,90	1.407.042.992.643,15	180.905.388.460,25	14,75
2	Hasil Retribusi daerah	140.498.218.797,00	169.737.328.905,50	29.239.110.108,50	20,81
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	10.205.472.833,00	7.937.122.231,00	- 2.268.350.602,00	-22,23
4	Lain-lain PAD yang Sah	152.178.763.609,89	183.900.101.515,54	31.721.337.905,65	20,84
JUMLAH		1.529.020.059.422,79	1.768.617.545.295,19	239.597.485.872,40	15,67

4. Indeks Profesionalitas ASN

Sesuai amanat Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019, pengertian dari IP-ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.

Realisasi kinerja nyata indikator "Indeks Profesionalitas ASN" adalah sebesar 84,72 dari target sebesar 62,00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 136,65%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 85,91% dari target 60,89 dengan capaian sebesar 143,18%, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Batam dengan target sebesar 66,00, maka capaian kinerja sasaran indikatornya sudah mencapai 128,36%.

Dengan besaran pencapaian tersebut, dipengaruhi beberapa faktor penghambat, antara lain :

1. Implementasi sistem kerja pasca penyelenggaraan penyetaraan jabatan fungsional yang masih perlu didalami agar memberikan gambaran jelas mekanisme dari Kementerian/KL Pembina.
2. Tidak mengunggah sertifikat ketrampilan atau keahlian dalam mendukung peningkatan Indeks Profesionalitas ASN.
3. Masih kurangnya tenaga fungsional di kawasan hinterland seperti tenaga guru, tenaga medis, serta jangkauan pelayanan yang berjauhan dikarenakan pemukiman yang terpencar-pencar antara satu pulau dengan pulau lainnya.

Sedangkan faktor yang menjadi faktor pendukung dalam pencapaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN, sebagai berikut:

1. Kebutuhan ASN terpenuhi setiap tahunnya sesuai dengan standar dan kualifikasi yang dibutuhkan
2. Peningkatan kesejahteraan ASN Kota Batam menjadi perhatian pimpinan
3. Akses terhadap peningkatan kompetensi dan kualifikasi ASN tersedia baik melalui dana Pemerintah Daerah, Provinsi, Pusat maupun Swasta
4. Dukungan kebijakan dan regulasi Pemerintah Kota Batam dalam berbagai aspek untuk meningkatkan profesionalitas ASN.

Solusi serta rekomendasi yang dapat dilakukan dalam menanggulangi faktor penghambat pencapaian capaian kinerja, antara lain:

1. Adanya penilai untuk masing-masing jabatan fungsional di Pemerintah Kota Batam
2. Sosialisasi terhadap perangkat daerah terkait perubahan-perubahan regulasi kepegawaian
3. *Punishment* dan *Reward* yang jelas terhadap individu ASN sehingga dapat meningkatkan indeks profesionalitas ASN.
4. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan PNS dengan melakukan pengiriman Tugas Belajar/Ijin Belajar guna mengikuti jenjang pendidikan formal dan struktural.
5. Mengupayakan penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya melalui analisa jabatan dalam rangka pengembangan semangat kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan produktifitas kerja.

Gambar

Rapat Koordinasi Data Dan Informasi Kepegawaian



Sumber: BKPSDM Kota Batam

5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kota Batam telah pula mengamanatkan pelayanan publik yang berorientasi pada Kepuasan masyarakat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang hasilnya diperoleh

melalui melalui pengukuran kepuasan pelayanan masyarakat. Survey kepuasan pelayanan publik pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Batam, mencakup pelayanan langsung dan tidak langsung kepada masyarakat, terdiri dari 9 unsur meliputi Persyaratan, Sistem, mekanisme dan prosedur, Waktu penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan serta tindak lanjut, Sarana dan Prasarana.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah nilai akhir dari pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat yang merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik menjelaskan definisi dan beberapa unsur penilaian SKM kategori baik dengan nilai interval 76,61 – 88,30.

Untuk pengukuran sesuai RPJMD atas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Pemerintah Kota Batam melakukan dalam tahun 2024 seluruh Perangkat Daerah sudah mendapatkan nilai IKM diatas 83 atau tepatnya diatas target yang diperjanjikan 90,00 dengan realisasi 90,05 sehingga capaian kinerja indikator adalah sebesar 100,05%. Untuk hasil survey kepuasan masyarakat pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam pada tahun 2024 dapat dilihat pada rekapitulasi hasil pengukuran survey kepuasan masyarakat sebagaimana tabel berikut:

Tabel

Rekapitulasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah
Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kota Batam
(Berdasarkan PermenPANRB RI No. 14 Tahun 2017)

No	OPD/ Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									Nilai IKM	Kategori	Jumlah Respon dan	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi Tindak Lanjut Periode Sebelumnya (%)
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9							
1	Inspektorat Daerah Kota Batam	Tahunan (Januari-Juni 2024)	86,84	88,49	88,82	100	88,96	89,14	90,79	91,45	98,68	91,37	A (Sangat Baik)	152	Online	1. Persyaratan 2. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelaksanaan	Persyaratan: Sosialisasi secara bertahap terkait persyaratan. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: Membuat aplikasi terkait registrasi online untuk pelayanan- pelayanan inspektorat. Kompetensi Pelaksanaan: Memberikan pelatihan Pendidikan, bertek terkait pelaksanaan-pekerjaan tugas inspektorat.	100%
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam	Tahunan (Januari-Juni 2024)	92,00	86,13	95,83	99,00	93,83	99,27	87,00	83,50	83,50	91,34	A (Sangat Baik)	150	Manual	1. Sarana dan Prasarana 2. Peningkatan pengaduan, Saran Masukan 3. Perlakuan pelaksanaan	Sarana dan Prasarana: Memperbaharui sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang proses pelayanan. Peningkatan pengaduan, Saran dan Masukan: Selaku cepat tanggap dalam memproses penanganan pengaduan saran dan masukan yang ada di sekretariat DPRD Kota Batam. Perlakuan pelaksanaan: Memberikan pemahaman kepada petugas pelayanan untuk lebih responsif didalam memberikan pelayanan.	-
3	Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan (Januari-Juni 2024)	89,36	95,12	93,09	93,97	90,16	90,16	89,89	87,15	90,69	90,97	A (Sangat Baik)	282	Manual	1. Waktu Penyelesaian 2. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3. Perlakuan Pelaksanaan	Waktu Penyelesaian: penambahan tolak bryan. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur layanan. Perlakuan Pelaksanaan: Memberikan pelatihan khusus terkait service excellenl.	100%
4	Dinas Pendidikan	Tahunan (Januari-Juni 2024)	94,82	94,17	93,37	100	93,12	93,93	94,09	94,17	96,44	94,81	A (Sangat Baik)	309	Online	1. Waktu Penyelesaian 2. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3. Perlakuan Pelaksanaan	Waktu Penyelesaian: - Peningkatan sosialisasi registrasi online. - Penambahan tolak bryan. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: - Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan. - Simplifikasi proses bisnis. Perlakuan Pelaksanaan: Memberikan pelatihan khusus terkait service excellenl	100%
5	Dinas Kesehatan	Tahunan (Januari-Juni 2024)	94,75	85,00	91,00	100	91,25	86,25	83,75	99,00	95,00	91,66	A (Sangat Baik)	367	Online dan Manual	1. Perlakuan Pelaksanaan	Perlakuan Pelaksanaan: - Mengusulkan kepada OPD terkait untuk dikuarterkan dalam pelatihan service excellenl.	100%

																			Mengikuti bimbingan teknis maupun coaching terkait teknis pengelolaan lingkungan hidup.	
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tahunan (Januari-Juni 2024)	86,90	89,21	92,21	98,54	88,61	90,41	89,04	87,16	90,33	90,27	A (Sangat Baik)	331	Online	1. Waktu Penyelesaian 2. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3. Perilaku Pelaksana	itu Penyelesaian: - Peningkatan sosialisasi registrasi online. - Penambahan loket pelayanan. Juk Spesifikasi Jenis Pelayanan: - Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan. - Sederhanakan proses bisnis Waktu Pelaksana: berikan pelatihan khusus terkait service excellent.	100%		
18	Dinas Perhubungan	Tahunan (Januari-Juni 2024)	84,68	84,75	84,41	100	89,84	86,47	92,86	91,21	97,73	90,22	A (Sangat Baik)	364	Online	1. Waktu Penyelesaian 2. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3. Perilaku Pelaksana	itu Penyelesaian: - Peningkatan sosialisasi registrasi "online". - Memaksimalkan jaringan online. Juk Spesifikasi Jenis Pelayanan: - Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan. Persyaratan: Lebih mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat untuk proses pelayanan.	100%		
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tahunan (Januari-Juni 2024)	91,75	90,75	84,75	100	92,00	92,50	88,75	98,50	88,50	92,07	A (Sangat Baik)	253	Online	1. Waktu Penyelesaian 2. Sarana dan Prasarana	Waktu Penyelesaian: - Program Pendaftaran Penduduk. - Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk. - Program Pencatatan Sipil. - Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil. Sarana dan Prasarana: Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah/Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	100%		
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Tahunan (Januari-Juni 2024)	90,25	90,00	88,00	99,00	91,25	90,50	91,25	90,00	87,00	90,72	A (Sangat Baik)	84	Online	1. Waktu Penyelesaian 2. Sarana dan Prasarana 3. Penanganan Pengaduan,Sarana dan Masukan	Waktu Penyelesaian: Mempermudah dan mempercepat jangka waktu penyelesaian pelayanan surat dukungan penyelenggaraan kegiatan. Sarana dan Prasarana: Memberikan kenyamanan pada penyelenggara kegiatan. Penanganan Pengaduan,Sarana dan Masukan: Memberikan respon cepat tanggap dalam menanggapi Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.	100%		
21	Dinas Perumahan Rakyat, Pertanahan dan Perumahan	Tahunan (Januari-Juni 2024)	89,00	89,50	87,00	100	89,25	88,75	89,75	89,50	89,50	90,25	A (Sangat Baik)	165	Online dan Manual	1. Waktu Penyelesaian 2. Kompetensi pelaksana 3. Perilaku Pelaksana	Waktu Penyelesaian: Hasil pelayananyang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kompetensi pelaksana: Memberikan motivasi penghargaan kepada petugas pelayanan. Perilaku Pelaksana:	100%		

[illegible]

35	Kecamatan Batam Kota	Tahunan (Januari-Juni 2024)	87.25	88.50	88.75	99.50	91.25	87.50	90.75	88.00	88.25	89.89	A (Sangat Baik)	357	Online dan Manual	1. Persyaratan 2. Kompetensi pelaksana 3. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Persyaratan: Peningkatan sosialisasi registrasi "online". Kompetensi pelaksana: - Penambahan petugas tiket layanan. - Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas pelayanan. Penanganan pengaduan, saran dan masukan: - Menyediakan kotak saran di setiap pelayanan. - Mensosialisasikan SP4N Lipor.	100%
36	Kecamatan Nongsa	Tahunan (Januari-Juni 2024)	85.25	89.00	90.00	100	89.50	87.75	89.00	87.00	91.75	89.84	A (Sangat Baik)	230	Manual	1. Persyaratan 2. Kompetensi pelaksana 3. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Persyaratan: - Peningkatan sosialisasi ke masyarakat tentang persyaratan pengurusan dokumen. - Penambahan tiket layanan. Kompetensi pelaksana: - Kompetensi pelaksana: memberikan Penanganan pengaduan, saran dan masukan: Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan: Melakukan evaluasi terhadap penanganan pengaduan sarana dan prasarana. Perilaku Pelaksana: Memberikan pelatihan khusus bagi staf yang terkait. Persyaratan: Mempermudah proses pelayanan dalam berkoordinasi.	100%
37	Kecamatan Batu Aji	Tahunan (Januari-Juni 2024)	88.43	85.53	86.33	100	90.28	85.40	87.38	86.70	100	89.91	A (Sangat Baik)	180	Manual	1. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan 2. Perilaku Pelaksana 3. Persyaratan	Persyaratan: Peningkatan sosialisasi ke masyarakat tentang persyaratan pengurusan dokumen. Kompetensi Pelaksana: Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas pelayanan. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan: - Menyediakan kotak saran di setiap pelayanan. - Mensosialisasikan SP4N Lipor.	100%
38	Kecamatan Saguling	Tahunan (Januari-Juni 2024)	87.50	88.25	88.50	100	89.75	87.75	88.75	88.00	90.50	89.80	A (Sangat Baik)	341	Online dan Manual	1. Persyaratan 2. Kompetensi Pelaksana 3. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Persyaratan: Peningkatan sosialisasi ke masyarakat tentang persyaratan pengurusan dokumen. Kompetensi Pelaksana: Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas pelayanan. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan: - Menyediakan kotak saran di setiap pelayanan. - Mensosialisasikan SP4N Lipor.	100%
39	Kecamatan Galang	Tahunan (Januari-Juni 2024)	87.25	87.50	91.00	96.50	91.00	91.00	90.00	89.75	75.25	88.77	A (Sangat Baik)	152	Manual	1. Penanganan, Pengaduan Saran dan Masukan 2. Perilaku Pelaksana 3. Persyaratan	Penanganan, Pengaduan Saran dan Masukan: Melakukan evaluasi terhadap Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan. Perilaku Pelaksana: Memberikan pelatihan khusus bagi staf terkait. Persyaratan: Mempermudah proses pelayanan dalam berkoordinasi.	100%

[illegible]

44	Bagian Tela Penerimaan	Tahunan (Januari-Juni 2024)	88.30	86.50	95.75	100	86.25	81.00	82.50	81.00	96.25	89.74	A (Sangat Baik)	144	Manual	1. Penanganan Pengaduan dan Saran dan Masukan 2. Perilaku Pelaksana 3. Kompetensi Pelaksana	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan: Melakukan evaluasi terhadap penanganan pengaduan saran dan masukan. Perilaku Pelaksana: Memberikan pelatihan khusus staf terkait. Kompetensi Pelaksana: Memberikan pelatihan khusus bagi staf terkait.	100%
45	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Tahunan (Januari-Juni 2024)	3.54	3.66	3.75	4.00	3.50	3.42	3.47	3.51	3.46	89.71	A (Sangat Baik)	152	Manual	1. Perilaku Pelaksana 2. Kompetensi Pelaksana 3. Sarana dan Prasarana	Perilaku Pelaksana: Memberikan pelatihan rutin terhadap perilaku pelaksana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan 3S (Senyum, Sapa, Salam). Kompetensi Pelaksana: Perlu diberikan pelatihan service excellent dalam menangani pelayanan Sarana dan Prasarana: Lebih aktif dalam mengajukan anggaran perbaikan sarana dan prasarana	100%
46	Bagian Hukum	Tahunan (Januari-Juni 2024)	97.00	86.00	84.25	100	91.50	93.75	83.50	82.00	76.25	88.41	A (Sangat Baik)	155	Online	1. Sarana dan Prasarana 2. Penanganan, Pengaduan, dan Sarana Masukan 3. Perilaku Pelaksana	Sarana dan Prasarana: Memintaikan Sarana dan Prasarana Pelayanan yang Nyaman Bagi OPD. Penanganan, Pengaduan, dan Sarana Masukan: Memberikan wadah untuk menerima layanan aduan melalui website IDIH. Perilaku Pelaksana: Memberikan Diklat kepada seluruh pegawai untuk dapat menangani berbagai ku hukum.	-
47																1. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 2. Perayaan 3. Kompetensi Pelaksana	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan: Memberikan respon cepat tanggap dalam menanggapi Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. Perayaan: Menjelaskan bahwa tidak ada syarat khusus dalam pelayanan di Bagian Organisasi. Perilaku Pelaksana: Diadukan pemahaman kepada anata yang ada di bagian organisasi untuk cepat tanggap pada Dinas yang datang baik mengantar surat maupun yang akan berkoordinasi.	80%
48	Bagian Kerjasama	Tahunan (Januari-Juni 2024)	84.30	85.00	84.50	89.75	87.75	91.25	91.25	89.25	94.00	88.56	A (Sangat Baik)	152	Manual	1. Waktu Penyelesaian Sistem, 2. Mekanisme dan Prosedur 3. Persyaratan	Waktu Penyelesaian: Penambahan loket layanan. Sistem, Mekanisme dan Prosedur: Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan. Persyaratan:	100%

																			Memberikan Informasi Persyaratan yang dapat mempermudah pelayanan Kerja Sama.	
49	Bagian Perekonomian	Tahunan (Januari-Juni 2024)	90.30	90.50	90.25	100	90.50	85.25	84.75	85.75	93.25	90.06	A (Sangat Baik)	97	Manual	1. Perilaku Pelaksana 2. Kompetensi Pelaksana 3. Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Perilaku Pelaksana: Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi dengan OPD dan Instansi terkait. Kompetensi Pelaksana: Memberikan pelatihan khusus terkait service excellent. Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan: Melakukan evaluasi terhadap penanganan pengaduan saran dan masukan.	100%		
50	Bagian Administrasi Pembangunan	Tahunan (Januari-Juni 2024)	87.50	90.75	89.25	100	88.50	87.50	86.75	84.50	88.50	90.22	A (Sangat Baik)	144	Manual	1. Penanganan, pengaduan Saran dan Masukan 2. Perilaku Pelaksana 3. Persyaratan	Penanganan, Pengaduan Saran dan Masukan: Melakukan evaluasi terhadap penanganan pengaduan saran dan masukan. Perilaku Pelaksana: Memberikan pelatihan khusus bagi staf terkait Persyaratan: Mempermudah proses pelayanan dalam berkoordinasi.	100%		
51	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Tahunan (Januari-Juni 2024)	87.00	88.75	88.50	98.75	88.75	88.25	90.25	90.50	90.75	90.09	A (Sangat Baik)	205	Manual	1. Persyaratan 2. Kompetensi Pelaksana Waktu 3. Penyelesaian	Persyaratan: Melakukan evaluasi tentang syarat syarat pelayanan. Kompetensi Pelaksana: Melakukan pengarahan dan pelatihan kepada petugas pelayanan. Waktu Penyelesaian: Sosialisasi tentang pelayanan secara online.	100%		
52	Bagian Sumber Daya Alam	Tahunan (Januari-Juni 2024)	90.00	86.00	88.25	99.75	90.75	89.50	86.50	89.50	91.75	90.17	A (Sangat Baik)	144	Manual	1. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Waktu 2. Penyelesaian Perilaku Pelaksana	Sistem, Mekanisme dan Prosedur: Melakukan Evaluasi terhadap Sistem, Mekanisme dan Prosedur. Waktu Penyelesaian: Peningkatan Sarana dan Prasarana pendukung pelayanan public. Perilaku Pelaksana: Memberikan pelatihan khusus terkait pelayanan.	100%		
53	Bagian Umum	Tahunan (Januari-Juni 2024)	96.89	93.20	91.12	97.19	93.64	90.96	90.58	86.73	98.52	90.12	A (Sangat Baik)	175	Manual	1. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 2. Perilaku Pelaksana 3. Kompetensi Pelaksana	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan: Lakukan evaluasi terhadap penanganan pengaduan saran dan masukan. Perilaku Pelaksana: Memberikan pelatihan khusus bagi staf terkait. Kompetensi Pelaksana: Memberikan pelatihan khusus bagi staf terkait.	100%		

54	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tahunan (Januari-Juni 2024)	97.64	96.89	92.04	96.76	87.81	94.90	99.00	97.26	91.04	95.04	A (Sangat Baik)	200	Online	1. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Sarana dan Prasarana: Melakukan pengayaan terhadap layanan. 2. Sarana dan Prasarana: Perbaikan ruang tunggu dan fasilitas ruang pertemuan. 3. Waktu Penyelesaian: Peningkatan kapasitas penggunaan teknologi dan meningkatkan alur brokrasi.	-
55	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahunan (Januari-Juni 2024)	90.26	85.24	87.33	100	89.58	89.93	85.59	89.76	91.84	89.86	A (Sangat Baik)	144	Manual	1. Sistem, Mekanisme dan Prosedur: Melakukan evaluasi terhadap system, Mekanisme dan Prosedur. 2. Waktu Penyelesaian: Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Publik. 3. Perilaku Pelaksana: Memberikan Pelatihan khusus terkait Pelayanan.	100%
56	Kelurahan Tanjung Sengkuang	Tahunan (Januari-Juni 2024)	92.50	90.25	89.25	99.75	90.25	90.25	89.50	89.75	79.00	89.77	A (Sangat Baik)	152	Manual	1. Sarana dan Prasarana: Renovasi Gedung kantor serta penambahan sarana dan prasarana kelurahan. 2. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan. 3. Perilaku Pelaksana: Memberikan pelatihan khusus terkait service excellent.	100%
57	Kelurahan Sungai Jodoh	Tahunan (Januari-Juni 2024)	88.50	88.75	86.50	97.75	88.00	88.00	87.25	91.00	85.50	90.00	A (Sangat Baik)	152	Online	1. Waktu Penyelesaian: Peningkatan sosialisasi registrasi online. 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan. 3. Perilaku Pelaksana: Memberikan pelatihan khusus terkait service excellent.	100%
58	Kelurahan Batu Merah	Tahunan (Januari-Juni 2024)	87.00	89.50	89.75	97.25	87.25	87.25	87.75	97.50	87.25	90.23	A (Sangat Baik)	152	Online	1. Waktu Penyelesaian: Peningkatan sosialisasi registrasi online. 2. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan. 3. Perilaku Pelaksana: Memberikan pelatihan khusus terkait service excellent.	100%
59	Kelurahan Kampung Seraya	Tahunan (Januari-Juni 2024)	88.80	92.50	90.00	99.00	89.25	87.50	89.00	86.00	85.50	89.74	A (Sangat Baik)	152	Online	1. Waktu Penyelesaian: Peningkatan sosialisasi registrasi online. 2. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan. 3. Perilaku Pelaksana: Memberikan pelatihan khusus terkait service excellent.	100%

69	Kelurahan Teluk Tereng	Tahunan (Januari-Juni 2024)	96.10	90.95	88.65	100.33	88.33	87.40	83.80	91.80	82.40	89.78	A (Sangat Baik)	151	Manual	1. Sarana dan Prasarana 2. Perilaku Pelaksana 3. Kompetensi Pelaksana	Sarana dan Prasarana: Melakukan evaluasi terhadap penambahan sarana dan prasarana (meja dan kursi). Perilaku Pelaksana: Melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kompetensi Pelaksana: Melakukan peningkatan kompetensi kemampuan petugas urtik pelayanan masyarakat.	100%
70	Kelurahan Balai Pormai	Tahunan (Januari-Juni 2024)	88.80	83.75	85.75	99.50	88.25	88.50	88.75	98.50	88.00	90.48	A (Sangat Baik)	90.48	Online	1. Waktu penyelesaian 2. Sarana dan Prasarana 3. Produk spesifikasi jenis pelayanan	Waktu penyelesaian: - Penguatan pengadaan layanan online. - Penambahan petugas loket layanan. Sarana dan Prasarana: Penambahan petugas loket layanan. Produk spesifikasi jenis pelayanan: Membuat kartu kendali pelayanan.	100%
71	Kelurahan Bellan	Tahunan (Januari-Juni 2024)	98.05	83.75	79.00	100.25	96.00	96.00	79.75	80.00	98.00	90.08	A (Sangat Baik)	90.08	Manual	1. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 2. Perilaku Pelaksana	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: - Memberikan Sosialisasi terkait persyaratan pengurusan di kelurahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dikelurahan. - Penambahan loket layanan. - Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan. - Simplifikasi proses bisnis. Perilaku Pelaksana: Memberikan pelatihan khusus terkait service excellent.	100%
72	Kelurahan Taman Balai	Tahunan (Januari-Juni 2024)	97.70	83.83	98.18	99.83	97.83	96.83	97.50	88.83	98.33	96.88	A (Sangat Baik)	150	Manual	1. Penanganan pengaduan saran dan masukan 2. Kompetensi pelaksana 3. Persyaratan	Penanganan pengaduan saran dan masukan: Melakukan evaluasi terhadap penanganan pengaduan saran dan masukan Kompetensi pelaksana: Mengikuti pelatihan khusus bagi staf terkait Persyaratan: Melaksanakan rapat koordinasi	100%
73	Kelurahan Sukajadi	Tahunan (Januari-Juni 2024)	85.53	87.99	91.28	100.32	88.41	94.80	89.80	86.84	86.35	90.06	A (Sangat Baik)	152	Manual	1. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 2. Sarana dan Prasarana 3. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: Memberikan sosialisasi terkait persyaratan pengurusan di kelurahan sesuai standard pelayanan minimal (SPM) di Kelurahan. Sarana dan Prasarana: Mendata dan menganalisa kebutuhan sarana dan prasarana kantor kelurahan sukajadi. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan: Memaksimalkan penggunaan kotak pengaduan saran dan masukan.	100%
74	Kelurahan Sungai Panas	Tahunan (Januari-Juni 2024)	90.09	85.40	87.38	94.60	90.28	93.30	89.38	83.95	93.30	90.08	A (Sangat Baik)	297	Manual	1. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem, Mekanisme dan Prosedur: - memberikan sosialisasi terkait persyaratan pengurusan di kelurahan sesuai dengan standar pelayanan minimal dikelurahan.	100%

79	Kelurahan Bukit Tempayan	Tahunan (Januari-Juni 2024)	90,75	90,57	89,45	100	87,65	87,97	87,50	88,47	87,82	89,94	A (Sangat Baik)	154	Manual	1. Perilaku Pelaksanaan 2. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3. Kompetensi Pelaksanaan	Perilaku Pelaksana: Melakukan perbaikan komunikasi yang lebih lagi terhadap konsumen. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: Hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kompetensi Pelaksana: Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.	90%
80	Kelurahan Buliang	Tahunan (Januari-Juni 2024)	89,68	85,81	85,65	100	92,42	91,29	88,39	90,81	84,35	89,73	A (Sangat Baik)	155	Manual	1. Waktu Penyelesaian 2. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3. Perilaku Pelaksanaan	Waktu Penyelesaian: Peningkatan kualitas sarana dan prasarana. Produk spesifikasi jenis Pelayanan: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan. Perilaku Pelaksana: Memberikan pelatihan khusus terkait service excellent.	60%
81	Kelurahan Kbing	Tahunan (Januari-Juni 2024)	91,40	92,20	86,05	100	83,45	83,78	92,20	82,95	89,28	88,94	A (Sangat Baik)	154	Manual	1. Waktu Penyelesaian 2. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3. Perilaku pelaksanaan	Waktu Penyelesaian: Peningkatan kualitas sarana dan prasarana. Produk Spesifikasi Jenis pelayanan: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur layanan. Perilaku pelaksanaan: Memberikan pelatihan khusus terkait service excellent.	60%
82	Kelurahan Tanjung Urcang	Tahunan (Januari-Juni 2024)	88,05	91,59	86,46	99	86,46	87,44	86,83	88,29	90,98	89,54	A (Sangat Baik)	205	Manual	1. Waktu penyelesaian 2. Produk spesifikasi jenis pelayanan 3. Perilaku pelaksanaan	Waktu penyelesaian: - Peningkatan sosialisasi registrasi online. - Penambahan loket layanan. Produk spesifikasi jenis pelayanan: Pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan spesifikasi jenis pelayanan terhadap prosedur pelayanan. Perilaku pelaksanaan: Memberikan pelatihan khusus terkait service excellent.	-
83	Kelurahan Tembesi	Tahunan (Januari-Juni 2024)	87,97	89,60	91,00	100	89,60	87,38	89,49	86,57	87,62	89,82	A (Sangat Baik)	214	Manual	1. Sarana dan Prasarana 2. Penanganan pengaduan sarandan masukan 3. Kompetensi pelaksanaan	Sarana dan Prasarana: Peningkatan saran dan prasarana. Penanganan pengaduan saran dan masukan: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan pengaduan. Kompetensi pelaksanaan: Memberikan pelatihan khusus terkait service excellent.	100%

84	Kelurahan Sagulung Kola	Tahunan (Januari-Juni 2024)	84,71	90,43	90,14	100,43	88,43	94,00	85,14	84,71	90,00	89,73	A (Sangat Baik)	175	Manual	1. Persyaratan pengaduan, saran dan masukan 2. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 3. Perilaku pelaksana	Persyaratan: Peningkatan sosialisasi registrasi. Penanganan pengaduan, saran dan masukan: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan. Perilaku pelaksana: Memberikan pelatihan khusus terkait service excellent.	100%
85	Kelurahan Sungai Binti	Tahunan (Januari-Juni 2024)	80,80	86,88	90,33	100,26	88,26	92,13	88,40	87,15	87,43	89,04	A (Sangat Baik)	181	Manual	1. Persyaratan produk spesifikasi jenis pelayanan 2. Penanganan pengaduan dan saran Masukan	Persyaratan: Peningkatan sosialisasi masyarakat tentang Persyaratan pengurusan Dokumen. Produk spesifikasi jenis pelayanan: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan. Penanganan pengaduan saran dan Masukan: Menyediakan kotak saran di loket pelayanan.	100%
86	Kelurahan Sungai Lekop	Tahunan (Januari-Juni 2024)	85,69	84,05	84,87	99,01	87,83	87,34	88,82	86,84	95,05	88,94	A (Sangat Baik)	152	Manual	1. Waktu penyelesaian 2. System, mekanisme dan prosedur pelayanan 3. Perilaku pelaksana	Waktu penyelesaian: - Peningkatan sosialisasi registrasi online - Penambahan loket pelayanan. Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan: - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan. - Simplifikasi proses bisnis. Perilaku pelaksana: Memberikan pelatihan khusus terkait service excellent.	80%
87	Kelurahan Sungai Langkai	Tahunan (Januari-Juni 2024)	92,81	92,08	87,34	91,89	91,29	91,75	92,28	91,09	89,71	90,25	A (Sangat Baik)	379	Manual	1. Waktu penyelesaian 2. Sarana dan parasarana 3. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Waktu penyelesaian: Peningkatan sosialisasi registrasi online. Sarana dan parasarana: Melakukan monitoring evaluasi terhadap sarana Penanganan pengaduan, saran dan masukan: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap layanan pengaduan.	100%
88	Kelurahan Sungai Pelunggut	Tahunan (Januari-Juni 2024)	82,73	86,88	90,33	88,54	92,82	92,82	91,16	87,15	87,43	89,67	A (Sangat Baik)	181	Manual	1. Persyaratan mekanisme dan prosedur 2. System mekanisme dan prosedur 3. Penanganan pengaduan dan saran Masukan	Persyaratan: Peningkatan sosialisasi ke masyarakat tentang persyaratan pengurusan dokumen. System mekanisme dan prosedur: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan. Penanganan pengaduan saran dan Masukan: Menyediakan kotak saran di loket pelayanan.	100%
89	Kelurahan Sianjung	Tahunan (Januari-Juni 2024)	87,50	91,75	76,75	89,50	89,00	89,00	90,75	77,50	98,00	88,97	A (Sangat Baik)	100	Manual	1. waktu penyelesaian 2. sarana Prasarana	Waktu penyelesaian: - Menambah jadwal pengantaran berkas ke kolar batiari menjadi seminggu 1 kali. - Penambahan personel petugas pelayanan. Sarana dan Prasarana: - Peningkatan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dengan potensi yang ada.	100%

118	Kelurahan Pulau Terong	Tahunan (Januari-Juni 2024)	94.23	90.38	88.45	100	89.15	81.25	78.85	87.98	82.21	88.84	A (Sangat Baik)	52	Manual	1. Sarana dan Prasarana 2. Kompetensi Pelaksana 3. Perilaku Pelaksana	Sarana dan Prasarana: Meningkatkan Sarana dan Prasarana di ruang pelayanan. Kompetensi Pelaksana: Memberikan pelatihan khusus terkait service excellent. Perilaku Pelaksana: Memberikan pelayanan lebih prima dengan memberikan sikap senyum, sapa, salam kepada masyarakat.	100%
119	Kelurahan Pecong	Tahunan (Januari-Juni 2024)	88.98	83.05	86.02	100	97.88	84.32	83.05	90.68	84.32	88.70	A (Sangat Baik)	59	Manual	1. Sarana dan Prasarana 2. Kompetensi Pelaksana 3. Perilaku Pelaksana	Sarana dan Prasarana: Meningkatkan Sarana dan Prasarana di ruang pelayanan. Kompetensi Pelaksana: Memberikan pelatihan khusus terkait service excellent. Perilaku Pelaksana: Memberikan pelayanan lebih prima dengan memberikan sikap senyum, sapa, salam kepada masyarakat.	100%
120	UPTD Instalasi Farmasi	Tahunan (Januari-Juni 2024)	92.58	89.03	88.53	100	88.85	87.85	90.70	88.68	86.83	90.24	A (Sangat Baik)	148	Manual	1. Sarana dan Prasarana 2. Kompetensi Pelaksana 3. Waktu Penyelesaian	Sarana dan Prasarana: Menyediakan kursi tambahan apabila terjadi penumpukan pelanggan/tamu di saat jam pelayanan. Kompetensi Pelaksana: Melakukan pelatihan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi di Instalasi Farmasi. Waktu Penyelesaian: Memberikan sosialisasi terkait penggunaan sistem tracking order untuk dapat memantau proses pelayanan.	100%
121	UPTD Puskesmas Belakang Padang	Tahunan (Januari-Juni 2024)	95.5	84.33	79.60	99.20	89.20	96.60	89.40	92.88	76.68	89.17	A (Sangat Baik)	375	Online	1. Waktu Penyelesaian 2. Sarana dan Prasarana 3. Sistem Mekanisme dan Prosedur	Waktu Penyelesaian: - Melakukan update Puskesmas Belakang Padang Tahun 2024 dan Update Rencana Kebutuhan pegawai Tahun 2024. - Penambahan petugas dari ruangan lain pada saat pasien ramai. - Mengatur jadwal petugas sedemikian rupa agar di ruangan poli, jumlah petugas mencukupi. - Melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada pasien tentang sistem Puskesmas online. Sarana dan Prasarana: - Membuat pengisian pengadaan sarana dan prasarana melalui dana yang bersumber dari	100%

125	UPTD Puskesmas Galang	Tahunan (Januari-Juni 2024)	89,00	90,25	89,75	90,50	85,25	94,75	91,00	82,75	91,00	90,11	A (Sangat Baik)	341	Manual	1. Sarana dan Prasarana 2. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3. Persyaratan	Sarana dan Prasarana: Lakukan evaluasi terhadap penggunaan sarana dan prasarana. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: Lakukan evaluasi terhadap Kesesuaian Produk Pelayanan Antara yang Tercantum dan Standar Pelayanan. Persyaratan: Mempermudah proses pelayanan dalam berkoordinasi.	100%
126	UPTD Puskesmas Sekupang	Tahunan (Januari-Juni 2024)	90,88	88,94	87,38	95,56	89,13	87,50	89,44	88,75	91,81	89,84	A (Sangat Baik)	400	Manual	1. Kecepatan Pelayanan 2. Kompetensi Petugas	Kecepatan Pelayanan: Reorganisasi petugas pendaftaran. Kompetensi Petugas: Akan membuat standar pelayanan Nurse Station.	100%
127	UPTD Puskesmas Bakel Permai	Tahunan (Januari-Juni 2024)	90,8	91,23	87,90	89,65	90,00	90,55	90,45	90,28	87,73	89,75	A (Sangat Baik)	442	Manual	1. Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan 2. Waktu Penyelesaian 3. Biaya/tarif	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan: Memberikan respon cepat tanggap kritik/saran yang diberikan dengan menempel di papan informasi ataupun di media social. Dan memberikan akses informasi yang mudah bagi masyarakat. Waktu Penyelesaian: Memberikan sosialisasi alur pelayanan baru berupa pelayanan ILP. Biaya/tarif: Melakukan sosialisasi kepada public terhadap perubahan retribusi BLUD sesuai PERwako Nomor 70 Tahun 2024.	100%
128	UPTD Puskesmas Sel. Pancur	Tahunan (Januari-Juni 2024)	97,8	87,75	85,75	97,00	85,50	85,75	85,75	97,00	88,75	90,02	A (Sangat Baik)	388	Online	1. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 2. Kompetensi Pelaksanaan 3. Perilaku Pelaksanaan	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: Membuat informasi layanan yang ada di Puskesmas Sel. Pancur. Kompetensi Pelaksanaan: Pelatihan – pelatihan pada Pegawai. Perilaku Pelaksanaan: Melakukan sosialisasi dan evaluasi kepada pegawai terkait mutu pelayanan.	100%

129	UPTD Puskesmas Tanjung Sengkuang	Tahunan (Januari-Juni 2024)	88,8	88,45	86,25	86,50	89,25	100	88,50	86,30	94,50	89,98	A (Sangat Baik)	379	Online	1. Waktu Penyelesaian 2. Sarana dan Prasarana 3. Biaya/Tarif	Waktu Penyelesaian: Peningkatan sosialisasi registrasi "online". Sarana dan Prasarana: Pengadaan akses. Biaya/Tarif: Pengaluan usulan tinjauan biaya pada rapat Kapsus – KTU.	100%
130	UPTD Puskesmas Sambau	Tahunan (Januari-Juni 2024)	90,95	90,20	90,58	92,21	91,08	89,45	88,69	88,94	88,32	89,96	A (Sangat Baik)	450	Manual	1. Perilaku Pelaksana 2. Sarana dan Prasarana	Perilaku Pelaksana: - Memberikan pelatihan atau pengarahan kepada petugas sesuai dengan bidang masing-masing. - Memberikan pelatihan khusus terkait service excellent. Sarana dan Prasarana: - Menambah kursi di ruang pelayanan. - Perbaikan tempat parkir.	100%
131	UPTD Puskesmas Lubuk Baja	Tahunan (Januari-Juni 2024)	87,82	93,75	97,60	89,19	91,99	87,66	83,97	86,54	92,95	90,16	A (Sangat Baik)	150	Manual	1. Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana: Perubahan kursi tunggu dan tempat ngecharge handphone	100%
132	UPTD Puskesmas Sei. Lekop	Tahunan (Januari-Juni 2024)	90,3	90,58	89,85	90,33	89,80	90,33	90,25	90,65	90,45	90,19	A (Sangat Baik)	377	Online	1. Waktu Penyelesaian 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Perilaku Pelaksana	Waktu Penyelesaian: - Peningkatan sosialisasi registrasi "online". - Penambahan loket layanan. Sistem Mekanisme dan Prosedur: - Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan. - Sempurnakan proses bisnis. Perilaku Pelaksana: Memberikan pelatihan khusus terkait service excellent.	100%
133	UPTD Puskesmas Bulang	Tahunan (Januari-Juni 2024)	89,07	91,06	85,43	92,72	90,23	90,31	92,63	86,92	91,72	90,01	A (Sangat Baik)	302	Manual	1. Waktu Penyelesaian 2. Sarana dan Prasarana 3. Persyaratan	Waktu Penyelesaian: Selalu mengedepankan kecepatan pelayanan tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Sarana dan Prasarana: - Melengkapi dan menambah sarana dan prasarana yang kurang. - Menambah daya listrik agar alat berfungsi maksimal. Persyaratan: Petugas pendaftaran memberikan informasi yang lebih jelas tentang persyaratan yang perlu dibawa pasien.	100%

134	UPTD Puskesmas Bolania	Tahunan (Januari-Juni 2024)	91. 5	91. 25	91. 08	87. 34	91. 89	92. 50	91. 50	91. 25	91. 00	91. 25	91. 00	92. 25	91. 75	90.84	A (Sangat Baik)	377	Online	1. Waktu Penyelesaian 2. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3. Perilaku Pelaksana	Waktu Penyelesaian: - Peningkatan sosialisasi registrasi online. - Penambahan loket pelayanan. Juk Spesifikasi Jenis Pelayanan: - Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan. Taku Pelaksana: - berikan pelatihan khusus terkait service excellent.	80%
135	UPTD Puskesmas Sei Langkai	Tahunan (Januari-Juni 2024)	92. 81	92. 08	92. 08	87. 34	91. 89	91. 29	91. 75	92. 28	91. 09	91. 09	89. 71	90.25	A (Sangat Baik)	379	Online	1. Waktu Penyelesaian 2. Sarana dan Prasarana 3. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	Waktu Penyelesaian: Peningkatan sosialisasi registrasi "online". Sarana dan Prasarana: Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap sarana. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan: Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap layanan pengaduan.	100%		
136	UPTD Puskesmas Tiban Baru	Tahunan (Januari-Juni 2024)	88. 8	90. 50	89. 00	90. 75	90. 25	90. 50	92. 50	91. 50	91. 00	88. 50	90.29	A (Sangat Baik)	368	Online	1. Sarana dan Prasarana 2. Persyaratan 3. Waktu Penyelesaian	Sarana dan Prasarana: Dilakukan Pemassangan Tirai di Teras Laboratorium. Persyaratan: Sosialisasi cara pendaftaran yang benar dan dirasakan sangat mudah. Waktu Penyelesaian: Peningkatan sosialisasi registrasi "online" agar pasien lebih cepet dilayani.	100%			
137	UPTD Puskesmas Tanjung Buntung	Tahunan (Januari-Juni 2024)	91. 25	91. 00	87. 75	89. 75	91. 00	90. 75	90. 75	90. 75	91. 00	87. 75	90.02	A (Sangat Baik)	372	Online	1. Biaya/Tarif 2. Waktu Penyelesaian 3. Sarana dan Prasarana	Biaya/Tarif: Melakukan sosialisasi kepada publik terhadap perubahan retribusi BLUD sesuai Perwako Nomor 45 tahun 2021. Waktu Penyelesaian: Melakukan sosialisasi terhadap antrian online kepada pelanggan agar waktu tunggu pelayanan lebih singkat. Sarana dan Prasarana: Pengusulan di perencanaan untuk penambahan sarana dan prasarana.	100%			

138	UPTD Puskesmas Kampung Jabi	Tahunan (Januari-Juni 2024)	86. 7	89. 30	90. 13	92. 93	91. 60	93. 43	90. 13	89. 80	93. 58	89.94	A (Sangat Baik)	152	Online	1. Persyaratan dan Prasarana	Persyaratan: Mempermudah pemberian persyaratan kepada masyarakat khusus nya untuk kaum lansia. Sarana dan Prasarana: Menambah fasilitas kursi di ruang tunggu dan menambahkan stiker prioritas khusus lansia dan ibu hamil.	100%
139	UPTD Puskesmas Rempang Cale	Tahunan (Januari-Juni 2024)	87. 93	89. 45	87. 28	89. 96	89. 16	91. 91	90. 61	88. 06	89. 88	89.36	A (Sangat Baik)	346	Manual	1. Waktu Penyelesaian 2. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3. Peningkatan Pengaduan Saran dan Masukan	Waktu Penyelesaian: - Peningkatan sosialisasi standar waktu pelayanan kepada pasien. - Penambahan petugas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: - Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan. - Sempurnakan proses Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan: Menempatkan petugas khusus pengaduan dan menyediakan kotak aduan.	87%
140	UPTD Puskesmas Tanjung Uhang	Tahunan (Januari-Juni 2024)	89. 67	90. 67	88. 67	87. 67	88. 67	90. 83	91. 17	89. 83	89. 83	89.87	A (Sangat Baik)	150	Manual	1. Biaya/Tarif 2. Waktu Penyelesaian 3. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Biaya/Tarif: Melakukan sosialisasi biaya/tarif mencantumkan informasi tentang biaya/tarif pelayanan puskesmas terjangkau di social media (facebook, Instagram, web, dan email). Waktu Penyelesaian: Menambahkan jumlah petugas pelayanan peningkatan sosialisasi terkait dengan waktu pelayanan sesuai dengan SOP. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: Meningkatkan sosialisasi produk layanan puskesmas terjangkau melalui media elektronik dan non elektronik.	100%
141	UPTD Puskesmas Mentarau	Tahunan (Januari-Juni 2024)	90. 07	91. 87	88. 87	90. 2	89. 32	90. 8	92. 4	88. 2	94. 2	90.47	A (Sangat Baik)	375	Online	1. Sarana dan Prasarana 2. Waktu Penyelesaian 3. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Sarana dan Prasarana: Penambahan dental diagnostic kit. Waktu Penyelesaian: Penambahan Pos dan Petugas Screening. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: Sosialisasi jenis pelayanan yang ada di UPTD Puskesmas Mentarau.	85%

142	UPTD Pengelola Air Bersih	Tahunan (Januari-Juni 2024)	93.00	92.50	91.75	84.00	86.00	92.50	95.00	85.00	97.50	91.01	A (Sangat Baik)	365	Manual	1. Biaya/Tarif Pengaduan dan Saran Masukan 2. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Biaya/Tarif: Melakukan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) terkait biaya retibusi BLUD sesuai perwako No.46 Tahun 2017 kepada masyarakat melalui bktel pelayanan dan kanal sosial media. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan: Membangun call center dan whatsapp center sebagai wadah kontak aduan yang dapat dihubungi masyarakat. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: Meningkatkan kualitas air yang di distribusikan masyarakat.	-
143	UPTD Pengawasan dan Pengendalian Gedung dan Monara	Tahunan (Januari-Juni 2024)	94.32	89.77	90.91	100.00	89.77	84.66	85.80	91.48	88.07	90.53	A (Sangat Baik)	44	Manual	1. Kompetensi Pelaksana 2. Perilaku Pelaksana 3. Sarana dan Prasarana	Kompetensi Pelaksana: Mengadakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia. Perilaku Pelaksana: Meningkatkan Kompetensi dan Kualitas Pelayanan Dengan mendorong dan memofikasi Pelugas Pelayanan Melalui Pendidikan berkelanjutan dan pelatihan. Sarana dan Prasarana: Menyediakan Ruang tunggu Pelayanan yang layak dan nyaman.	100%
144	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Nilara Surti	Tahunan (Januari-Juni 2024)	92.50	92.50	88.75	93.50	90.75	93.00	92.50	92.00	90.00	90.78	A (Sangat Baik)	152	Manual	1. Waktu Penyelesaian 2. Sarana dan Prasarana 3. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Waktu Penyelesaian: Meningkatkan pemahaman terkait dengan pelayanan yang diberikan sehingga bias dilaksanakan secara cepat efektif dan efisien. Sarana dan Prasarana: Peningkatan dan perbaikan sarana/prasarana. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: - Melaksanakan inform consent terhadap penerima layanan terkait dengan layanan yang akan diberikan. - Melaksanakan pendalaman permasalahan secara seksama bagi setiap klien.	100%
145	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Tahunan (Januari-Juni 2024)	89.03	88.18	89.68	100.00	90.50	93.83	94.50	88.83	83.18	90.80	A (Sangat Baik)	152	Manual	1. Sarana dan Prasarana 2. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	Sarana dan Prasarana: Peningkatan dan Perbaikan sarana/Prasarana. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan: Memberikan pelatihan khusus terkait penanganan pengaduan sesuai jenis kasus.	66%

146	UPTD Rumah Polong Hewan dan Unggas	Tahunan (Januari-Juni 2024)	76.4	91.98	78.93	81.78	97.33	96.98	93.40	95.53	99.10	91.07	A (Sangat Baik)	159	Manual dan Online	1. Persyaratan 2. Waktu 3. Penyelesaian Biaya/Tarif	100%	Persyaratan: Memberikan edukasi tentang pentingnya persyaratan guna mengetahui Rwayat Status Kesehatan Hewan Ternak untuk Meminimalisir terjangkitnya Penyakit Hewan Menular Strategis dan membuat aplikasi pendaftaran online pemotongan hewan ternak dan mengintegrasikan dengan web lalu lintas ternak sehingga memudahkan pelaku usaha melengkapi dokumen persyaratan dari daerah asal. Waktu Penyelesaian: Melakukan evaluasi kembali kepada petugas dalam memberikan pelayanan dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi waktu pelayanan. Biaya/Tarif: Sosialisasi Ke Pengguna Jasa RPH terlintang Kesesuaian Tarif Jasa Usaha Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak Sesuai dengan benefit yang diterima oleh Pengguna Jasa, karena fasilitas dan sarana prasarana yang dipergunakan untuk pelayanan sudah modern dan memenuhi standart teknis.
147	UPTD Pusat Kesehatan Hewan	Tahunan (Januari-Juni 2024)	90.10	89.00	90.87	88.05	91.20	89.30	90.57	91.35	89.92	89.96	A (Sangat Baik)	159	Manual	1. Biaya/Tarif 2. Kompetensi Pelaksana 3. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	85%	Biaya/Tarif: Tarif Retribusi sudah ditetapkan dalam Perda Retribusi, tidak dapat diubah (sesuai kewajiban biaya, tidak dapat digratiskan). Kompetensi Pelaksana: Meningkatkan kemampuan petugas pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: Melakukan perbaikan Produk pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
148	UPTD Pelayanan Bidang Perikanan	Tahunan (Januari-Juni 2024)	95.00	95.00	92.50	92.50	100.00	92.50	95.00	95.00	100.00	95.17	A (Sangat Baik)	400	Online	1. Waktu Penyelesaian 2. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3. Perilaku Pelaksana	100%	Waktu Penyelesaian: - Peningkatan sosialisasi registrasi "online". - Penambahan loket layanan dan Personil ASN. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap Penggunaan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi dan prosedur pelayanan. Perilaku Pelaksana: Memberikan pelatihan Khusus terkait pelayanan Prima Kepada Nelayan Kecil Kota Batam.

149	UPTD Metrologi Legal	Tahunan (Januari-Juni 2024)	91.53	87.50	79.52	100	87.57	93.93	90.47	84.68	82.06	88.49	A (Sangat Baik)	354	Online	1. Waktu Penyelesaian 2. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3. Perilaku Pelaksana	Waktu Penyelesaian: - Peningkatan sosialisasi registrasi "online". - Penambahan loket layanan. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan. - Sempurnakan proses bisnis. Perilaku Pelaksana: - Memberikan pelatihan khusus terkait service excellent.	-
150	UPTD TPA Telaga Pungkur	Tahunan (Januari-Juni 2024)	91.80	90.75	85.00	98.25	89.25	83.25	82.50	95.00	84.25	88.80	A (Sangat Baik)	50	Manual	1. Perilaku Pelaksana 2. Kompetensi Pelaksana 3. Sarana dan Prasarana	Perilaku Pelaksana: - Memberikan pelatihan kepada petugas pelaksana sehingga memaksimalkan lagi sikap didalam melakukan pelayanan Kompetensi Pelaksana: - Memberikan pelatihan khusus terkait service excellent Sarana dan Prasarana: - Menambah sarana dan prasarana (penambahan kursi di loket tunggu)	100%
151	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	Tahunan (Januari-Juni 2024)	95.83	89.58	93.75	97.92	92.71	91.67	88.54	83.33	83.33	90.74	A (Sangat Baik)	24	Manual	1. Pengaduan dan Saran Masukan 2. Sarana dan Prasarana 3. Perilaku Pelaksana	Pengaduan Saran dan Masukan: - Layanan pengaduan dan kotak saran. Sarana dan Prasarana: - Peningkatan sarana dan prasarana. Perilaku Pelaksana: - Pelatihan pelayanan public.	75%
152	UPTD Pelayanan Parkir	Tahunan (Januari-Juni 2024)	84.68	84.75	84.41	100	89.84	86.47	92.86	91.21	97.73	90.22	A (Sangat Baik)	364	Manual	1. Waktu Penyelesaian 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Persyaratan	Waktu Penyelesaian: - Peningkatan sosialisasi melalui Media Online dan Radio. - Memaksimalkan media online dan radio. Sistem Mekanisme dan Prosedur: - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan. Persyaratan: - Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat untuk proses pelayanan.	100%

153	UPTD Trans Batam	Tahunan (Januari-Juni 2024)	95. 55	93. 64	88. 91	99. 36	89. 90	94. 14	89. 55	88. 63	91. 10	92.31	A (Sangat Baik)	354	Online	1. Penanganan pengaduan saran dan masukan 2. Waktu Penyelesaian 3. Perilaku Pelaksana	Penanganan pengaduan saran dan masukan: Menambahkan informasi nomor pengaduan di armada bus. Waktu Penyelesaian: Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan. Perilaku Pelaksana: Memberikan pembinaan kepada petugas terkait layanan.	100%
154	UPTD Museum Batam Raja Ali Haji	Tahunan (Januari-Juni 2024)	94. 8	93. 75	100	100	100	73. 50	89. 00	83. 75	58. 75	90.03	A (Sangat Baik)	150	Manual	1. Sarana dan Prasarana 2. Kompetensi Pelaksana 3. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	Sarana dan Prasarana: Revitalisasi Gedung pada titik tertentu yang ada di Museum Batam Raja Ali Haji. Kompetensi Pelaksana: Lakukan Pelatihan terhadap pemandu yang disediakan oleh Museum. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan: Membuat kotak saran manual/online agar mudah mengakses untuk Pengaduan saran dan Masukan.	100%
155	UPTD Pengelolaan Rusunawa	Tahunan (Januari-Juni 2024)	90. 0	89. 03	88. 43	89. 30	90. 85	91. 38	89. 25	88. 38	91. 90	89.74	A (Sangat Baik)	374	Manual	1. Waktu Penyelesaian 2. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3. Perilaku Pelaksana	Waktu Penyelesaian: - Peningkatan sosialisasi ke Warga Hunian Rusunawa - Pendaftaran pengaduan by barcode. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: - Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur Pengaduan Warga Hunian. - Simplifikasi proses bisnis. Perilaku Pelaksana: Reaksi cepat dan tanggap.	85%
156	UPTD Kebun Raya Batam	Tahunan (Januari-Juni 2024)	98. 5	97. 75	84. 25	65. 25	65. 5	56. 75	59. 69	122. 5	95	90.30	A (Sangat Baik)	120	Manual	Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana: - Lakukan evaluasi terhadap Tempat makan dan restaurant. - Lakukan evaluasi terhadap Tempat ibadah. - Lakukan evaluasi terhadap Toilet.	100%

157	UPTD Pengelolaan Dana Bergulir	Tahunan (Januari-Juni 2024)	89. 3	85. 75	87. 25	100	88. 00	88. 25	88. 50	87. 00	86. 75	90.00	A (Sangat Baik)	104	Online	1. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Persyaratan 4. Perilaku 5. Produk 6. Waktu Penyelesaian	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan: Menyediakan sumber daya manusia yang bertugas sebagai admin chat whatsapp. Tugas administrator tidak hanya berfokus pada menjawab pertanyaan atau keluhan tetapi juga melakukan tindak lanjut atau follow up jika nasabah mengalami kesulitan atau kendala. Follow up, UPTD- Pengelolaan dana bergulir akan meminta nasabah untuk memberikan review google, dengan harapan semakin banyak masyarakat bias mengenal layanan dari UPTD-PEngelolaan Dana Bergulir. Sistem Mekanisme dan Prosedur: Menyediakan whatsapp Business dan melengkapi semua fitur bisnis seperti katalog dan menggunakan fitur balas cepat untuk menjawab pertanyaan dan kendala nasabah diharapkan nasabah bias mendapatkan informasi secara detail walaupun tidak pada jam kerja. Persyaratan: Memberikan informasi secara lenh jelas dan detail tentang persyaratan pengajuan dana dan siapa saja sasaran yang dituju. Perilaku Pelaksana: Membekali petugas pemahaman tentang pelayanan prima serta berusaha memberikan nilai tambah dalam setiap pelayanan. Nilai tambah yang dimaksud seperti ucapan selamat ulang tahun untuk nasabah sehingga layanan semakin dirasakan masyarakat. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: Menyediakan pilihan pinjaman Syariah, supaya nasabah tidak terbebani dengan bunga atau riba, pilihan pinjaman ini tentu akan meringankan para pelaku usaha karena besaran pengembalian dana berdasarkan akad. Waktu Penyelesaian: Menyediakan fitur chatbot untuk menjawab kendala nasabah secara umum untuk mempersingkat penyelesaian masalah pada nasabah di luar hari dan jam kerja.	100%
158	UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM	Tahunan (Januari-Juni 2024)	87. 98	86. 55	83. 69	95. 48	86. 67	88. 57	91. 31	98. 69	90. 71	89.96	A (Sangat Baik)	210	Manual	1. Sarana dan Prasarana 2. Produk 3. Sistem Mekanisme dan Prosedur	Sarana dan Prasarana: UPTD PLUT KUMKM berupaya melengkapi sarana dan prasarana demi memperbaiki kualitas pelayanan. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: Memperbaiki pelayanan yang diberikan yaitu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan agar kenyamanan masyarakat tetap terjaga. Sistem Mekanisme dan Prosedur: UPTD PLUT KUMKM berupaya menyediakan pelayanan yang lebih baik terutama dalam hal	100%

Jika melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik, trend tingkat kepuasan penerima layanan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dapat dilihat melalui grafik berikut:



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Batam

Berdasarkan table di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Juni 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM yaitu 90,05 di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dengan menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga 2024.
2. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak 43 Perangkat Daerah, 40 UPTD Dibawah Dinas, 64 Kelurahan dan 12 Bagian Sekretariat Daerah Kota Batam telah menyampaikan

laporannya.

3. Dari seluruh Perangkat Daerah yang telah melaporkan hasil SKM, telah terdapat rencana tindaklanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.

Dalam Pelaksanaan dan Pencapaian Indikator Sasaran Tersebut terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi, diantaranya :

1. Kurangnya pemahaman terhadap pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat yang hasil akhirnya ke Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia baik kualitas maupun kuantitas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja penyelenggara pelayanan
3. Penetapan standar pelayanan belum sepenuhnya diimplementasikan pada Unit Kerja penyelenggara pelayanan
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan yang ada pada sebagian Perangkat Daerah/Unit Kerja penyelenggara pelayanan publik
5. Perangkat Daerah/Unit Kerja tidak belum sepenuhnya menindaklanjuti hasil Survey Kepuasan Masyarakat untuk bahan rencana kerja

Adapun upaya dan solusi untuk mendorong pencapaian kinerja pelayanan publik Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Mendorong dan memfasilitasi kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja agar menetapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan
2. Mendorong dan melakukan fasilitasi kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja agar menerapkan Standar Pelayanan pada setiap jenis pelayanan, sesuai dengan penetapan Standar Pelayanan
3. Mendorong Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk menyusun rencana kerja berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan memperhatikan unsur pelayanan mana yang harus tetap dipertahankan dan unsur pelayanan mana yang harus ditingkatkan.

Rekomendasi yang dapat dilaksanakan untuk mendorong pencapaian kinerja pelayanan publik melalui suvey kepuasan masyarakat ini, antara lain:

1. Secara konsisten dan berkesinambungan terus melakukan Survey Kepuasan Masyarakat.
2. Mendorong Perangkat Daerah/Unit Kerja agar melakukan evaluasi, memelihara, dan membangun sarana dan prasarana pelayanan publik
3. Mendorong Perangkat Daerah/Unit Kerja agar melakukan evaluasi terhadap ketersediaan Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas.

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Professional, Akuntabel, Transparan Dan Mengayomi ini adalah :

1. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Program Pengelolaan Arsip	64.307.000,-	57.485.840,-	89,39

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Batam

2. Program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Perumusan Kebijakan, pendampingan dan Asistensi	1.778.972.000,-	1.468.222.287,-	82,53

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Batam

3. Program yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Kepegawaian Daerah	2.166.579.000,00	1.487.075.330,00	68,64%
2	Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.265.769.000,00	4.022.867.973,00	76.40%
Total		7.432.348.000,00	5.509.943.303,00	74.13%

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Batam

4. Program yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.091.866.300,-	5.356.649.487,-	75,53

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Batam

7. Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam

Indikator Kinerja: Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah

TAHUN	KINERJA			TARGET RPJMD (2026)	CAPAIAN REALISASI THD TARGET RPJMD (2026)
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
2022	9.56	162.25	1.697,18	11,61%	1.397,50

2023	9,51	44,37	466,56		382,17
2024	11,61	51.44	443.07		443,07

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Batam

Realisasi kinerja indikator Pertumbuhan Investasi Daerah tahun 2024 adalah sebesar 51,44 dari target sebesar 11,61 dengan capaian 443,07 %, Jika dibandingkan dengan tahun 2023 realisasi 44,37 dengan target 9,51 maka capaian sebesar 466,56 %. Apabila dibandingkan dengan akhir RPJMD tahun 2026 dengan target 11,61 % maka capaian sebesar 443,07 %. Dapat dipastikan capaian kinerjanya sudah mencapai cukup jauh, untuk itu perlu ditinjau ulang dengan melakukan penyesuaian target.



Pada tahun 2024, realisasi investasi Batam mencapai Rp. 25.462.030.732.730,- Realisasi didominasi oleh Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 67,96 % atau setara Rp. 17.303.387.062-730,- Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Batam sebesar 32,04 % atau mencapai Rp. 8.158.643.670.000,- Kota Batam telah memberikan kontribusi sebanyak 53,84 persen atas realisasi investasi total di Provinsi Kepri yang sebanyak 47,26 triliun dari Januari hingga desember 2024.

Sedangkan untuk perizinan berusaha di Batam terbit pada tahun 2024 sebanyak 27.607 Izin pada aplikasi OSS RBA dengan rincian Izin terbit/SS terverifikasi sebanyak 2.309 Izin, menunggu verifikasi persyaratan sebanyak 671 Izin dan terbit otomatis sebanyak 24.627 Izin. Jika dibandingkan dengan total proyek yang masuk dalam aplikasi OSS RBA sebanyak 56.138, hal ini juga didukung dengan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peningkatan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kota Batam melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) dengan penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada 500 pelaku usaha di Kota Batam.

Sumber: DPMPTSP Kota Batam





Sumber: DPMPTSP Kota Batam

Berikut daftar lima negara dengan nilai investasi terbesar di Batam pada Kuartal I 2024 (Data BKPM RI) :

1. Singapura USD 240,097 juta atau Rp 3,601 triliun ;
2. Tiongkok USD 72,16 juta atau Rp 1,082 triliun ;
3. Jepang USD 34,13 juta atau Rp 512,085 miliar ;
4. Perancis USD 15,85 juta atau Rp 237,77 miliar ;
5. Hongkong USD 4,95 juta atau Rp 74,304 miliar. (DN)

Batam, 3 Juli 2024

Berdasarkan data di atas, Penyebab utama keberhasilan dan kegagalan dalam capaian realisasi indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja utama adalah :

Permasalahan :

- a. Tingkat pemahaman penyelenggara pelayanan perizinan dan nonperizinan terhadap tuisi dan peraturan perizinan belum maksimal;
- b. Manajemen mutu layanan belum tersedia;

- c. Adanya perubahan kebijakan dan peraturan Pemerintah Pusat;
- d. Koordinasi penyelenggara perizinan DPMPTSP Kota Batam bersama dinas teknis belum optimal;
- e. Pengelolaan dan pemanfaatan data penanaman modal dan perizinan belum maksimal;
- f. Pengawasan dibidang kemitraan usaha belum berjalan;
- h. Sumber Daya Manusia yang mendukung kinerja masih sangat minim
- i. Akses promosi penanaman modal masih terbatas

Solusi :

- a. Pembinaan SDM sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan standar pelayanan yang dibutuhkan
- b. Peningkatan promosi penanaman modal tidak hanya di Dalam Negeri tetapi di Luar Negeri melalui berbagai kerjasama dan media
- c. Menyelenggarakan pelayanan terpadu sesuai dengan standar dan SOP
- d. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta sebagai media promosi penanaman Modal Kota Batam.
- e. Perlu dilaksanakan pelatihan dan assessment terhadap penyelenggara perizinan terhadap tuisi dan peraturan perizinan secara update;
- f. Perlu dilakukan deregulasi mengenai peraturan-peraturan yang telah ada dan peraturan terbaru;
- g. DPMPTSP Kota Batam sebagai leading sector penyelenggara perizinan perlu menyusun aturan bersama dinas teknis dan inovasi pelayanan perizinan untuk memberikan layanan perizinan paripurna kepada masyarakat;
- h. DPMPTSP Kota Batam perlu mengolah data dan memanfaatkan data untuk bekerjasama dengan dinas-dinas yang memiliki tuisi meningkatkan perekonomian daerah;
- e. DPMPTSP Kota Batam melakukan evaluasi pelaksanaan pengawasan untuk capaian strategis yang tepat sasaran;

Adapun beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai faktor pendukung capaian kinerja sebagai berikut:

1. Adanya dukungan kebijakan, perangkat regulasi baik dari pemerintah pusat maupun Kota Batam terkait penanaman modal
2. Memiliki potensi sektor unggulan perekonomian yang menjadi salah satu faktor masuknya investasi Kota Batam
3. Letak wilayah yang strategis berada diwilayah perbatasan antara negara Singapura dan Malaysia
4. Adanya Mall Pelayanan Publik sebagai akses kemudahan terhadap pelayanan perizinan yang terpadu
5. Pemanfaatan inovasi teknologi terhadap penyediaan database kebutuhan investasi di Kota Batam

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	284.530.000,-	125.640.108,-	44,16
2.	Promosi Penanaman Modal	339.300.000,-	304.974.380,-	89,88
3.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	647.426.316,-	521.581.063,-	80,56

4.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	90.500.000,-	89.100.000,-	98,45
Total		1.361.756.316,-	1.041.295.551,-	79,47

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Batam

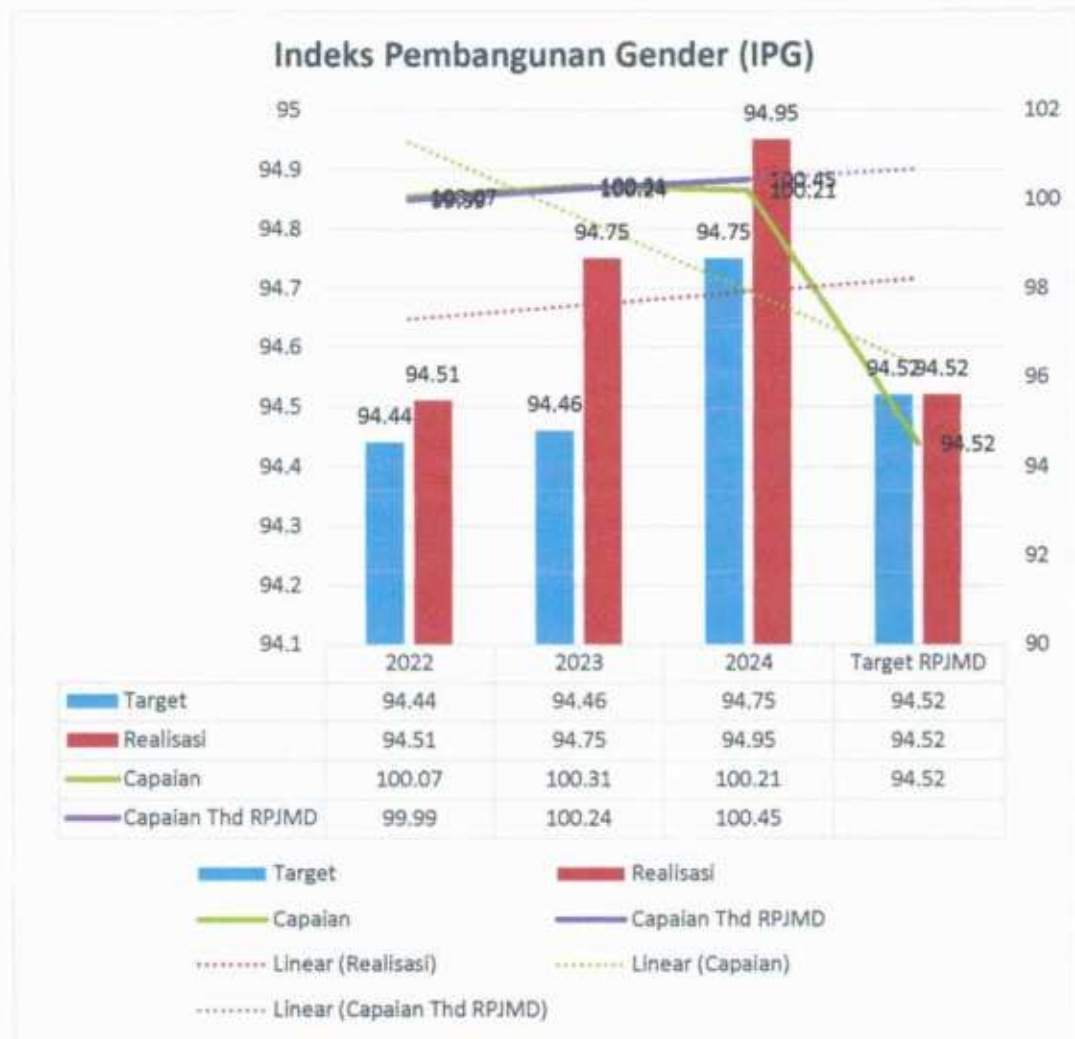
8. Meningkatnya Peran Gender Dan Pemuda Dalam Pembangunan

Indikator Kinerja: Indeks Pembangunan Gender (IPG)

TAHUN	KINERJA			TARGET RPJMD (2026)	CAPAIAN REALISASI THD TARGET RPJMD (2026)
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
2022	94.44	94.51	100.07	94,52%	99,99
2023	94,46	94,75	100,31		100,24
2024	94,75	94,95	100,21		100,45

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Batam

Realisasi indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2024 adalah sebesar 94,95 dari target sebesar 94,75 dengan capaian 100,21 %, Jika dibandingkan Tahun 2023 realisasi 94,75 dan target 94,46 dengan capaian 100,31%. Apabila dibandingkan dengan RPJMD 2026 dengan target 94,52 dengan capaian realisasi 100,45%



Pembangunan manusia berbasis gender merupakan program prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Batam dengan sasaran pencapaian Indeks pembangunan Gender yang berkorelasi dengan pencapaian misi ke-2 Walikota Batam dalam upaya Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia. Dan misi ini dituangkan dalam tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam yakni Meningkatkan Kesetaraan Gender serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak menuju keluarga yang mandiri.

Pembangunan manusia berbasis gender memiliki makna perbaikan kualitas hidup yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kualitas hidup dimaksud berkaitan dengan nilai kontribusi, peran aktif serta upaya perempuan dalam

mendukung terlaksananya pembangunan kota Batam dari berbagai sektor kehidupan yang memberikan sumbangsih dalam peningkatan pemberdayaan gender kota Batam. Gambaran secara umum saat ini masih banyak perempuan yang terkungkung dengan konsep dan pola pikir dan gaya hidup yang konservatif sehingga belum aktif memberikan sumbangsih dalam progress pembangunan kota Batam. Disamping itu, perempuan saat ini masih merasakan adanya diskriminasi sosial yang mengakibatkan adanya kesenjangan antara kaum perempuan dan laki-laki. Dalam hal inilah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Batam melaksanakan berbagai upaya membangun dan menggali potensi diri perempuan kota Batam untuk memperoleh kedudukan dan hak yang seimbang dengan laki-laki pada umumnya dalam mengakses berbagai fasilitas dan sumber penghidupan.

Untuk pencapaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, terdapat beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penghambat, antara lain:

1. Analisa terhadap perencanaan penganggaran yang responsif gender belum maksimal dilaksanakan.
2. Pemanfaatan data terpilah belum dilaksanakan di semua sektor pembangunan

Adapun beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai faktor pendukung capaian kinerja sebagai berikut:

1. Adanya dukungan regulasi kebijakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota Batam dalam hal penganggaran yang responsif gender.
2. Pemanfaatan data terpilah dalam perencanaan, dukungan anggaran terkait pembangunan gender.
3. Adanya inovasi penyediaan aplikasi data terpilah yang dapat mendukung perencanaan terhadap analisis dan identifikasi kebutuhan yang akan meminimalisir kesenjangan gender.

Solusi dan rekomendasi dalam menanggulangi faktor penghambat pencapaian capaian kinerja, diantaranya sebagai berikut:

1. Memaksimalkan ketersediaan data terpilah yang dapat diakses oleh publik

2. Pengembangan inovasi terhadap kebermanfaatan data terpilah
3. Keterlibatan Aktif Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam upaya perencanaan di setiap Perangkat Daerah yang reponsif gender.

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Peran Gender Dan Pemuda Dalam Pembangunan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.292.036.900,-	2.195.059.600,-	95,77
2.	Perlindungan Perempuan	572.249.000,-	504.580.500,-	88,17
3.	Peningkatan Kualitas Keluarga	3.226.402.000,-	3.171.049.800,-	98,28
4.	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	43.958.000,-	43.751.000,-	99,53
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	623.145.000,-	599.337.500,-	96,18
6.	Pengendalian Penduduk	333.900.000,-	331.213.300,-	99,20
7.	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.637.533.499,-	4.201.285.715,-	90,59
8.	Pemberdayaan dan Peningkatan	3.594.320.000,-	3.560.670.000,-	99,06

	Keluarga Sejahtera (KS)			
Total		15.323.544.398,-	14.606.947.415,-	95,32

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Batam

9. Menurunnya Angka Pengangguran

Indikator Kinerja: Tingkat Pengangguran Terbuka

TAHUN	KINERJA			TARGET RPJMD (2026)	CAPAIAN REALISASI THD TARGET RPJMD (2026)
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
2022	10,00	9,56	104,40	9,55	99,90
2023	9,75	8,14	119,78		117,32
2024	8,14	7,68	105,99		124,35

Sumber: Bappeda Kota Batam

Realisasi indikator kinerja pada Tingkat Pengangguran Terbuka adalah sebesar 7,68 dari target sebesar 8,14 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 105,99%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 8,14 dengan target 9,75 Capaiannya sebesar 119,78 Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 9,55 maka capaian kinerjanya sudah mencapai 124,35%.



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang masuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Persentase capaian kinerja sebesar 119,78% memberi gambaran bahwa jumlah pengangguran telah menurun secara signifikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Angka 8,14% menunjukkan bahwa setiap 10.000 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 814 orang penganggur. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Batam pada tahun 2019 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

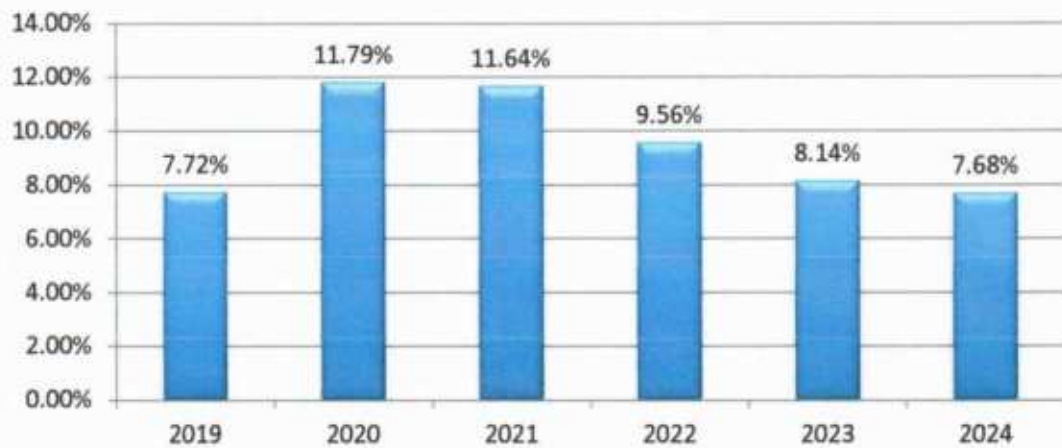
Tabel

Perkembangan Persentase TPT di Kota Batam
Tahun 2018 – 2024

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat pengangguran terbuka	7,72%	11,79%	11,64%	9,56%	8,14%	7,68%

Sumber: BPS Pusat

Grafik
Perkembangan Persentase TPT
Di Kota Batam Tahun 2019 – 2024



Sumber: BPS Pusat

Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Kepulauan Riau dan Indonesia pada tahun 2024, angka TPT Kota Batam paling tinggi, dapat dilihat dari tabel dan grafik berikut berikut:

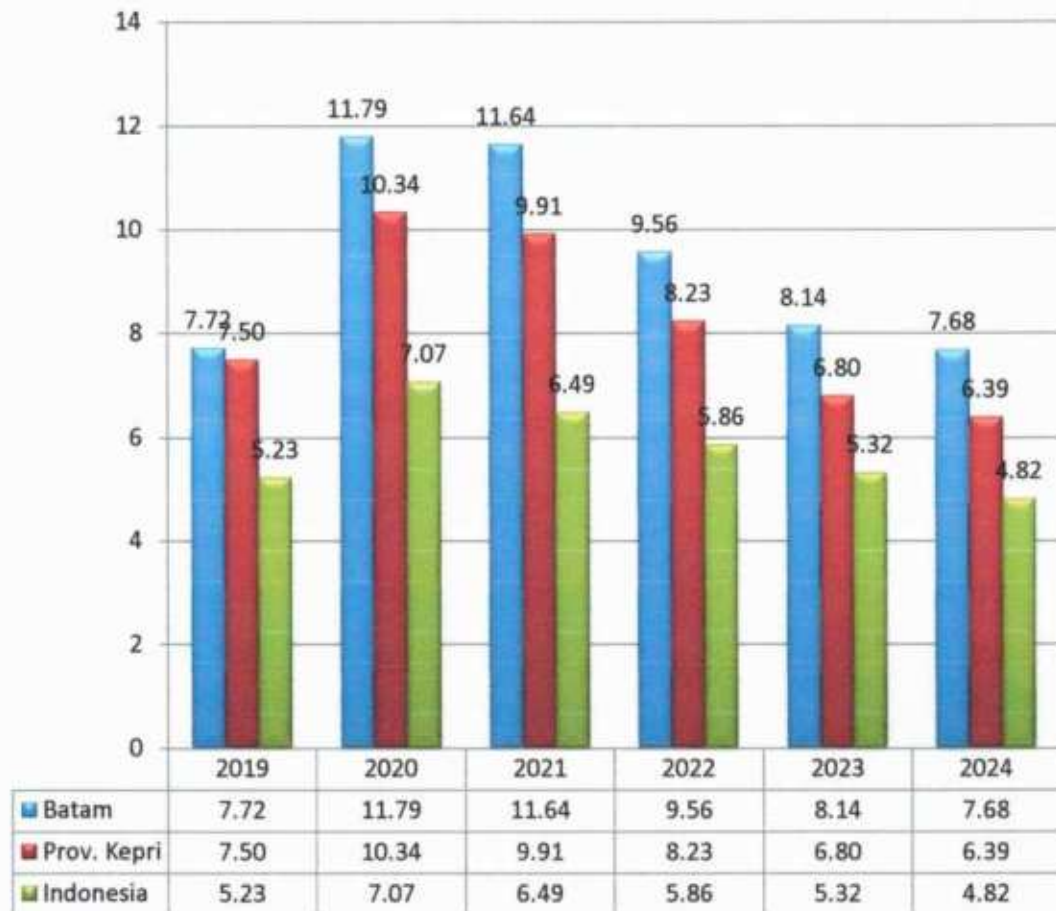
Tabel
Perbandingan perkembangan capaian Angka TPT di Kota Batam,
Provinsi Kepri dan Indonesia tahun 2019 - 2024

Indikator/Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Batam	7,72%	11,79%	11,64%	9,56%	8,14%	7,68%
Kepulauan Riau	7,50%	10,34%	9,91%	8,23%	6,80%	6,39%
Indonesia	5,23%	7,07%	6,49%	5,86%	5,32%	4,82%

Sumber: BPS Pusat

Grafik

Perbandingan perkembangan capaian Angka TPT di Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau, dan Indonesia tahun 2019-2024

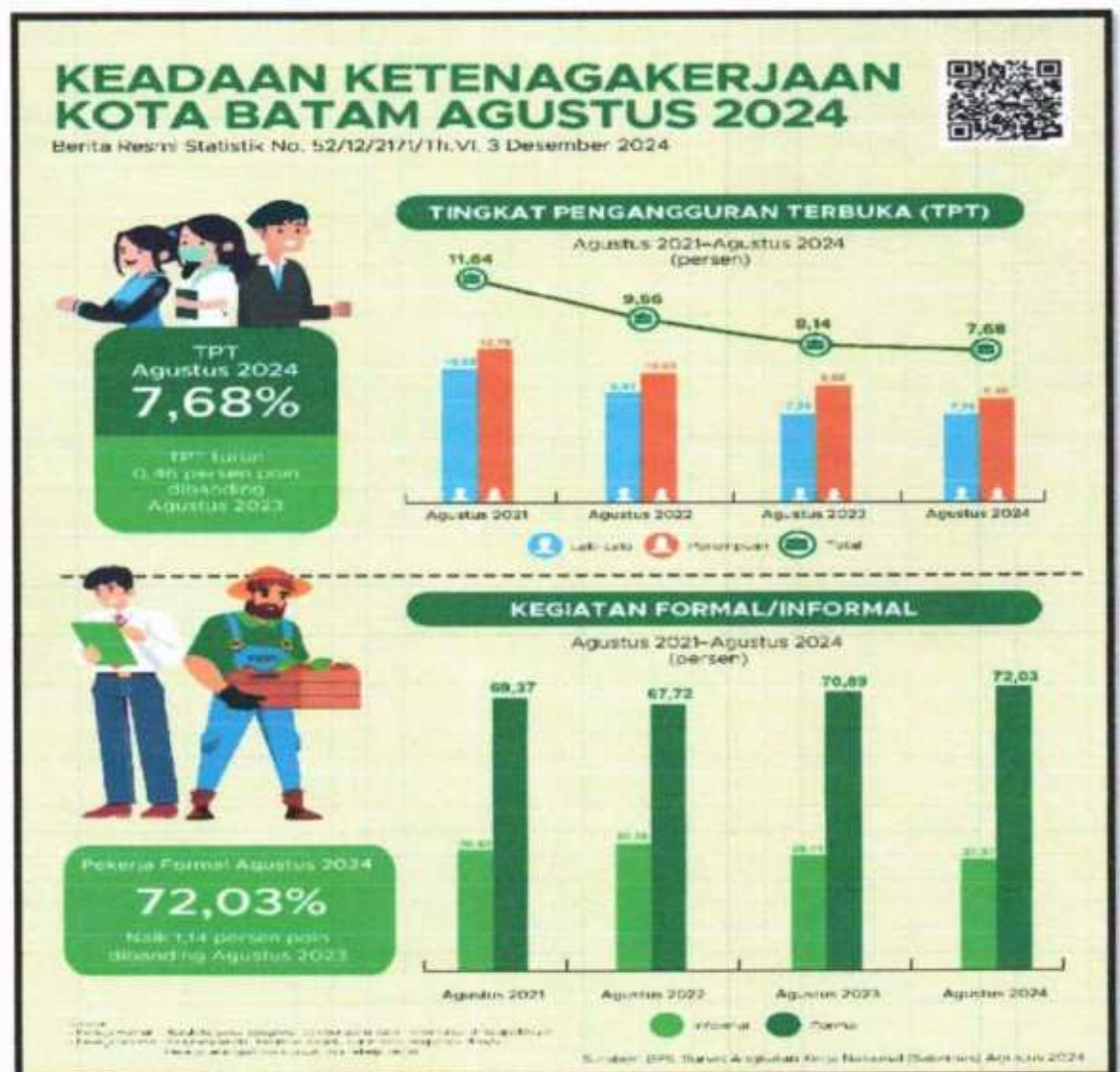


Sumber: BPS Pusat

Adapun hambatan yang dialami dalam upaya meningkatkan kesempatan kerja untuk menurunkan tingkat pengangguran, yaitu:

1. Distrupsi teknologi yaitu gangguan yang mengakibatkan industri tidak berjalan sebagaimana mestinya karena bermunculan kompetitor baru yang lebih efektif dan efisien serta penemuan teknologi yang mengubah peta bisnis (Era Industri 4.0);
2. Banyaknya lulusan SMA, SMK dan Sarjana yang tidak terampil dalam lapangan pekerjaan/masih menganggur (terlalu banyak tenaga kerja yang memasuki usia produktif, sedangkan lapangan pekerjaan terbatas).

3. Belum dilaksanakan monitoring dan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan oleh Lembaga Independen sebagai tolak ukur atas kinerja yang telah di laksanakan pasca pendidikan dan pelatihan.
4. Tidak adanya regulasi daerah dalam penempatan tenaga kerja sehingga meningkatnya jumlah pencari kerja yang datang dari luar daerah, karena peluang kerja yang cukup besar sebagai daya tarik migrasi pencari kerja dari luar daerah.
5. Ketersediaan SDM dengan keahlian yang dibutuhkan oleh dunia Industri belum memadai.
6. Masih kurangnya kompetensi tenaga kerja di Kota Batam
7. Laporan lowongan kerja oleh perusahaan-perusahaan belum sesuai dengan ketentuan Permenaker No. 39 Tahun 2016



Keadaan Ketenagakerjaan Kota Batam Agustus 2024

- „ Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) Kota Batam Sejumlah 940,72 ribu orang.
- „ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2024 sebesar 69,83 persen.
- „ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2024 sebesar 7,68 persen, turun 0,46 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.
- „ Penduduk yang bekerja sebanyak 606,49 ribu orang. Sektor jasa menyerap jumlah pekerja terbanyak, yaitu 57,22 persen diikuti sektor manufaktur yang menyerap sebanyak 41,33 persen tenaga kerja. Sektor pertanian menyerap tenaga kerja dengan porsi terkecil, yaitu sebesar 1,45 persen tenaga kerja.
- „ Sebanyak 72,03 persen bekerja pada kegiatan formal.

Faktor pendukung dari pencapaian target Tingkat Pengangguran Terbuka diantaranya :

1. Adanya regulasi untuk percepatan penanganan masalah pengangguran: Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, Perda Kota Batam No. 4 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dan lain-lain;
2. Tingginya minat/antusias peserta dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan yang di selenggarakan oleh Pemerintah Kota Batam melalui beberapa Perangkat Daerah.
3. Materi yang disajikan pada saat pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan peserta.
4. Kebijakan-kebijakan pemerintah terkait lapangan pekerjaan dalam upaya pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19.
5. Meningkatnya investasi sehingga memperluas akses pekerjaan.
6. Tumbuh pesat industri kecil menengah yang menyumbang lapangan pekerjaan.

Penyelesaian masalah juga diatasi dengan pelatihan kerja untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan

keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Selain itu beberapa upaya lain yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam dalam menanggulangi faktor penghambat pencapaian untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai berikut:

1. Perlu ada kebijakan pemerintah dapat berupa program-program pelatihan kerja yang dapat menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan mampu menjadi wirausaha baru.
2. Bekerjasama dengan dunia pendidikan dalam menyediakan SDM dengan keahlian yang sesuai kebutuhan tenaga kerja di Kota Batam.
3. Memfasilitasi proses penempatan tenaga kerja melalui bursa kerja baik secara online maupun offline, serta mendorong kerjasama dalam penempatan tenaga kerja antara pemerintah, lembaga, pendidikan dan pelatihan dengan pemberi kerja (perusahaan).
4. Mendorong pelaksanaan program kegiatan padat karya yang dapat menyerap dan memperkerjakan tenaga kerja secara masal.
5. Penyediaan Informasi tentang Kebutuhan Tenaga Kerja/Lowongan kerja melalui Job Fair/Pameran Kerja dan Sistem Bursa Kerja On-line.

Adapun perbaikan kinerja sebagai solusi/rekomendasi untuk tahun yang akan datang, yaitu :

1. Dukungan sumber daya yang memadai baik dari sisi sumber daya manusia maupun data dan informasi serta anggaran.
2. Peningkatan koordinasi dengan perusahaan terhadap informasi lowongan pekerjaan

Gambar
Berbaga Pelaksanaan Pelatihan Kepada Masyarakat
oleh Disnaker Kota Batam



Sumber: Disnaker Kota Batam

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran Menurunnya Angka Pengangguran ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	28.302.514.981,-	27.954.394.450,-	98,77
2.	Penempatan Tenaga Kerja	344.133.200,-	261.370.900,-	95,95
3.	Hubungan	330.443.000,-	199.080.500,-	60,25

	Industrial			
	Total	28.977.091.181,-	28.414.845.850,-	98,06

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Batam

10. Terwujudnya Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Yang Efektif, Efisien Dan Berkualitas

Realisasi kinerja nyata indikator Sasaran Terwujudnya Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Yang Efektif, Efisien Dan Berkualitas Tahun 2024 diukur dengan 2 (dua) indikator "Opini BPK" dan "Nilai LPPD" dengan capaian yang sama masing-masing sebesar 100%. Dengan hasil capaian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Batam telah mampu mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan.

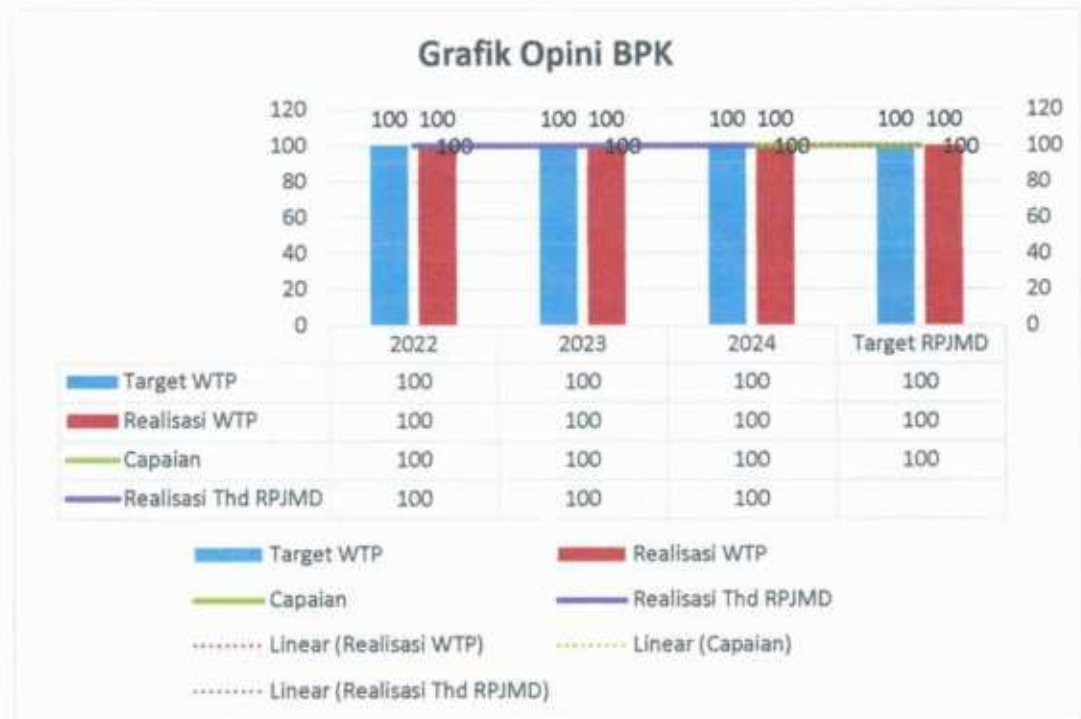
Indikator Kinerja 1 : Opini BPK

TAHUN	KINERJA			TARGET RPJMD (2026)	CAPAIAN REALISASI THD TARGET RPJMD (2026)
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
2022	WTP	WTP	100.00	WTP	100
2023	WTP	WTP	100.00		100
2024	WTP	WTP	100.00		100

Sumber: Bappeda Kota Batam

Capaian kinerja nyata indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah" adalah Predikat WTP dari Predikat WTP yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Sampai dengan tahun 2024

Predikat WTP yang diperoleh Pemerintah Kota Batam sebanyak 12 kali berturut-turut sejak tahun 2012. Bila dibandingkan dengan target Tahun akhir RPJMD Kota Batam maka capaian kinerja mencapai 100%.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kota Batam, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Akuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan Keuangan.

Pemerintah Kota Batam bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan laporan BPK RI, bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Batam pada tahun 2023 disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Batam tanggal 31 Desember 2024 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Kemudian untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut. BPK RI juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.



Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas maka BPK RI menyampaikan hasil pemeriksaan dalam laporan Nomor: **79/LHP/XVIII.TJP/04/2023** tanggal **10 April 2023** dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada penutup LHP diungkapkan bahwa perbaikan terhadap pengelolaan keuangan daerah harus senantiasa dikomitmenkan bersama terutama oleh para pimpinan selaku pengguna anggaran dan harus tetap konsisten dalam upaya perbaikan dalam rangka mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK- RI).

Opini WTP dari BPK RI atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kota Batam Tahun 2024 belum diumumkan sampai dengan penyusunan Laporan ini, sehingga belum dapat dibandingkan capaian kinerjanya terhadap target tahun 2024, terhadap capaian tahun 2023 dan target RPJMD tahun 2026.

Upaya yang dilakukan tahun 2024 untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) antara lain:

1. Taat azas pelaksanaan APBD ;
2. Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi dan diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan;
3. Laporan keuangan telah memperoleh reviu yang memadai dari Inspektorat;
4. Laporan keuangan merupakan hasil penyusunan masing-masing PD bukan merupakan hasil Bidang Akuntansi saja;
5. Penguatan komitmen dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
6. Penguatan komitmen dan integritas pimpinan perangkat daerah, para pengelola dan pelaksana kegiatan.

Dalam pencapaian kinerja ini, walaupun Opini BPK dapat tercapai sesuai target namun dipengaruhi juga beberapa faktor penghambat, antara lain:

1. Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang belum optimal,
2. Lemahnya tindak lanjut atas rekomendasi BPK,
3. Tingkat efisiensi yang belum maksimal

Sedangkan faktor yang menjadi faktor pendukung dalam pencapaian kinerja Opini BPK RI, sebagai berikut:

1. Dukungan dari pihak legislatif dalam proses penyusunan penganggaran yang tepat waktu setiap waktunya
2. SDM yang mampu membuat laporan keuangan, penyediaan, aset yang sesuai dengan standar
3. Adanya sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan anggaran

Solusi serta rekomendasi yang dapat dilakukan dalam menanggulangi faktor penghambat pencapaian capaian kinerja, diantaranya sebagai berikut:

1. Mekanisme yang dilakukan sudah sesuai dengan standar pemenuhan kriteria WTP.
2. Tetap menjaga kualitas dan capaian yang sudah sangat baik ini.

Indikator Kinerja 2 : Nilai LPPD

TAHUN	KINERJA			TARGET RPJMD (2026)	CAPAIAN REALISASI THD TARGET RPJMD (2026)
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
2022	Sangat Tinggi	2,65	Sedang	Sangat Tinggi	Sedang
2023	Sangat Tinggi	3.4344	Tinggi		Tinggi
2024	Sangat Tinggi	3.4344	Tinggi		Tinggi

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Kota Batam

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah setiap tahun yang menjelaskan arah kebijakan umum pemerintah daerah. Yang terdiri dari pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Capaian kinerja indikator "Nilai LPPD Kota Batam" adalah Predikat Tinggi dari target Predikat Sangat Tinggi yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah Tinggi. Capaian Tahun 2024 belum disampaikan penilaian oleh Kementerian Dalam Negeri maka penilaian LPPD tahun 2024 memakai hasil dari LPPD Tahun 2023.

Faktor pendukung untuk tercapainya indikator sasaran Nilai LDDP Kota, diantaranya dengan menyelenggarakan bimbingan teknis dengan narasumber dari pemerintah pusat secara intensif dalam rangka mengoptimalkan pemahaman terhadap indikator kinerja kunci dan memberikan data dukung

yang valid dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah antara lain:

1. Pembinaan kinerja perangkat daerah serta monitoring dan evaluasi secara berkala dalam memantau kinerja perangkat daerah.
2. Lebih optimal dapat pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal, Indikator Kinerja Kunci dan dokumentasi kinerja kota lainnya.
3. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait penilaian LPPD dan mendapatkan jawaban tertulis terkait penilaian LPPD Setiap tahunnya

Gambar
Pelaksanaan Bimtek Penyusunan LPPD 2024



Sumber: Bagian Tata Pemerintahan SETDA Kota Batam

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran Terwujudnya Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Yang Efektif, Efisien Dan Berkualitas ini adalah :

1. Program yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Pengelolaan Keuangan Daerah	13.921.663.324,-	1.998.697.885,-	14,36
2.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.977.084.000,-	3.668.502.863,-	92,24
Total		17.898.747.324,-	5.667.200.748,-	31,66

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Batam

2. Program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Penyelenggaraan Pengawasan	1.078.927.000,-	726.629.378,-	67,35

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Batam

3. Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	133.512.286.400,-	128.605.800.122,-	96,33

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Batam

4. Program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Penelitian pengembangan Pembangunan daerah Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.715.476.000,-	1.593.778.849,-	92,91
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	118.864.000,-	110.976.100,-	93,36
3.	Penelitian dan Pengembangan Daerah	238.653.000,-	208.015.000,-	87,16
Total		2.072.993.000,-	1.912.769.949,-	92,27

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Batam

11. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi

Indikator Kinerja: Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

TAHUN	KINERJA			TARGET RPJMD (2026)	CAPAIAN REALISASI THD TARGET RPJMD (2026)
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		

2022	3.09	2.85	92.23	3,86	73,83
2023	3,18	3,77	118,55		97,67
2024	3,77	3,77	100		97,67

Realisasi kinerja nyata indikator "Indeks SPBE" adalah sebesar 3,77 dari target sebesar 3,77 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%, capaian ini sama dengan target yang diperjanjikan. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 hasil yang diperoleh masih dapat dipertahankan. Apabila dibandingkan target akhir RPJMD Kota Batam dengan target sebesar 3,86 maka capaian kinerja sasaran indikator pada tahun 2024 sudah mencapai 97,67%.

Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)



Penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kota Batam yang telah dilakukan mulai tahun 2018. Dalam usaha pelaksanaan SPBE tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pemerintah Kota Batam menerapkan kewenangan SPBE ini melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dengan melaksanakan pembangunan bidang urusan komunikasi dan informatika sehingga diharapkan dapat mewujudkan peningkatan pelayanan publik secara online dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.

Dengan hasil capaian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota

Batam telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan. Bahkan Indeks SPBE Kota Batam ini adalah indeks tertinggi se Kepulauan Riau dan Peringkat Ke 4 Se Sumatra. Hal ini dapat dilihat dengan beberapa faktor pendukung yang ada, yakni: Pelaksanaan bidang komunikasi dan informatika Kota Batam yang dihasilkan di tahun 2024 berdasarkan sasaran strategis :

1. "Meningkatnya kualitas kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE"

dapat digambarkan digambarkan melalui indikator sebagai berikut :

- a. Indikator pertama : Nilai Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE, capaian kinerja adalah 4,10 nilai indeks;
- b. Indikator kedua : Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE, capaian kinerja adalah 3,50 nilai indeks;
- c. Indikator ketiga : Nilai Indeks Domain Layanan SPBE, capaian kinerja adalah 4,19 nilai indeks;
- d. Indikator keempat : Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE, capaian kinerja adalah 2,73 nilai indeks;

2. "Meningkatnya kualitas layanan informasi dan komunikasi publik"

dapat digambarkan digambarkan melalui indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik", dengan capaian kinerja adalah 87,23 di luar indikator sasaran strategis diatas, pencapaian kinerja bidang Komunikasi dan Informatika Kota Batam ditunjukkan dengan :

- a. Diperolehnya nilai indeks SPBE Kota Batam 3,77 dengan predikat sangat baik. Dan untuk nilai indeks SPBE Kota Batam tertinggi se Provinsi Kepri.
- b. Mendapatkan penilaian smart city dengan kategori Hijau.
- c. Mendapatkan nilai Indeks Pembangunan Statistik dengan kategori cukup. 2,4
- d. Mendapatkan penghargaan Ombudsman kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terbaik.
- e. Mendapatkan nilai keterbukaan informasi publik dengan predikat menuju informatif.

Namun, dengan pencapaian yang melebihi target, bukan berarti tidak ada kendala. Hal ini dikarenakan beberapa hal, antara lain:

1. Masih kurangnya kompetensi SDM di Perangkat Daerah yang menguasai teknologi informasi dan *update* terhadap perkembangan teknologi.
2. Besarnya anggaran untuk mengembangkan inovasi teknologi digital.
3. Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah di dalam pengembangan SPBE sehingga membuat rendahnya sinergisitas untuk wujudkan digitalisasi pemerintahan.
4. Jangkauan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah dan ke semua lapisan masyarakat yang belum optimal

Adapun rekomendasi yang diberikan atas hambatan yang terjadi pada pencapaian tahun 2024, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui pembinaan terhadap teknologi informasi;
2. Kerjasama dengan daerah lain dalam pemanfaatan aplikasi yang sudah dikembangkan oleh daerah lain sesuai kebutuhan Pemerintah Kota Batam;

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.084.822.557 ,-	6.736.013.802 ,-	95,08
2.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	313.414.000,-	303.090.000,-	96,71
3.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	76.874.000,-	71.905.912,-	93,54
Total		7.475.110.557,-	7.111.009.714,-	95,13



Program Informasi dan Komunikasi Publik dilaksanakan oleh Bidang Komunikasi dan

Kehumasan bersama Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian. Adapun

kinerja yang terlaksana melalui Program Informasi dan Komunikasi Publik di Tahun

2024 adalah :

1. Melaksanakan pemantauan website OPD yang aktif dan diperbaharui datanya sesuai siklus dengan status 43 Website OPD yang aktif dari 43 OPD.
2. Melaksanakan verifikasi bahan informasi publik sebanyak 78 kali.
3. Memenuhi permintaan pelayanan rekaman CCTV kepada instansi lain seperti aparaturnya penegak hukum sebanyak 19 rekaman kejadian sesuai permintaan. Selebihnya seluruh kejadian di kota Batam terekam dengan baik di layanan CCTV selama 24 jam selama tahun 2024.
4. Melaksanakan layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112 selama 24 jam dan menindaklanjuti laporan sebanyak 41 pengaduan masyarakat dari 41 pengaduan yang diterima.
5. Menindaklanjuti laporan dan aspirasi masyarakat ke OPD terkait melalui media elektronik swasta sebanyak 1.238 laporan pengaduan
6. Menindaklanjuti sebanyak 230 pengaduan masyarakat dari total 230 Pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N lapor.

7. Melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Batam dengan Narasumber dari Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.
8. Melakukan Rapat Koordinasi dengan pengelola Aplikasi SP4N LAPOR! Organisasi Perangkat Daerah se Kota Batam untuk lebih memaksimalkan kinerja pelayanan pemerintah Daerah Kota Batam dalam memberikan pelayanan terhadap pengaduan masyarakat Kota Batam.
9. Mengadakan Kegiatan Literasi Digital yang bertujuan agar Masyarakat jauh lebih Bijak dalam menggunakan serta mengakses Teknologi, serta menambah pengetahuan dan kecakapan pengguna dalam memanfaatkan Media Digital seperti alat Komunikasi, Jaringan Internet dan lain sebagainya.
10. Mengadakan kegiatan Digitalisasi Konten Kreatif dalam bentuk perlombaan Foto dan Video dengan tema Batam Kota Baru.
11. Melaksanakan publikasi dan diseminasi informasi pembangunan daerah dalam bentuk penerbitan berita sebanyak 1720 konten melalui kerjasama dengan media komunikasi publik milik swasta (media cetak, media online, dan media elektronik).
12. Mengelola secara aktif 7 (tujuh) media komunikasi publik milik Pemerintah Kota Batam, yaitu : website mediacenter.batam.go.id, akun Facebook Media Center Pemerintah kota Batam, akun instagram Media Center Batam, Threads Media Center Pemko Batam, akun youtube Media Center Batam, Akun Tiktok @mediacenterpemkobatam dan akun twitter (x.com) Media Center Batam.
13. Melakukan 24 (dua puluh empat) kali pengemasan konten nasional menjadi konten lokal.
14. Membuat 1460 berita lokal dan didiseminasikan melalui 7 (tujuh) media komunikasi publik milik Pemerintah Kota Batam.

Faktor – faktor yang menunjang keberhasilan tersebut yaitu :

1. Komitmen Pemerintah Kota Batam dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan Informatika pada tahun 2024.
2. Ketersediaan infrastruktur Teknologi informasi yang memadai.
3. Ketersediaan tenaga programmer yang handal sehingga sangat mendukung dalam pembangunan aplikasi layanan publik di Pemerintah Kota Batam.
4. Ditambah dengan perkembangan era digitalisasi sekarang semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses teknologi secara langsung, baik melalui perangkat Handphone ataupun perangkat lainnya.

Capaian Kinerja Bidang Pengelolaan E-government dalam melaksanakan Program Aplikasi Informatika telah melaksanakan berbagai kinerja berikut :

1. Mengimplementasikan 49 Aplikasi Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik yang memenuhi kriteria dan peraturan yang berlaku;

1. EGOV	16. Jaringan Dokumen Informasi Hukum (JDIH) Pemko Batam	31. Website Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD2)	17. Website Media Center	32. Aplikasi Permintaan Informasi (PPID) Batam
3. Website Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	18. Sijakon	33. Aplikasi Data Kesejahteraan Sosial
4. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik (E-Billing)	19. Website IT Support Diskominfo Batam	34. Sensus Aset
5. E-BPHTB	20. Aplikasi pendataan ormas (Silelapormas)	35. Portal Bersama
6. Informasi dan Cetak SPPT (E-SPPT)	21. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	36. Peminjaman Ruangan (eRoom)
7. Sistem Informasi Eksekutif Penerimaan Daerah (SIEPENDA)	22. CCTV Kota Batam	37. Portal Layanan Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Batam (SIBIJAK)
8. Layanan Pengadaan	23. Sistem Antrian MPP	38. Pendaftaran Online Wajib Pajak dan
	24. Aplikasi Penilaian MTQ Kota Batam	
	25. Emonev	
	26. Sistem Informasi	

Secara Elektronik (LPSE)	Pelaporan Elektronik	Objek Pajak Daerah (E-
9. SIMPEG	Koperasi (SIMPELKOP)	Daftar Pajak)
10. Aplikasi Perpustakaan	27. Museum	39. Pelaporan Semester
Kota Batam	28. Survey Kepuasan	Persetujuan
11. E-SPTPD	Masyarakat (SKM)	Lingkungan (Perseling)
12. SIMAPATDA	29. Satu Data	40. Sistem Informasi Integrasi
13. Email Batam	30. Layanan Administrasi	Kegiatan dan
14. EASY (Aplikasi Perizinan	Kependudukan Secara	Bantuan (SIIKAN)
PTSP Online)	Elektronik (LAKSE)	41. GOMONEV
15. Website Portal		42. SIMPONI
Pemerintah		43. Integrasi layanan primer
Kota Batam		(ILP)
		44. Semenanjung
		45. SMILE-ZI
		46. Eblek
		47. WBS
		48. OTEN
		49. CSIRT

2. Memfasilitasi 9 (sembilan) integrasi aplikasi yaitu antara :

- Aplikasi eGov 2023 dengan Aplikasi SIPKD BPKAD;
- Aplikasi eGov 2023 dengan Aplikasi SiRUP LKPP;
- Aplikasi eGov 2023 dengan Aplikasi SIMPEG BKPSDM;
- Aplikasi PTSP Online (Easy) dengan Aplikasi PBB Bapenda (API PBB);
- Aplikasi PTSP Online (Easy) dengan Aplikasi iTeken (penerapan tanda tangan digital);
- Aplikasi eMonev dengan Aplikasi SiRUP LKPP;
- Aplikasi eMonev dengan Aplikasi AMEL LPSE;
- Aplikasi eMonev dengan Aplikasi SIMPEG BKPSDM;
- Aplikasi eMonev dengan Aplikasi eGov.

3. Mendaftarkan 38 Sistem Elektronik ke PSE Kemenkominfo;

1.	GEO-TPS (Geografi Tempat Penampungan Sampah)	19.	EASY
2.	Support Batam	20.	Aplikasi TSP
3.	Bankesda	21.	Lakse
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan	22.	SKM
5.	Dokumentasi(PPID)	23.	Sistem Antrian MPP
6.	ASIKLO (Aplikasi Perstek dan SLO)	24.	eRoom
7.	SILATTAS (Sistem Informasi Pelatihan dan Produktivitas)	25.	eMonev Batam
8.	SIKAN (Sistem Informasi Perikanan)	26.	SiMolek
9.	Aplikasi Pendataan Ormas Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pemerintah Kota Batam	27.	MATANYA BATAM
10.	JDIH PEMKO BATAM	28.	Museum
11.	JDIH SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM	29.	Si-kamarrs
12.	WEBSITE ORGANISASI	30.	SIMASBRO
13.	PERANGKAT DAERAH	31.	OTEN
14.	MEDIA CENTER BATAM Aplikasi Kesejahteraan Sosial Kota Batam	32.	WBS (Whistle Blowing System
15.	eGov	33.	Layanan email.batam.go.id
16.	SIMPELKOP	34.	I-Teken
17.	Satu Data Kota Batam	35.	Mal Pelayanan Publik
18.	SILH	36.	CSIRT
		37.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
		38.	Aplikasi Sensus Aset

4. Persentase Uptime email batam.go.id sebesar 99% (melebihi target);
5. Mengelola 8 (delapan) nama domain pemerintah kabupaten/kota tahun 2024, yaitu: batam.go.id, batamkota.go.id, iteken.id, btmdemo.my.id, btmdev.my.id, localdev.my.id, masjidagungbatam.org, masjidsultan.org;
6. Mengelola layanan internet dan Jaringan Intra pada 27 OPD yang terhubung dengan jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika
7. Mengelola monitoring / pengawasan dan pemeliharaan di 23 Titik CCTV dengan
jumlah kamera 47 unit CCTV yang di kelola Dinas Komunikasi dan Informatika.
8. Pengelolaan Bandwidth Internet sebesar 500 Mbps di lingkungan Pemerintah Kota Batam
9. Layanan fasilitasi pelaksanaan video conference sebanyak 120 kali dan Live Streaming Youtube sebanyak 56 kali.
10. Memperoleh Nilai Indeks SPBE Kota Batam Tahun 2024 dengan nilai (3,77) dan
berpredikat Sangat Baik
11. Mengikuti dan menyelesaikan Evaluasi Kota Cerdas yang dilaksanakan oleh
Kementrian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia.

Selain faktor-faktor yang menunjang keberhasilan, faktor penghambat yang muncul selama ini yaitu bahwa perangkat daerah yang menginisiasi aplikasi layanan publik tertentu tidak mengelola operasional aplikasi secara optimal, masih sangat tergantung dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran didukung oleh keberhasilan pencapaian kinerja program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

B. PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN ANGGARAN

Sasaran/ Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor Perindustrian, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berdaya Saing						
Pertumbuhan Ekonomi Daerah	6,93	6,69	96,54	4.753.534.990,-	4.555.160.946,-	95,83
Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Yang Merata Dan Inklusif						
Indeks Gini	0,325	0,338	94,67	22.641.666.763,-	21.399.701.783,-	94,51
Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Berkualitas Dan Serasi Dengan Tata Ruang Kota Batam Serta Berwawasan Lingkungan						
Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan	73,40	73,68	100,38	564.203.552.057,-	519.876.762.015,-	92,14
Mewujudkan Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Bertaqwa Menuju Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera						
Indeks Pembangunan Manusia	82,75	83,32	100,69	667.960.716.018,-	637.831.050.102,-	95,49
Persentase Penduduk Miskin	4,68	4,85	96,49	35.044.167.537,-	33.688.399.244,-	96,13
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Memperluas Akses Hinterland						
Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland	68,00	68,83	101,22	147.046.416.122,-	135.717.414.910,-	92,30
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Professional, Akuntabel, Transparan Dan Mengayomi						

Indeks Reformasi Birokrasi	74 (BB)	83,48 (A)	112,81	496.294.186.385,-	451.511.853.687,-	90,98
Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam						
Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	11,61	51,44	443,07	1.361.756.316,-	1.041.295.551,-	76,47
Meningkatnya Peran Gender Dan Pemuda Dalam Pembangunan						
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,75	94,95	100,21	15.705.799.399,-	14.930.351.944,-	95,06
Menurunnya Angka Pengangguran						
Tingkat pengangguran terbuka	8,14	7,68	105,99	28.977.091.181,-	28.414.845.850,-	98,06
Terwujudnya Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Yang Efektif, Efisien Dan Berkualitas						
Opini BPK	WTP	WTP	100	18.977.674.324,-	6.393.830.126,-	33,69
Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Tinggi	80	135.585.279.400,-	130.518.570.071,-	96,26
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi						
Indeks SPBE	3,77	3,77	100	7.475.110.557,-	7.111.009.714,-	95,13
Total				2.146.026.951.049,-	1.992.990.245.923,-	92,87

Sumber: Pengolahan Data

Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Batam menggunakan anggaran sebesar Rp. 2.146.026.951.049,- dan telah terealisasi sebesar Rp 1.992.990.245.923,- atau sebesar 92,87%. Pemerintah Kota Batam memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 125,54% dengan realisasi anggaran sebesar 92,87% yang berarti penggunaan anggaran sebesar 32,67% efektif dalam mendukung pencapaian kinerja.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 agar anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal adalah meningkatkan koordinasi antara Perangkat Daerah dengan Bappeda dan BPKAD selaku pengelola keuangan yang mengelola anggaran dan kegiatan dalam merencanakan kegiatan, memantau realisasi anggaran, dan berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Batam Tahun 2024 menyajikan tingkat capaian kinerja / keberhasilan maupun kendala / belum tercapai dalam sasaran Strategis Pemerintah Kota Batam Tahun 2024, dapat disampaikan bahwa sebagian besar target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan target pada akhir periode RPJMD tahun 2021 – 2026 Pemerintah Kota Batam dapat tercapai.

Pemerintah Kota Batam kedepan akan memperkuat dan mempertajam regulasi, komitmen, keterlibatan semua pihak agar lebih implementatif, serta meningkatkan koordinasi dan kolaborasi stakeholders baik internal maupun eksternal, termasuk mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah sebagai mitra strategis dalam mengawal pencapaian kinerja. Secara internal, Pemerintah Kota Batam melakukan penataan dan meningkatkan kompetensi SDM, serta memanfaatkan teknologi informasi memastikan Pemerintah Kota Batam mampu mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih baik lagi.

Sebagai organisasi yang telah mengimplementasikan manajemen berorientasi hasil, Pemerintah Kota Batam memfokuskan semua aktivitasnya pada layanan prima (*service excellence*) dalam rangka melaksanakan tugasnya, baik di lingkungan internal maupun eksternal untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN

Daftar Lampiran

- Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Batam Tahun 2024
- Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Batam Tahun 2025
- Lampiran 3 Daftar Penghargaan Kota Batam Tahun 2024
- Lampiran 4 Pernyataan Di Reviu
- Lampiran 5 Laporan Hasil Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Batam Tahun 2024



PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Batam untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Batam.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu yang telah kami lakukan, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Batam, 21 Maret 2025

Kepala Daerah Kota Batam



Mardiana Gustini, S.Sos., CGCAE.

Perdana Muda Muda

NIP. 198208241990092001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KOTA BATAM**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD RUDI

Jabatan : WALI KOTA BATAM

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Batam, 23 Januari 2025

WALI KOTA BATAM,

MUHAMMAD RUDI

**PERJANJIAN KINERJA
KOTA BATAM TAHUN 2025**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	Pertumbuhan sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Bukan mobil dan sepeda motor)	Persentase	6.98	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batam
2	Tumbuhnya sektor Pariwisata Unggulan di Kota Batam	Pertumbuhan sektor pendukung Pariwisata (sektor akomodasi dan makan minum)	Persentase	6.84	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Batam
3	Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	Persentase	10.85	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam
4	Meningkatnya produktivitas industri kecil menengah dalam perekonomian daerah	Pertumbuhan Omzet Industri Kecil Menengah	Persentase	8.82	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Batam
5	Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Omzet Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase	31.2	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Batam
6	Meningkatnya kesejahteraan nelayan kecil dan budidaya	Nilai Tukar Nelayan	Skor	102.5	Dinas Perikanan Kota Batam
7	Meningkatnya Ekonomi Kreatif Daerah	Pertumbuhan Kawasan/Klaster Kreatif Daerah	Persentase	82.07	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Batam
8	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten	Persentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	Persentase	93.41	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Batam yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Persentase Pengelolaan Sampah	Persentase	67.25	Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam	Indeks	71	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
10	Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase	81.25	Dinas Binamarga Dan Sumber Daya Air Kota Batam
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	Persentase	91	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perkotaan	Persentase	68	Dinas Perhubungan Kota Batam
11	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan literasi masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Persentase	80.9	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Batam
		Indeks Pendidikan	Indeks	75.1	Dinas Pendidikan Kota Batam
12	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata	Indeks Kesehatan	Indeks	82.4	Dinas Kesehatan Kota Batam
13	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	Indeks	92.62	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batam
14	Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94.5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam
		Persentase Pemuda yang Berpartisipasi dalam Pembangunan	Persentase	13.37	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kota Batam
15	Meningkatnya kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat	Persentase Penurunan Konflik dan Pelanggaran	Persentase	32	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam
16	Meningkatnya sektor ketahanan pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	88.2	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Batam

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
17	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	7.58	Dinas Tenaga Kerja Kota Batam
18	Meningkatnya pelayanan sosial masyarakat	Persentase Penurunan IPTKS	Persentase	1.4	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam
19	Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman di wilayah hinterland	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Wilayah Hinterland	Persentase	70.19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam
20	Meningkatnya konektivitas antar pulau di wilayah hinterland	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan di Wilayah Hinterland	Persentase	106	Dinas Perhubungan Kota Batam
21	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland	Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi di Wilayah Hinterland	Persentase	37.8	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
22	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Nilai Tata Kelola Kearsipan OPD	Skor	67.07	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Batam
		Opini BPK	Kategori	1	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam
		Nilai LPDP	Tingkat Penilaian	Tinggi	Sekretariat Daerah Kota Batam (Bagian Tata Pemerintahan)
		Tingkat Maturitas SPIP	Kategori	Level 3	INSPEKTORAT
23	Meningkatnya kemampuan kemandirian keuangan daerah	Pertumbuhan Pajak	Persentase	21.85	Badan Pendapatan Daerah Kota Batam
		Retribusi Daerah	Persentase	17.54	Badan Pendapatan Daerah Kota Batam
24	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Indeks SPBE	Indeks	3.66	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Batam

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
	dengan memanfaatkan teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	91	Sekretariat Daerah Kota Batam (Bagian Organisasi dan Tata Laksana)
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	64	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kota Batam

Batam, Januari 2025

WALI KOTA BATAM,


 MUHAMMAD RUDI

Perjanjian Kinerja

Pemerintah Kota Batam Tahun 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KOTA BATAM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD RUDI

Jabatan : WALI KOTA BATAM

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Batam, 31 Januari 2024

WALI KOTA BATAM,



MUHAMMAD RUDI

**PERJANJIAN KINERJA
KOTA BATAM TAHUN 2024**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata yang berdaya saing	1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persen	6,93%	BPS
2	Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan Inklusif	2. Indeks Gini	Indeks	0,320	BPS
3	Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan	3. Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan	Indeks	73,40	CKTR, DLH, Dishub, Perkim, Bina Marga
4	Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertakwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera	4. Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	82,75	BPS
		5. Persentase penduduk miskin	Persen	4,68%	BPS
5	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Memperluas Akses Hinterland	6. Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland	Indeks	68,00	CKTR, Dishub, Perkim, Bina Marga
6	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi	7. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	74 (BB)	Setdako (Bagian Organisasi), Inspektorat
7	Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam	8. Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	Persen	11,61%	DPMPSTP, BP Batam
8	Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan	9. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,75	Dinas Pemberdayaan Perempuan
9	Menurunnya angka pengangguran	10. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,14%	Disnaker
10	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	11. Opini BPK	Opini	WTP	BPKAD
		12. Nilai LPPD	Kategori	Sangat Tinggi	Setdako (Bagian Tata Pemerintahan)
11	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	13. Indeks SPBE	Indeks	3,77	Diskominfo

Batam, 21 Januari 2024

WALI KOTA BATAM,


 MUHAMMAD RUDI

Daftar Penghargaan Kota Batam Tahun 2024

NOMINASI PENGHARGAAN. 1

Piagam Penghargaan dari Direktorat Jenderal Pengendalian & Penertiban Tanah dan Ruang kepada Pemerintah Kota Batam atas dukungannya Dalam Rangka Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Penataan Ruang di Kota Batam "Demi Terciptanya Efek Jera Bagi Pelaku Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dan Terwujudnya Tertib Tata Ruang Indonesia". (Jakarta, 22 Januari 2024)

DOKUMENTASI



NOMINASI PENGHARGAAN.2

Piagam Penghargaan Baznas Awards 2024 kepada Walikota Batam sebagai Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik.

DOKUMENTASI



APRESIASI BAZNAS AWARD 2024

Alhamdulillah Terima Kasih ya Allah

Tahun 2024 BAZNAS Kota Batam
Meraih **4 BAZNAS Award** sekaligus :

- 1. Walikota Batam H. Muhammad Rudi, S.E.,M.M**
(sebagai Kepala Daerah pendukung Pengelolaan Zakat terbaik.)

BAZNAS Kota Batam meraih 3 BAZNAS Award (PKP) Kategori :

- 1. Perencanaan terbaik (RKAT)**
- 2. Pelaporan terbaik**
- 3. Teamwork Operator Simba Terbaik**

Penerimaan BAZNAS Award 2024 yang akan diserahkan pada tanggal 29 Februari 2024 di Jakarta.
Semoga menjadi motivasi bagi kami untuk berbuat lebih baik di masa yang akan datang



TTD
Panitia BAZNAS Award 2024
29 februar 2024, di Jakarta

Penyusunan: kementerian.go.id | info@kementerian.go.id | Batam TV Kota Batam | #BatamBerkarya | 0821 7095170

NOMINASI PENGHARGAAN.3

Sertifikat Penghargaan Indonesia Global Awards 2024 dari Seven Media Asia kepada H. Muhammad Rudi (Walikota Batam) kategori The Best Figure of Indonesia 2024 (Innovation & High Performance).

DOKUMENTASI



NOMINASI PENGHARGAAN.4

Penghargaan International Awards 2024 dari Seven Media Asia kepada H. Muhammad Rudi (Walikota Batam) kategori The Best Leader on Development and Economy 2024(Jimbaran, 17 Mei 2024)Sertifikat Penghargaan International Awards 2024 dari Seven Media Asia kepada H. Muhammad Rudi (Walikota Batam) kategori The Best Leader on Development and Economy 2024(Jimbaran, 17 Mei 2024)

DOKUMENTASI



NOMINASI PENGHARGAAN. 5

Penghargaan
Peduli HAM 2023 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
(27 Januari 2024))

DOKUMENTASI



NOMINASI PENGHARGAAN.6

Peringkat Pertama
Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) se-Wilayah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2023 dengan nilai 93,38(13 Februari 2024)

DOKUMENTASI



NOMINASI PENGHARGAAN. 9

Predikat Kualitas Tertinggi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 dari Ombudsman RI (22 Februari 2024)
Predikat Kualitas Tertinggi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 dari Ombudsman RI (22 Februari 2024)

DOKUMENTASI



NOMINASI PENGHARGAAN.10

Terbaik III Kontribusi Berita Anugerah Media Centre(6 Maret 2024)

DOKUMENTASI



NOMINASI PENGHARGAAN. 11

Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Kepri (27 April 2024)

DOKUMENTASI



NOMINASI PENGHARGAAN.12

Apresiasi Pemerintah Daerah Optimalisasi Input Data Calon Debitur KUR pada Aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Terbaik Lingkup Kepri 2023 (8 Mei 2024)

DOKUMENTASI



NOMINASI PENGHARGAAN. 13

Penghargaan
Indonesia Golden Award sebagai Tokoh Publik dari Ikatan Wartawan Online
(IWO) Indonesia Kepulauan Riau(18 Mei 2024)

DOKUMENTASI



NOMINASI PENGHARGAAN.14

Juara Umum MTQH
X Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 (28 Mei 2024)

DOKUMENTASI



NOMINASI PENGHARGAAN. 15

Penghargaan Seven Media Asia 2024 Kategori 25 Pemimpin Inspiratif Indonesia (Sekda Jefridin)(19 Juli 2024)

DOKUMENTASI



NOMINASI PENGHARGAAN.16

Juara Umum

POPDA IX Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024(28 Juli 2024)

DOKUMENTASI



NOMINASI PENGHARGAAN. 17

**Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 dari Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional RI (31 Juli 2024)**

DOKUMENTASI



NOMINASI PENGHARGAAN.18

**Insentif Fiskal Atas
Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 Sebesar
Rp.5,636 Miliar(18 September 2024)**

DOKUMENTASI



NOMINASI PENGHARGAAN. 19

Capaian KBPP

MKJP Pekan Pelayanan 100.000 Akseptor KB Pascapersalinan dalam Rangka
Hari Kependudukan Sedunia Tahun 2024 (22 Oktober 2024)

DOKUMENTASI



NOMINASI PENGHARGAAN.20

Terbaik I Anugerah Manajemen ASN Tahun 2024 dari Badan
Kepegawaian Negara (BKN) RI(13 November 2024)

DOKUMENTASI



NOMINASI PENGHARGAAN. 21

Peringkat I
Penilaian Barang Milik Negara Award Tahun 2024
(18 November 2024)

DOKUMENTASI



NOMINASI PENGHARGAAN.22

Penghargaan
Daerah Terinovatif dalam Innovative Government Award (IGA) Tahun 2024
(5 Desember 2024)

DOKUMENTASI



NOMINASI PENGHARGAAN.23

Plagam Penghargaan LKPP RI Atas Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Kertas HVS pada Katalog Elektronik(10 Desember 2024)

DOKUMENTASI



NOMINASI PENGHARGAAN.24

Penghargaan
Indeks Sistem Merit Kategori Baik dari BKN (19 Desember 2024)

DOKUMENTASI



NOMINASI PENGHARGAAN. 25

Penghargaan APBD
Award Tahun 2024 Dalam Rakornas Keuangan Daerah 2024
(20 Desember 2024)

DOKUMENTASI



NOMINASI PENGHARGAAN.26

Anugerah Mitra Ditmaa Institut Teknologi Bandung Tahun 2024
(6 Desember 2024)

DOKUMENTASI



NOMINASI PENGHARGAAN. 27

Penghargaan

Terbaik Melalui PMB Mariana atas Capaian KBPP MKJP Pekan Pelayanan
100.000 Akseptor KB Pascapersalinan dalam Rangka Hari Kependudukan
Sedunia Tahun 2024 (22 Oktober 2024)

DOKUMENTASI

